

**EVALUASI PROGRAM AKSELERASI MUTU SEKOLAH  
BERWAWASAN INTERNASIONAL (PAMS-BWI)  
DI LPMP JAWA BARAT  
(Penerapan Model Evaluasi Countenance Stake)**



**EDDY FADILLAH SAFARDAN  
7816140554**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Memperoleh Gelar Magister**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2016**

**EVALUATION OF QUALITY ACCELERATION SCHOOL PROGRAM  
INTERNATIONAL PERSPECTIVE IN LPMP, WEST JAVA  
(Application of Stake's Countenance Evaluation Model)**

**EDDY FADILLAH SAFARDAN**

**ABSTRACT**

*Quality Acceleration School Program International Perspective (PAMS-BWI) in LPMP-West Java aim to implement facilitation of education quality assurance process in accordance with the conditions and needs of each educational unit while still referring to eight national education standards (SNP). This Study was an evaluative research focuses on how the level of achievement in the implementation of the program by comparing the observations to reference criteria and produce a decision recommendation. The subject of evaluation research were the team manager, development team of PAMS-BWI and the teachers of targeted schools in Cianjur and Banjar. The data were collected through observation, interviews, documentation and questionnaires. The data were analyzed using descriptive quantitative technique to analyze each of the components of Stake's Countenance model and descriptive quantitative technique to analyze the constraints met in the program implementation. Stake's evaluation results indicate that the implementation of PAMS-BWI in LPMP quite effective and significant in improving the quality of school goals. PAMS-BWI's success can be seen from the achievement of targets that exceed 30% of key performance indicators and the international equivalent INAP achievement test scores to students who exceed a score of 500. The results showed that there were 10 aspects and 13 sub-aspects that meet objective standards. Information that is more detailed and comprehensive information on the shortcomings and advantages of the program can be seen at every stage antecedent, transactions and outcomes, making it easier to determine the corrective actions at the next program.*

**Keywords:** *Quality Acceleration School Program, Stake's Countenance, .*

**EVALUASI PROGRAM AKSELERASI MUTU SEKOLAH  
BERWAWASAN INTERNASIONAL (PAMS-BWI)  
DI LPMP JAWA BARAT  
(Penerapan Model Evaluasi Countenance Stake)**

**EDDY FADILLAH SAFARDAN**

**ABSTRAK**

Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional (PAMS-BWI) di LPMP Jawa Barat bertujuan untuk melaksanakan fasilitasi proses penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan dengan tetap mengacu pada delapan standar nasional pendidikan. Evaluasi model *Countenance Stake* memfokuskan pada bagaimana tingkat pencapaian dalam pelaksanaan program dengan membandingkan antara hasil observasi dengan kriteria acuan dan menghasilkan keputusan rekomendasi. Subyek dari penelitian evaluasi ini adalah tim pengelola PAMS-BWI dan guru-guru model sekolah sasaran di Cianjur dan Banjar. Penelitian ini menggunakan metode evaluatif dengan menggunakan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Hasil evaluasi *Stake* menunjukkan bahwa pelaksanaan PAMS-BWI di LPMP Jabar cukup efektif dan signifikan dalam meningkatkan mutu sekolah sasaran. Keberhasilan PAMS-BWI dapat terlihat dari ketercapaian target yang melebihi 30% indikator kinerja kunci setara internasional dan tercapainya nilai tes INAP (berbasis TIMMS/PISA) terhadap siswa yang melebihi standar skor 500. Hasil penelitian evaluasi dengan Model *Countenance Stake* dapat menunjukkan 10 aspek dan 13 sub aspek yang dievaluasi telah memenuhi standar objektif yang telah ditentukan. Informasi yang lebih detail dan komprehensif mengenai kekurangan dan kelebihan program dapat diketahui pada setiap bahasan pada tahapan *antecedent*, *transactions* dan *outcomes*, sehingga lebih mudah menentukan tindakan perbaikan dan rekomendasi pada program selanjutnya.

**Kata Kunci :** Akselerasi mutu sekolah, Countenance Stake

## RINGKASAN

### Pendahuluan

Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional (PAMS-BWI) di LPMP Jawa Barat bertujuan untuk melaksanakan fasilitasi proses penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan dengan tetap mengacu pada delapan standar nasional pendidikan. Secara khusus tujuan PAMS-BWI adalah : (1) Memperkuat pencapaian sekolah dalam 8 SNP sebagai Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM); dan (2) Mengembangkan pencapaian 8 SNP dengan suatu standar lainnya (setara internasional) yang disebut dengan Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT); (3) Meningkatkan kualitas siswa dalam berpikir kritis, kreatif dan inovatif; dan (4) Meningkatkan pengelolaan sekolah yang transparan dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima.

Permasalahan teknis masih ditemukan berkaitan dengan proses pendampingan dalam penjaminan dan peningkatan mutu di sekolah-sekolah sasaran, seperti pengaturan waktu terkait jadwal program pendampingan terhadap guru model/inti dalam menerapkan *lesson study* di dalam kelas. Ketidaksiapan mental guru model/inti dalam mengikuti alur kegiatan program dan merubah pola kebiasaan umum yang selama ini berlaku dalam proses pembelajaran di kelas. Permasalahan lain juga muncul dari pihak LPMP, terkait dengan kurangnya tenaga SDM (widyaiswara) pada saat proses pendampingan berlangsung di sekolah sasaran, jadwal kegiatan yang padat di luar PAMS-BWI, pencairan dana dari pusat yang tidak tepat waktu sehingga mengganggu skedul yang sudah disusun sejak awal.

Evaluasi ini memfokuskan pada bagaimana tingkat pencapaian dalam pelaksanaan program diperoleh melalui serangkaian proses kegiatan yang

telah dilakukan mulai dari perencanaan, diseminasi program, workshop/pelatihan, pembekalan, pendampingan, monitoring, penilaian sampai dengan evaluasi hasil yang diperoleh

## **Metode**

Penelitian evaluasi menggunakan model evaluasi *Countenance Stake*, yang memberikan Informasi secara deskriptif pada seluruh tahap evaluasi, dan penjelasan standar yang akan digunakan. Model ini memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem, dimana ketiga unsur tersebut (*antecedents, transactions, output*) merupakan suatu rangkaian yang utuh.

Pada penelitian dengan metode evaluatif ini pada pelaksanaan program penjaminan mutu pendidikan ini ditujukan untuk menjelaskan efektivitas program akselerasi mutu sekolah berwawasan internasional (PAMS-BWI) yang dilakukan LPMP Jawa Barat. Pada prinsipnya hasil akhir dari kegiatan tersebut adalah untuk perbaikan dan penyempurnaan program yang sudah berjalan atau yang akan dilanjutkan.

Penelitian ini dilaksanakan di LPMP Jawa Barat (Padalarang, Bandung Barat) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Pusat di propinsi dan beberapa sekolah sasaran kegiatan PAMS-BWI, yaitu SMP-SMP terseleksi yang berlokasi di Kabupaten Cianjur dan Kota Banjar.

Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi ini adalah pendekatan kualitatif dan menggunakan metode evaluatif. Model desain penelitian yang digunakan yaitu *Model Countenance Stake* yang dikembangkan oleh Robert Stake. Evaluasi ini menekankan adanya dua hal pokok, yaitu: deskripsi (*descriptions*) dan keputusan/penilaian (*judgements*), serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu: masukan (*antecedents/context-input*), proses (*transactions/process*), dan keluaran (*outcomes/output*).

## Hasil Penelitian

Komponen *antecedents* (masukan) mengungkapkan kesiapan beberapa aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan PAMS-BWI di LPMP Jawa Barat. Dari aspek landasan formal, dengan adanya kejelasan legalitas program memberikan keleluasaan manajemen sekolah sasaran untuk lebih mendukung program secara maksimal. Diperlukan payung hukum tambahan atau undang-undang revisi untuk dimunculkannya kewenangan para Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Kota secara penuh. Pelaksanaan sosialisasi program sudah mencakup seluruh *stakeholders*, namun perlu penguatan tindak lanjut peran dan fungsi pengawas. Ditinjau dari SDM pelaksana program, tenaga pendamping perlu dipertimbangkan untuk adanya penambahan terkait jadwal pelaksanaan PAMS-BWI yang berlangsung secara bersamaan dengan kegiatan lain. Peningkatan kompetensi pada sebagian widyaiswara diperlukan untuk standardisasi agar memiliki kemampuan yang setara. Dana operasional pada kegiatan PAMS BWI masih terdapat kendala dengan waktu pencairan yang kadang kala terlambat, meskipun demikian dukungan dari manajemen sangat tinggi pada Tim *Adhoc* PAMS-BWI untuk melaksanakan kegiatan program. Di sisi lain yakni pada level sekolah sasaran, dukungan kinerja masih perlu ditingkatkan lagi dan perlu adanya perbaikan pada beberapa aspek terutama dalam standar proses, penilaian dan pengelolaan. Adanya PAMS-BWI mempermudah seluruh sekolah sasaran untuk mendapatkan status dengan predikat terakreditasi, melalui kurikulum yang menerapkan pola pembinaan *Lesson Study* oleh widyaiswara/tenaga pendamping, dan juga didukung oleh komitmen kuat dari kepala sekolah sasaran akan pentingnya mengikuti kegiatan PAMS-BWI. Melalui komponen *transactions* (proses), pelaksanaan program PAMS-BWI telah sesuai dengan standar yang ada dan berjalan cukup efektif. Melalui kegiatan *Workshop*, *On The Job Learning*, Seminar, Pendampingan dan Monev dilaksanakan di sekolah-sekolah sasaran sampai

dengan pelaksanaan pemenuhan standar proses, penilaian dan pengelolaan sesuai kebutuhan PAMS-BWI, menjadikan sekolah-sekolah sasaran berhasil mencapai target tahunan diatas standar yang telah ditetapkan. Sedangkan melalui *Outcomes* (keluaran), hasil akhir yang dapat diukur sebagai bentuk keberhasilan PAMS-BWI adalah tercapainya peningkatan prestasi dan mutu bagi peserta didik dan guru. Hal ini dibuktikan dengan capaian kemampuan standar kelulusan peserta didik dalam hal kenaikan nilai KKM dan capaian pengerjaan soal-soal HOTS/INAP diatas standar internasional TIMMS-PISA. Indikasinya terlihat dari pencapaian prestasi peserta didik, guru sekolah dan kepala sekolah sasaran dalam kompetisi di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini membuktikan bahwa sekolah sasaran PAMS-BWI layak disetarakan dengan sekolah berwawasan internasional lainnya. Dampak dari PAMS-BWI memberi *outcomes* pada semakin tingginya minat dan kepercayaan masyarakat di sekitar sekolah.

Berdasarkan rumusan masalah dari hasil evaluasi menggunakan model *Countenance Stake*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program akselerasi mutu sekolah berwawasan internasional (PAMS-BWI) telah menunjukkan tingkat capaian keberhasilan yang signifikan dan berdampak positif terhadap peningkatan mutu sekolah. Melalui pola pembinaan *lesson study* oleh tenaga pendamping dengan mengacu ke EDS, telah memberikan pengaruh pada kemajuan masing-masing sekolah sasaran dengan ciri dan karakter yang khas. Ditinjau dari tahapan *antecedent* (masukan), *transactions* (proses) dan *outcomes* (keluaran), keseluruhan program telah menunjukkan keberhasilan secara signifikan dalam mencapai indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kesimpulan pada hasil penelitian tersebut di atas, maka saran dan rekomendasi dari penelitian evaluasi ini yang dapat mendukung pelaksanaan program akselerasi mutu sekolah berwawasan internasional adalah :

- a. Perlunya dilakukan peningkatan mutu kompetensi atau *upgrading* pada para pengawas di tingkat dinas pendidikan kabupaten kota, agar dapat menunjang setiap program yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan. Sebagai sebuah sistem perlu adanya kesatuan terpadu antar komponen baik di tingkat pusat, provinsi ataupun kabupaten kota. Fungsi pengawas di daerah adalah menjadi kepanjangan tangan pelaksanaan kebijakan pusat terkait dengan penjaminan mutu pendidikan
- b. Perlunya standardisasi bagi para tenaga pendamping/ widyaiswara terkait dengan pelaksanaan program PAMS-BWI dan program lainnya, agar kebutuhan akan penyelesaian permasalahan di lapangan dapat diatasi dengan kompetensi yang setara.
- c. Perlu dipertimbangkan kembali masalah eselonisasi di tingkat pengawas di provinsi dengan tenaga struktural di tingkat kabupaten kota. Hal ini berhubungan dengan kemampuan pemerintah pusat untuk menekan pelaksanaan kerja pada tingkat yang ada dibawahnya sehingga program dapat berjalan lebih efektif
- d. Perlunya penguatan dalam hal pedoman juknis yang lebih baik lagi pada program PAMS-BWI ini agar sistem yang sudah berjalan dapat terus mengalami penyempurnaan.

1.

**PERSETUJUAN KOMISI PANITIA UJIAN  
DIPERSYARATKAN UNTUK YUDISIUM MAGISTER**

PEMBIMBING I



**Dr. Komarudin, M.Si**

PEMBIMBING II



**Dr. Wardani Rahayu, M.Si**

Tanggal : 29/07/2016

Tanggal : 29/07/2016

**Prof. Dr. Moch. Asmawi, M.Pd.**  
(Ketua)<sup>1</sup>



.....  
Tanda Tangan

29/07/16  
.....  
Tanggal

**Prof. Dr. Burhanuddin Tola, MA**  
(Sekretaris)<sup>2</sup>



.....  
Tanda Tangan

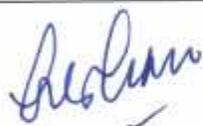
29/07/16  
.....  
Tanggal

Nama : Eddy Fadillah Safardan  
No. Register : 7816140554  
Tanggal lulus : 09 Agustus 2016

1. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta
2. Ketua Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

**PERSETUJUAN PANITIA UJIAN  
ATAS HASIL PERBAIKAN TESIS**

Nama : Eddy Fadillah Safardan  
No. Reg : 7816140554  
Program Studi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan  
Tanggal lulus : 09 Agustus 2016

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	<b>Prof. Dr. Moch. Asmawi, M.Pd</b> (Direktur PPs UNJ/Ketua)		29/07/16
2	<b>Prof. Dr. Burhanuddin Tola, MA</b> (Ketua Program Studi )		29/07/16
3	<b>Dr. Komarudin, M.Si</b> (Pembimbing I)		29/07/16
4	<b>Dr. Wardani Rahayu, M.Si</b> (Pembimbing II)		29/07/16
5	<b>Dr. Awaluddin Tjalla</b> (Penguji)		29/07/16



*Building  
Future  
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Jakarta, Timur13220  
Telp. (021) 4721340, Fax (021) 4897047, website: <http://pps.unj.ac.id>,  
e-mail: [tu.pps@unj.ac.id](mailto:tu.pps@unj.ac.id)



Cert.No.QS4500

## PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul Evaluasi Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional (PAMS-BWI) di LPMP Jawa Barat (Penerapan Model Evaluasi *Countenance Stake*)". Saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Jakarta, Agustus 2016

Eddy Fadillah Safardan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan tesis yang berjudul “Evaluasi Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional (PAMS-BWI) di LPMP Jawa Barat (Penerapan Model Evaluasi *Countenance Stake*)”. Tesis ini saya susun sebagai rangkaian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Penelitian dan tesis ini tidak akan pernah selesai dengan baik tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu sudah selayaknya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Komarudin, M.Si selaku Dosen pembimbing 1 dan Ibu Dr. Wardhani Rahayu, M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan semenjak penelitian hingga penyusunan tesis
2. Ayahanda (A. Suhana), Ibunda (Rodiah), Bapak Mertua (Tuwun) dan Ibu Mertua (Sutiyah) terkasih, tercinta, tersayang yang tak pernah putus selalu memberikan doa-doa dan dukungan moril kepada penulis
3. Isteri (Nur Wulandari) dan anak-anakku (Farhan Rizqy Ghazali Safardan dan Sabrina Nurfathiyya Rahma Safardan) tercinta yang telah sangat luar biasa memberi dukungan fisik, moril, semangat dan doa-doanya
4. Bapak Dr. Awaluddin Tjalla, yang telah bersedia menjadi dosen penguji dan memberi banyak masukan yang berharga demi kesempurnaan tesis
5. Ibu Dr. Dida Hamidah, M.Si yang telah memberi arahan, bimbingan dan bantuan selama di LPMP Jawa Barat

6. Rekan-rekan terbaik PEP Dikmen 2014 (Asmuri, Rohaniya, Dwi Setyati, Musriwan, Neneng, Firman) yang selalu setia dalam kebersamaan selama melalui masa-masa perkuliahan di Kampus UNJ
7. Dan semua pihak yang telah membantu penulis selama studi maupun penelitian

Sebagaimana layaknya buatan manusia, tulisan ini tidak dapat menampilkan wujud yang sempurna. Tentu masih sangat banyak kekurangan yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang mungkin dapat memperbaiki kekurangan yang ada dalam tesis ini.

Harapan penulis semoga karya ini tidaklah sia-sia dan dapat berharga bagi perkembangan keilmuan dalam bidang pendidikan serta bermanfaat bagi yang membacanya.

Jakarta, Agustus 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
RINGKASAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN .....	x
LEMBAR PERNYATAAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Perumusan Masalah .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12

### BAB II KAJIAN TEORETIK

A. Konsep Evaluasi Program .....	15
1. Pengertian Evaluasi .....	15
2. Pengertian Evaluasi Program .....	19
3. Model-model Evaluasi Program .....	27
B. Konsep Program yang dievaluasi .....	40
1. PAMS-BWI .....	40
2. PAMS dan <i>Lesson Study</i> .....	52
3. Evaluasi Diri Sekolah (EDS) .....	71

C. Model Evaluasi <i>Countenance Stake</i> .....	74
1. Evaluasi <i>Antecedents</i> .....	80
2. Evaluasi <i>Transactions</i> .....	81
3. Evaluasi <i>Outcomes</i> .....	83
4. Dasar Pemilihan Model Evaluasi <i>Countenance Stake</i> .....	85
D. Kriteria Evaluasi .....	89

### **BAB III METODOLOGI**

A. Tujuan Evaluasi .....	97
B. Tempat dan Waktu penelitian .....	99
C. Pendekatan, Metode, dan Desain Penelitian .....	102
D. Instrumen Penelitian .....	106
1. Kisi-kisi instrumen .....	106
2. Validasi instrumen .....	109
E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	112
1. Wawancara .....	115
2. Observasi .....	116
3. Dokumentasi .....	117
4. Kuisisioner/angket .....	118
F. Teknik Analisis .....	118
1. Reduksi data .....	120
2. Penyajian data .....	121
3. Pengambilan kesimpulan .....	121
G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	122

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Hasil Evaluasi.....	124
B. Pembahasan .....	168

## **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

A. Kesimpulan.....	204
B. Rekomendasi.....	206

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Nama-nama sekolah sasaran PAMS-BWI .....	43
Tabel 2.2 Indikator keberhasilan program PAMS-BWI .....	45
Tabel 2.3 Mekanisme program tahap pertama PAMS .....	49
Tabel 2.4 Kriteria Evaluasi PAMS-BWI .....	93
Tabel 3.1 Tahapan perencanaan pelaksanaan evaluasi PAMS-BWI .....	108
Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen <i>Antecedent</i> .....	109
Tabel 3.3 Kisi-kisi instrumen <i>Transsactions</i> .....	110
Tabel 3.4 Kisi-kisi instrumen <i>Outcomes</i> .....	111
Tabel 3.5 Teknik pengumpulan data .....	115

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tahapan kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan .....	4
Gambar 2.1 Mekanisme proses pendampingan PAMS-BWI .....	47
Gambar 2.2 <i>Grand Design</i> PAMS .....	48
Gambar 2.3 Model Evaluasi <i>Countenance Stake</i> .....	75
Gambar 2.4 Pengolahan data deskriptif model <i>Stake</i> .....	79
Gambar 3.1 Desain Penelitian Model Evaluasi <i>Countenance Stake</i> pada PAMS-BWI .....	105
Gambar 3.2 Model analisis data .....	109
Gambar 4.1 Prosentase ketercapaian aspek akreditasi dan kurikulum.	114
Gambar 4.2 Prosentase ketercapaian standar proses.....	153
Gambar 4.3 Prosentase ketercapaian standar penilaian dan PTK .....	157
Gambar 4.4 Prosentase ketercapaian standar pengelolaan .....	158
Gambar 4.5 Prosentase ketercapaian standar kompetensi lulusan.....	161
Gambar 4.6 Nilai skor INAP untuk kemampuan membaca siswa.....	162
Gambar 4.7 Nilai skor INAP untuk kemampuan matematika siswa.....	163
Gambar 4.8 Nilai skor INAP untuk kemampuan IPA siswa.....	164
Gambar 4.9 Kerangka pikir evaluasi <i>antecedents</i> PAMS-BWI.....	169
Gambar 4.10 Kerangka pikir evaluasi <i>transactions</i> PAMS-BWI.....	186
Gambar 4.11 Kerangka pikir evaluasi <i>outcomes</i> PAMS-BWI.....	196
Gambar 4.12 Ketercapaian sekolah sasaran.....	199
Gambar 4.13 Ketercapaian lingkungan sekolah PAMS-BWI.....	202

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang terus berupaya melakukan program-program kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Mutu pendidikan yang dimaksud, secara konseptual menurut Suryadi adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.<sup>1</sup>

Upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang menjadi fokus perhatian para ahli pendidikan, penentu kebijakan, dan masyarakat pemerhati pendidikan guna menemukan faktor-faktor apa saja yang harus segera diperbaiki. Beberapa hal seperti fasilitas pendidikan, kualitas guru, kondisi siswa, dan lingkungan belajar, kesemuanya merupakan indikator yang menunjang keberhasilan pendidikan.

Berdasarkan Laporan Tahun 2013 dari UNDP tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia berada pada urutan 108 dari 187 negara di dunia. Urutan pertama dengan IPM tertinggi dicapai oleh Norwegia di Benua Eropa. Sementara itu nilai IPM di negara-negara ASEAN seperti

---

<sup>1</sup> Ace Suryadi dan Hasim Budimansyah, *Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional* (Bandung : Widya Aksara Press, 2009), p. 197.

Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand berturut-turut berada pada posisi 9, 30, 62 dan 89.<sup>2</sup> Menurut laporan TIMSS (*Third in International Mathematics Science and Study*) Tahun 2011, prestasi Matematika dan IPA di Indonesia berada pada posisi 38 dan 40 dari 42 negara yang terdaftar sebagai peserta.<sup>3</sup> Sedangkan menurut PISA (*Program for International Student Assessment*), kemampuan anak Indonesia usia 15 tahun di bidang matematika, sains dan membaca jika dibandingkan dengan anak-anak lain di dunia ternyata juga menunjukkan hasil yang masih rendah. Berdasarkan hasil PISA Tahun 2012, Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 65 negara yang ikut dalam tes tersebut.<sup>4</sup>

Sekolah merupakan salah satu unit dari keseluruhan sistem pendidikan nasional yang berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia seringkali dikaitkan dengan lemahnya fungsi satuan pendidikan sebagai tempat pusat pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa betapa sekolah-sekolah di Indonesia ini belum dapat dimaksimalkan perannya dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan secara konsisten dan terpadu.

---

<sup>2</sup> Sumber, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/07/24/indeks-pembangunan-manusia-norwegia-no-1-indonesia-no-108> (diakses, 12 Desember 2015)

<sup>3</sup> Sumber, <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/14/02/27/kemana-arrah-pondidikan-indonesia> (diakses, 12 Desember 2015)

<sup>4</sup> Sumber, <http://www.kopertis12.or.id/2013/12/05/skor-pisa-posisi-indonesia-nyaris-jadi-juru-kunci> (diakses, 12 Desember 2015)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, memuat aturan tentang kewajiban setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dan juga peran serta masyarakat. Pada tingkat pemerintah pusat dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP), Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri serta instansi terkait lainnya. Penjaminan mutu pada level pemerintah daerah propinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, LPMP dan Kantor Wilayah Departemen Agama, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota dan Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang berlaku saat ini merupakan tanggung jawab tiap pemangku kepentingan pendidikan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi SPMP itu sendiri terdiri atas rangkaian proses/tahapan yang secara siklik dimulai dari:

(1) pengumpulan data, (2) analisis data, (3) pelaporan/pemetaan, (4) penyusunan rekomendasi, dan (5) upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program peningkatan mutu pendidikan.<sup>5</sup> Pelaksanaan tahapan-tahapan di atas dilaksanakan secara kolaboratif antara satuan pendidikan dengan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan) yaitu penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.



Gambar 1.1 Tahapan Kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia berkaitan dengan 3 (tiga) bidang garapan utama yaitu: (1) pengkajian mutu

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

pendidikan; (2) analisis dan pelaporan mutu pendidikan; dan (3) peningkatan mutu dan penumbuhan budaya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Khususnya pada pengkajian mutu pendidikan, diperlukan adanya pemetaan dan penetapan langkah pencapaian mutu.

SPMP berbasis pada data dan pemetaan yang valid, akurat, dan empirik. Data yang dikumpulkan tersebut oleh sekolah dapat diperoleh dari hasil akreditasi sekolah, sertifikasi guru, ujian nasional, dan profil sekolah. Selain itu terdapat juga Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang merupakan instrumen implementasi SPMP yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sebagai salah satu program akseleratif dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan pendidikan.<sup>6</sup>

Kegiatan pemetaan dilaksanakan melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan instrumen lain yang dapat menambah informasi tentang profil sekolah. Sedangkan penetapan langkah pencapaian mutu adalah berupa rencana sistematis, rasional, dan terukur yang dirumuskan oleh satuan pendidikan untuk memenuhi pencapaian mutu pendidikan. EDS merupakan komponen penentu yang sangat penting dalam sistem pengembangan pendidikan nasional karena dengan EDS sekolah berperan dalam membangun informasi pendidikan nasional terutama dalam memotret kinerja sekolah dalam penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SNP

---

<sup>6</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010; Prioritas Nomor 2. Pendidikan

(Standar Nasional Pendidikan). Informasi yang terbangun menjadi dasar bagi perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan kebijakan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan juga nasional.

Pada tataran operasional, LPMP Jawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpatokan pada skema program yang diamanatkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan (BPSDMK) dan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP). Sebagai unit pelaksana teknis pusat yang berada di daerah, LPMP Jawa Barat membantu pusat dalam melaksanakan program penjaminan mutu pendidikan. Salah satunya adalah Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional (PAMS-BWI) yang dalam kegiatannya mengkombinasikan antara EDS dan implementasi *Lesson Study* di sekolah.

Pelaksanaan Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional (PAMS-BWI) tersebut didasarkan pada Permendiknas No. 37 Tahun 2012 Pasal 3 ayat c dan d bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMP menyelenggarakan fungsi ayat c yang berbunyi "Supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional"; dan ayat d yang berbunyi "Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan".

Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional (PAMS-BWI) di LPMP Jawa Barat bertujuan untuk melaksanakan fasilitasi proses penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan dengan tetap mengacu pada delapan standar nasional pendidikan.

Secara umum PAMS-BWI bertujuan untuk: (1) Melakukan pendampingan proses penjaminan dan peningkatan mutu di satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah (EDS) untuk mencapai indikator-indikator kinerja dalam SNP. (2) Menindaklanjuti hasil EDS sebagai bahan dasar penyusunan peta mutu kabupaten/kota dan perencanaan program investasi pendidikan. Adapun secara khusus tujuan PAMS-BWI adalah : (1) Memperkuat pencapaian sekolah dalam 8 SNP sebagai Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM); dan (2) Mengembangkan pencapaian 8 SNP dengan suatu standar lainnya (setara internasional) yang disebut dengan Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT); (3) Meningkatkan kualitas siswa dalam berpikir kritis, kreatif dan inovatif; dan (4) Meningkatkan pengelolaan sekolah yang transparan dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima.

Sebagai program unggulan LPMP Jawa Barat, PAMS-BWI merupakan kegiatan khas yang belum pernah dilaksanakan di tempat lain sehingga mendorong peneliti untuk mengetahui lebih dalam gambaran sesungguhnya mengenai efektifitas ketercapaian program dan pengaruh

program tersebut terhadap peningkatan mutu sekolah sasaran. Mengingat sebagaimana yang juga pernah berlaku pada program-program lain pada umumnya, terutama untuk program yang baru pertama kali dikerjakan di suatu institusi atau wilayah, tentunya program PAMS-BWI ini pun akan menemui banyak hambatan dan rintangan pada pelaksanaan kegiatannya.

Kenyataannya, cukup banyak ditemukan permasalahan teknis di lapangan, terutama berkaitan dengan proses pendampingan dalam penjaminan dan peningkatan mutu di sekolah-sekolah sasaran. Sebagai contoh adalah masalah pengaturan waktu terkait jadwal program pendampingan terhadap guru model/inti dalam menerapkan *lesson study* di dalam kelas. Hal ini dikarenakan penggunaan waktu belajar program PAMS-BWI tidak sesuai dengan skedul yang sudah direncanakan kurikulum sekolah sebelumnya. Ketidaksiapan mental guru model/inti yang secara mendadak harus mengikuti aturan kegiatan program yang telah ditetapkan sehingga merubah pola kebiasaan umum yang selama ini berlaku dalam proses pembelajaran di kelas. Terlebih lagi dengan adanya tuntutan program PAMS-BWI yang didalamnya menerapkan pola pembinaan guru model *lesson study* dan penerapan kurikulum 2013, tentunya memerlukan persiapan dan perencanaan yang lebih matang. Permasalahan lain juga muncul dari pihak LPMP, terkait dengan kurangnya tenaga SDM (widyaiswara) pada saat proses pendampingan berlangsung di sekolah sasaran. Pelaksanaan program lain di LPMP yang demikian banyak dengan skedul yang sangat

padat sangat memungkinkan tenaga pendamping/ widyaiswara harus mengerjakan program lain pada waktu yang bersamaan di luar PAMS-BWI. Hal ini memunculkan masalah baru yaitu kebutuhan dalam hal penyesuaian jadwal program agar seluruh kegiatan di LPMP dapat dipenuhi seluruhnya.

Meskipun program PAMS BWI ini sudah berhasil menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dalam upaya meningkatkan prestasi, kinerja dan juga mutu sekolah, namun masih perlu dilakukan beberapa perbaikan-perbaikan proses dari segi teknis/ operasional maupun non teknis. Salah satunya adalah waktu penyelenggaraan program yang seringkali tidak sesuai atau tidak konsisten pada setiap tahapan kegiatan. Pengaruh pencairan dana dari pusat yang tidak tepat waktu membuat pelaksanaan PAMS-BWI juga mengalami keterlambatan pada setiap periodenya, sehingga mengganggu skedul yang sudah disusun sejak awal. Masih terdapat kendala-kendala lain yang cukup mempengaruhi efektifitas ketercapaian program ini.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, pada akhirnya menggugah peneliti untuk menggali lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan program akselerasi mutu sekolah ini, terutama dalam hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapai oleh LPMP dan pemerintah pusat.

Sebagai rangkaian akhir dari pelaksanaan program PAMS-BWI ini, diharapkan sebuah hasil berupa gambaran kondisi capaian mutu pendidikan berbasis indikator-indikator mutu yang telah ditetapkan. Lebih jauh lagi diharapkan dari hasil analisis pada penelitian ini mampu memberikan

masukan bagi pemerintah berupa program-program penjaminan mutu pendidikan yang dapat dilaksanakan di level kabupaten/kota, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Terkait dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merasa perlu diadakan sebuah penelitian evaluatif, yang mengangkat sebuah tesis dengan judul “Evaluasi Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional (PAMS-BWI) di LPMP Jawa Barat dengan Menerapkan Model Evaluasi *Countenance Stake*”

## **B. Fokus Penelitian**

Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional (PAMS-BWI) akan berhasil jika tujuan dari program tersebut telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, melalui analisis perbandingan antara tujuan dan hasil yang dapat dicapai dengan menggunakan ukuran 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan pengembangan standar lain (IKKM dan IKKT) yang sudah ditetapkan oleh LPMP Jawa Barat. Keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut tentunya banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu aspek masukan, proses maupun keluaran.

Untuk meningkatkan efektifitas Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional di LPMP Jawa Barat ini, maka evaluasi akan memfokuskan pada bagaimana tingkat pencapaian dalam pelaksanaan

program diperoleh melalui serangkaian proses yang telah dilakukan mulai dari perencanaan, diseminasi program, workshop/pelatihan, pembekalan, pendampingan, monitoring, penilaian sampai dengan evaluasi hasil. Pada akhir evaluasi program akan dideskripsikan tujuan dan pengamatan serta pengambilan keputusan berdasarkan standar yang dilihat berdasarkan 3 tahapan program menggunakan model *Stake* yaitu *antecedents phase* (konteks dan input), *transactions phase* (proses) dan *outcomes phase* (hasil).

### **C. Perumusan Masalah**

Penelitian evaluasi terhadap Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional ini akan dibatasi pada persoalan esensial yang berkaitan dengan bagaimana efektifitas praktik penyelenggaraan program tersebut ditinjau dari 3 tahapan program: *antecedents phase*, *transactions phase* dan *outcomes phase*. Pada setiap program akan mengungkapkan apa yang diinginkan/diharapkan dan apa yang terjadi (kondisi faktual).

Dengan merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang ada maka dapat diformulasikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesiapan dan relevansi aspek *antecedents* (konteks dan masukan) dalam memberi dukungan pada pelaksanaan program akselerasi mutu sekolah berwawasan internasional yang meliputi : efektifitas kegiatan sosialisasi, pelaksanaan standar operasi prosedur

- (SOP), ketepatan waktu dalam pencairan dana, kecukupan sumber daya manusia (widyaiswara/tenaga pendamping) dan dukungan kinerja dari sekolah sasaran?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan program ditinjau dari aspek *transactions* pada komponen proses yang meliputi pelaksanaan: diseminasi dan OJL, program pendampingan oleh widyaiswara, standar proses, standar penilaian (berbasis internasional dari TIMMS/PISA), dan juga pelaksanaan standar pengelolaan sekolah berbasis MBS/M di sekolah sasaran?
  3. Bagaimanakah keberhasilan pelaksanaan program PAMS-BWI dilihat dari aspek *Outcomes* (keluaran) yang meliputi : hasil pencapaian standar kompetensi siswa, hasil penilaian siswa dalam ujian soal-soal setara internasional (TIMMS/PISA) dan peningkatan mutu sekolah yang mengacu pada SNP, IKKM dan IKKT?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara umum manfaat penelitian ini adalah untuk menggambarkan kegiatan dan hasil nyata tentang Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional (PAMS-BWI) di LPMP Jawa Barat berdasarkan Model Evaluasi *Countenance Stake*.

Dari sisi akademis, penelitian ini menawarkan peluang bagi perluasan kajian akademik berkaitan dengan Program Akselerasi Mutu Sekolah (PAMS) yang ternyata diketahui saat ini tengah menjadi bagian dari rencana

pemerintah pusat untuk melaksanakan program kegiatan serupa pada Tahun 2016 dengan cakupan yang lebih luas (skala nasional), dimana sebagian kegiatan didalam program tersebut telah mengadaptasi dari konsep yang berlaku pada program pendampingan PAMS-BWI yang telah digagas oleh LPMP Jawa Barat.

Dari aspek praktis diharapkan memiliki signifikansi dalam menambah khasanah pemikiran dan kajian praktis pada pengambilan keputusan.

Secara khusus penelitian ini akan memberi manfaat bagi :

1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat, sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan keberlanjutan Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional (PAMS-BWI) pada tahap dan periode selanjutnya.
2. Jajaran pimpinan PAMS-BWI, dapat menjadi bahan masukan dalam rangka peningkatan ataupun perbaikan dari sisi manajemen maupun skema baru pada tahap program PAMS-BWI selanjutnya.
3. Widyaiswara, dapat lebih memahami dan mengimplementasikan ilmu yang dimiliki pada PAMS-BWI, dengan harapan adanya peningkatan kompetensi, kinerja dan produktifitas individu serta dapat berkontribusi lebih dalam upaya meningkatkan mutu sekolah sasaran sesuai tupoksinya.

4. Sekolah, sebagai satuan pendidikan yang menjadi obyek sasaran program, dapat berguna untuk dijadikan referensi dalam pelaksanaan dan perbaikan program penjaminan mutu sekolah selanjutnya
5. Guru, dengan harapan dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dalam pembelajaran dan menambah khasanah ilmu dalam rangka meningkatkan mutu lulusan sekolah yang berwawasan internasional.

Atas dasar hal-hal yang dikemukakan di atas, maka hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif bagi pemerintah pusat, LPMP, pemerintah daerah propinsi/kabupaten-kota dan juga satuan pendidikan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIK**

Dalam rangka melakukan Evaluasi Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional (PAMS-BWI) di LPMP Jawa Barat, maka pada bab ini akan diuraikan secara teoritik (1) konsep evaluasi dan evaluasi program; (2) konsep program yang akan dievaluasi (PAMS-BWI); (3) model-model evaluasi beserta alasan mengambil model evaluasi tertentu.

Pengertian evaluasi dan evaluasi program dimunculkan adalah untuk memberikan batasan agar tidak menimbulkan penafsiran keliru. Dengan demikian, pemahaman akan masing-masing definisi tersebut dapat diketahui dan dibandingkan.

Sedangkan pembahasan mengenai berbagai model-model evaluasi yang dikenal, bertujuan untuk mengkaji model-model evaluasi dan pada akhirnya peneliti dapat memilih model mana yang cocok untuk mengevaluasi program yang sedang ingin diteliti.

#### **A. Konsep Evaluasi Program**

##### **1. Pengertian Evaluasi**

Dalam aktifitas hidup manusia sudah pasti akan ditemukan kondisi dimana suatu kegiatan berlangsung tidak efektif dan efisien. Oleh karenanya

evaluasi akan sangat diperlukan dan memegang peranan penting. Melalui hasil evaluasi ini, perbaikan dan penyempurnaan program akan dilakukan dalam aktifitas kegiatan manajemen.

Terdapat tiga istilah yang sering digunakan dalam evaluasi, yaitu tes (*test*), pengukuran (*measurement*) dan penilaian (*assessment*). Djaali dan Muljono mengatakan bahwa tes diartikan alat yang dipergunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan obyek ukur terhadap seperangkat konten dan materi tertentu.<sup>1</sup> Kemudian dijelaskan juga bahwa pengukuran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dalam arti memberi angka terhadap sesuatu obyek pengukuran atau obyek ukur. Sedangkan penilaian merupakan suatu tindakan atau proses menentukan nilai sesuatu obyek.<sup>2</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tes merupakan alat, pengukuran merupakan kegiatan untuk mengukur dan lebih bersifat kuantitatif, sedangkan penilaian adalah mendeskripsikan berdasarkan hasil pengukuran. Pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hirarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (*assesment*), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan

---

<sup>1</sup> Djaali dan Pudji Muljono. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan* (Jakarta: Grasindo, 2008),h.6.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 2.

hasil pengamatan dengan kriteria, *Assesment* merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku.

Secara etimologi evaluasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu kata *evaluation* yang diserap kedalam Bahasa Indonesia yang dimaknai sebagai suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan secara terminologi pengertian evaluasi sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan dan cara pandang tokoh yang memusatkan perhatiannya kepada evaluasi tersebut. Misalnya Arikunto dan Abdul Jabar, memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.<sup>3</sup> Definisi lain dikemukakan Stufflebeam dan Shinkfield bahwa evaluasi menyangkut penilaian manfaat (worth) dan juga penilaian kualitas (merit) dari program yang dievaluasi.<sup>4</sup>

Senada dengan Stufflebeam dan Shinkfield, Widoyoko menyatakan bahwa Evaluasi merupakan proses menyediakan informasi yang dapat

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.1.

<sup>4</sup> Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield, *Evaluation Theory, Models, and Applications* (San Fransisco: Jossey-Bass, 2007),h.10.

dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (*the worth and merit*) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, serta meningkatkan pemahaman terhadap fenomena.<sup>5</sup>

Demikian juga yang dikatakan Wirawan, menurutnya evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai obyek evaluasi. Selanjutnya melakukan penilaian dan membandingkan dengan indikator, untuk kemudian digunakan dalam mengambil keputusan mengenai obyek evaluasi.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan sistematis dengan melakukan pemilihan, pengumpulan, analisis data, penyajian informasi dan menginterpretasikan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya.

Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan evaluasi pada tahap awal harus menentukan fokus yang akan di evaluasi dan desain yang akan digunakan. Hal ini berarti harus ada kejelasan apa yang

---

<sup>5</sup> S. Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.3.

<sup>6</sup> Wirawan, *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 7.

akan dievaluasi yang secara implisit juga menekankan adanya tujuan evaluasi.

Adapun tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak hasil yang dicapai, efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan.

Dengan demikian dari semua penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai seberapa jauh suatu program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yang kemudian diikuti dengan pengambilan keputusan terhadap objek yang dievaluasi dan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

## **2. Pengertian Evaluasi Program**

Program dalam pengertian umum adalah sebuah bentuk rencana.<sup>7</sup> Perencanaan yang dilakukan secara berkala berupa rancangan kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Dalam program tersebut

---

<sup>7</sup> Arikunto dan Abdul Jabar, *op.cit.*, hh. 3-4

dituangkan terkait apa yang akan dilakukan, siapa yang melakukan, dimana dilakukan dan kapan dilakukan.

Apabila program ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian terdapat 3 unsur penting yang perlu ditekankan dalam menentukan program yaitu : (a) program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan; (b) terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan; dan (c) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.<sup>8</sup>

Sebuah program merupakan sebuah kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara singkat dan hanya satu kali saja, melainkan kegiatan yang berkesinambungan, jamak dan dilaksanakan dalam waktu yang relatif lama, serta melibatkan sekelompok orang karena melaksanakan suatu kebijakan. Sebagai contoh program yaitu dalam penelitian ini adalah program akselerasi mutu sekolah berwawasan internasional (PAMS-BWI) yang dilakukan LPMP Jawa Barat.

---

<sup>8</sup> *ibid.*, h.4.

Hal di atas menunjukkan bahwa program adalah sekumpulan kegiatan yang terencana dan tersistem dan terdiri dari komponen-komponen meliputi: tujuan, sasaran, kriteria keberhasilan, jenis kegiatan, prosedur untuk melaksanakan kegiatan, waktu untuk melakukan kegiatan, komponen pendukung seperti fasilitas, alat dan bahan, dan pengorganisasian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu kegiatan terencana secara sistematis yang meliputi landasan kebijakan, tujuan dan sasaran yang jelas, pelaksana dan penanggung jawab program, prasarana dan sarana yang memadai, pembiayaan, serta sumber-sumber pendukung lainnya untuk keberhasilan pelaksanaan program.

Menurut Ralph Tyler seperti dikutip Suharsimi dan Cipi Safrudin Abdul Jabar mengatakan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat terealisasikan.<sup>9</sup>

Suharsimi Arikunto dan Abdul Jabar menjelaskan bahwa evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya.<sup>10</sup> Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktis Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h.5.

<sup>10</sup> *Ibid*, h.18

perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan.

Evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk dari sebuah penelitian, yaitu penelitian evaluatif. Sejalan dengan pengertian yang terkandung di dalamnya, maka penelitian evaluatif memiliki ciri-ciri dan persyaratan sebagai berikut :

1. Proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya.
2. Dalam melaksanakan evaluasi, peneliti harus berpikir secara sistematis, yaitu memandang program yang diteliti sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam menunjang keberhasilan kinerja dari objek yang dievaluasi.
3. Agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dari objek yang dievaluasi, perlu adanya identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program.
4. Menggunakan standar, kriteria, atau tolok ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh dan untuk mengambil kesimpulan.

5. Kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang telah ditentukan. Dengan kata lain, dalam melakukan kegiatan evaluasi program, peneliti harus berkiblat pada tujuan program kegiatan sebagai standar, kriteria, atau tolok ukur.
6. Agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata secara rinci untuk mengetahui bagian mana dari program yang belum terlaksana, maka perlu ada identifikasi komponen yang dilanjutkan dengan identifikasi sub komponen, sampai pada indikator dari program yang dievaluasi.
7. Standar, kriteria, atau tolok ukur diterapkan pada indikator, yaitu bagian yang paling kecil dari program agar dapat dengan cermat diketahui letak kelemahan dari proses kegiatan.
8. Dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat.

Seperti yang disebutkan oleh Sudjana<sup>11</sup>, tujuan khusus Evaluasi

Program terdapat 6 (enam) hal, yaitu untuk :

1. Memberikan masukan bagi perencanaan program;

---

<sup>11</sup> Djuju Sudjana. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006), h.48

2. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program;
3. Memberikan masukan bagi pengambilan keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program;
4. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program;
5. Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program; dan
6. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan luar sekolah.

Menurut Sudjana, tujuan evaluasi adalah untuk melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara bijaksana. Oleh karenanya evaluasi program dapat menyajikan 5 (lima) jenis informasi dasar sebagai berikut :

- a) Berbagai data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu program harus dilanjutkan.
- b) Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil berdasarkan jumlah biaya yang digunakan.

- c) Informasi tentang unsur-unsur setiap program dan gabungan antar unsur. Program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai.
- d) Informasi untuk berbagai karakteristik sasaran program-program pendidikan sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentang individu, kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling menerima pengaruh dari pelayanan setiap program.
- e) Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program.

Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari suatu program, oleh karena itu pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahapan siklus pengelolaan program yang mencakup :

- a) Evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*). Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b) Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*). Pada tahap pelaksanaan, evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

c) Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*) pada tahap paska pelaksanaan evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program.

Penelitian evaluasi program adalah suatu usaha untuk mengetahui kinerja suatu program pembelajaran dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan sistem dalam pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Evaluasi program adalah proses membandingkan suatu kegiatan pembelajaran di lapangan dengan rencana yang telah dibuat untuk menentukan pengambilan keputusan tentang program tersebut, apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan berkesinambungan. Evaluasi dapat dilakukan pada saat permulaan, selama proses berlangsung, dan pada akhir program, bukan merupakan penutup suatu kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian program sekaligus memberikan pertanggungjawaban

terhadap program yang berjalan. Kegiatan evaluasi memberikan informasi pada pengambilan keputusan di tahap perencanaan. Dengan demikian kegiatan evaluasi memerlukan kriteria sebagai acuan dalam menentukan ketercapaian objek yang dinilai.

Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat diintisarikan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

### **3. Model-model Evaluasi Program**

Model evaluasi merupakan suatu desain yang dibuat oleh para ahli atau pakar evaluasi sesuai dengan namanya. Suatu model evaluasi menunjukkan ciri khas baik dari tujuan evaluasi, aspek yang akan dievaluasi, keluasan cakupan, tahapan evaluasi, tahapan program yang akan dievaluasi dan juga cara pendekatan. Dalam melakukan evaluasi program dapat digunakan beberapa model. Meskipun satu dengan yang lainnya berbeda, namun maksudnya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi berkenaan dengan obyek yang akan dievaluasi. Biasanya model evaluasi ini dibuat berdasarkan kepentingan seseorang, lembaga atau

instansi yang ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan dapat mencapai hasil yang diharapkan atau tidak. Model-model tersebut cukup bervariasi, namun dari kesemuanya dapat ditarik kesimpulan mengenai persamaannya sehubungan dengan pengambilan keputusan sebagai pemanfaatan data pelaksanaan program evaluasi tersebut.

Ada banyak model yang bisa digunakan untuk mengevaluasi sebuah program. Kaufman dan Thomas dalam Suharsimi Arikunto membedakan model evaluasi menjadi delapan yaitu: *Goal Oriented Evaluation Model* (Tyler), *Goal Free Evaluation Model* (Scriven), *Formatif Summatif Evaluation Model* (M.Scriven), *Countenance Evaluation Model* (Stake), *Responsive Evaluation Model* (Stake), *CSE-UCLA Evaluation Model*, *CIPP Evaluation Model* (Stufflebeam) dan *Discrepancy Model* (Provus).<sup>12</sup>

a) *Goal Oriented Evaluation*

Model evaluasi yang paling awal, dikembangkan oleh Tyler mulai tahun 1961, memfokuskan pencapaian tujuan pendidikan mengenai sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Indikator pencapaian tujuan ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa, kinerja guru, efektifitas PBM, kualitas layanan prima.

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hh. 40-41.

Dalam evaluasi program pendidikan, pengukuran dilakukan terhadap variabel/ indikator pendidikan, hasil pengukuran dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelum program dilaksanakan atau dengan kriteria standar, sehingga dapat menggambarkan berhasil atau tidaknya program pendidikan.

b) *Goal Free Evaluation Model*

Model Evaluasi Bebas Tujuan (*Goal Free Evaluation Model*) dikemukakan oleh Michael Scriven pada tahun 1973. Menurut Scriven model evaluasi ini merupakan evaluasi pengaruh yang sesungguhnya, objektif yang ingin dicapai oleh program. Ia mengemukakan bahwa evaluator seharusnya tidak mengetahui tujuan program sebelum melakukan evaluasi.<sup>13</sup> Suatu program dapat mempunyai tiga jenis pengaruh: (a) pengaruh sampingan negatif, yaitu pengaruh sampingan yang tidak dikehendaki oleh program; (b) pengaruh positif yang ditetapkan oleh tujuan program; (c) pengaruh sampingan positif, yaitu pengaruh positif program di luar pengaruh positif yang ditentukan oleh tujuan program.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hh. 40-41.

<sup>14</sup> Wirawan, *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 84.

*Goal Free Evaluation Model* tidak didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dari program kegiatan, namun berorientasi pada pihak eksternal, pihak konsumen, *stake holders*, dewan pendidikan dan masyarakat. Scriven mengatakan bahwa bagi konsumen, *stake holders*, atau masyarakat tujuan suatu program tidak penting. Yang penting bagi konsumen adalah perilaku bagus yang dapat ditampilkan oleh setiap personal yang mengikuti program kegiatan atau setiap barang yang dihasilkan. Dalam konteks evaluasi pendidikan, *goal free* bukan berarti bahwa evaluator buta atau tidak mau tahu tentang tujuan program. Namun evaluator membatasi diri untuk tidak terlalu fokus pada tujuan agar terhindar dari bias. Model evaluasi ini hanya mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program, bukan secara rinci per komponen.

*Goal Free Evaluation Model*, fokus pada adanya perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari program diimplementasikan, melihat dampak sampingan baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, dan membandingkan dengan sebelum program dilakukan. Evaluasi juga membandingkan antara hasil yang ingin dicapai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk program tersebut (*cost benefit analysis*).

c) *Formatif-Summatif Evaluation Model* oleh Scriven

Evaluasi model ini dikembangkan oleh Michael Scriven, dengan membedakan evaluasi menjadi dua jenis yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.

Evaluasi formatif bersifat internal berfungsi untuk meningkatkan kinerja lembaga, mengembangkan program/personal, bertujuan untuk mengetahui perkembangan program yang sedang berjalan (in-progress). Monitoring dan supervisi, termasuk dalam kategori evaluasi formatif, dilakukan selama kegiatan program sedang berlangsung, dan akan menjawab berbagai pertanyaan: 1) Apakah program berjalan sesuai rencana?; 2) Apakah semua komponen berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing?; 3) Jika tidak apakah perlu revisi atau modifikasi?

Evaluasi Sumatif dilakukan pada akhir program, bertujuan untuk mengetahui keberhasilan program yang telah dilaksanakan, memberikan pertanggungjawaban atas tugasnya, memberikan rekomendasi untuk melanjutkan atau menghentikan program pada tahun berikutnya. Evaluasi ini akan dapat menjawab pertanyaan: 1) Sejauh mana tujuan program tercapai? 2) Perubahan apa yang terjadi setelah program selesai 3) Apakah program telah dapat menyelesaikan masalah 4) Perubahan

perilaku apa yang dapat ditampilkan, dilihat dan dirasakan selesai mengikuti pelatihan?

d) *Responsive Evaluation Model*

Model Evaluasi Responsif dikembangkan pada tahun 1975 oleh Robert Stake. Menurut Stake, evaluasi disebut *responsive* jika memenuhi tiga kriteria: (a) lebih berorientasi secara langsung kepada aktifitas program daripada tujuan program, (b) merespon kepada persyaratan kebutuhan informasi dari audiens, (c) perspektif nilai-nilai yang berbeda dari orang-orang dilayani dilaporkan dalam kesuksesan dan kegagalan dari program.<sup>15</sup>

Evaluasi model ini dikembangkan sejalan dengan perkembangan manajemen personel, perubahan perilaku (*behavior change*). Evaluasi ini sesuai untuk program-program sosial, seni, humaniora, dan masalah-masalah yang perlu penanganan dengan aspek humaniora. Evaluasi berfokus pada reaksi berbagai pihak atas program yang diimplementasikan, dan mengamati dampak akibat dari hasil pelaksanaan program.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 90.

Model evaluasi ini mengalami keterbatasan sumber dan waktu, sehingga evaluator cukup menentukan beberapa responden yang dominan (pemangku kepentingan) untuk mewakili responden lainnya sebagai sumber informasi bagi pelaksanaan evaluasi.

e) *CSE-UCLA Evaluation Model*

Model evaluasi model *CSE-UCLA* (Center for the study of evaluation, University of California at Los Angeles) dikembangkan oleh Fernandes pada tahun 1984. Evaluasi model ini hampir sama dengan model CIPP, yakni termasuk kategori evaluasi yang komprehensif. Ciri dari model *CSE-UCLA* adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak.<sup>16</sup>

Tahap pertama, evaluasi dimulai dengan *Need Assesment*, dimana evaluasi mengidentifikasi ada tidaknya perbedaan antara status program atau kondisi kenyataan (*what is*) dengan yang diharapkan (*what should be*). Apa problem yang dihadapi? *Gap* apa yang ada dalam lembaga?

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 44.

Tahap kedua, perencanaan dan pengembangan (*Program Planning and Development*), melihat apakah program yang direncanakan sesuai untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan? Keputusan yang akan diambil adalah pemilihan strategi untuk mencapai tujuan program.

Tahap ketiga, pelaksanaan, evaluasi terfokus pada implementasi program. Evaluasi akan menjawab pertanyaan. 1) apakah program berjalan sesuai dengan rencana?; 2) Bagaimana penampilan para guru dan siswa?; 3) Bagaimana kesan dan sikap orang tua dan masyarakat?; 4) Bagaimana proses belajar mengajar?; dan 5) Jenis rekomendasi antara lain: apa yang perlu diubah, diperbaiki, dibenahi agar pada tahap akhir program mencapai keberhasilan?

Tahap keempat, hasil, evaluasi dilakukan terhadap hasil yang dicapai. Sejauh mana program telah dapat mencapai tujuan yang direncanakan? Apakah hasil yang dicapai sebagai akibat dari perlakuan yang diberikan?

Tahap kelima, dampak, evaluasi difokuskan pada penilaian terhadap kemanfaatan program. Pertanyaan berkisar pada bagaimana keberadaan program? Bagaimana manfaat program terhadap personal dan lembaga? Jenis rekomendasi pada tahap ini adalah program perlu

dikembangkan, diperpanjang, dimodifikasi, dikurangi atau bahkan dihentikan.

Model evaluasi ini menekankan kepada evaluator untuk dapat menentukan masalah, mengumpulkan data dan tidak lepas dari tujuan yang dirumuskan, memperlihatkan keterlaksanaan program, kemudian mengetahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program tersebut sudah tercapai dan jika belum apa penyebabnya.

f) *CIPP Evaluation Model*

Model CIPP dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk pada tahun 1967 di Ohio State University. Evaluasi terbagi dalam empat macam: (a) *context evaluation*, konteks ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program. (b) *input evaluation*, evaluasi ini membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada. (c) *process evaluation*, evaluasi ini untuk membantu mengimplementasikan keputusan. (d) *product evaluation*, evaluasi ini menolong keputusan selanjutnya terhadap hasil.<sup>17</sup> Model evaluasi ini memandang program yang akan dievaluasi sebagai

---

<sup>17</sup> Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 9.

sebuah sistem dan harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponen yang ada. Stufflebeam mengemukakan bahwa hasil evaluasi akan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan.<sup>18</sup>

g) *Discrepancy Model*

Evaluasi model ini dikembangkan oleh Malcolm M. Provus pada tahun 1971. Provus percaya bahwa evaluasi merupakan seni (*arts*) melukiskan ketimpangan antara standar kinerja dengan kinerja yang terjadi.<sup>19</sup> Model penelitian kesenjangan (*discrepancy model*) menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Model evaluasi provus bertujuan untuk menganalisis suatu program sehingga dapat ditentukan apakah suatu program layak ditentukan, ditingkatkan atau sebaliknya dihentikan

*Discrepancy Model* ini berangkat dari asumsi bahwa untuk melaksanakan kelayakan suatu program, evaluator dapat membandingkan antara apa yang seharusnya dan diharapkan terjadi (*standard*) dengan apa yang sebenarnya terjadi (*performance*) sehingga dapat diketahui ada

---

<sup>18</sup> Daniel L. Stufflebeam, George F. Madaus, dan Thomas Kellaghan, *Evaluation Models Viewpoints on Educational and Human Service Evaluation* (New York:Kluwer Academic Publishers,2000), h. 285

<sup>19</sup> Wirawan, *op. cit.*, h. 106.

tidaknya kesenjangan (*discrepancy*). Standard adalah kriteria yang telah dikembangkan dan ditetapkan dengan hasil yang efektif. Sedangkan *performance* adalah sumber, prosedur, manajemen, dan hasil nyata yang tampak ketika program dilaksanakan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam evaluasi model discrepancy ini adalah sebagai berikut : <sup>20</sup>

1) Program *Definition*

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah merumuskan tujuan program, merumuskan standar dalam bentuk rumusan yang menunjuk pada sesuatu yang dapat diukur, pengalokasian sumber daya, dan partisipan untuk melakukan aktifitas. Standar dan harapan yang ingin dicapai ditentukan oleh masing-masing komponen dari program.

2) Program *Instalation*

Tahap penetapan kelengkapan program yaitu melihat apakah kelengkapan yang tersedia sudah sesuai dengan yang diperlakukan atau belum, dapat dilakukan dengan cara meninjau kembali penetapan standar, meninjau program yang sedang berjalan, meneliti kesenjangan antara yang direncanakan dengan yang sudah dicapai. Dalam tahap ini evaluator menyiapkan dan mengembangkan seperangkat tes untuk

---

<sup>20</sup> Sandra Mathison, *Encyclopedia of Evaluation* (California: Sage Publicationa, 2005), h. 90

mengidentifikasi tiap kesenjangan antara instalasi program atau aktifitas yang diharapkan.

### 3) Program *Process*

Mengadakan evaluasi tujuan, tujuan manakah yang sudah dicapai. Jadi evaluasi yang dilakukan fokus pada upaya bagaimana memperoleh data tentang kemajuan peserta program untuk menentukan apakah perilaku berubah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

### 4) Program *Product*

Pada tahap *product*, ditentukan apakah tujuan akhir program tercapai atau tidak. Dilakukan dengan cara mengadakan analisis data dan menetapkan tingkat output yang diperoleh. Jadi evaluator tidak hanya mengevaluasi hasil kinerja program tetapi juga mengadakan studi lanjut sebagai bagian dari evaluasi.

### 5) Program *Comparison*

Membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluator menuliskan semua penemuan kesenjangan untuk disajikan kepada para pengambil keputusan, agar dapat memutuskan kelanjutan dari program. Setelah pelaksanaan evaluasi, apabila ditemukan kesenjangan maka harus ada pemecahan antara evaluator dan pengelola program.

Keunggulan model *discrepancy* adalah mampu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan program untuk tindakan korektif sehingga bisa memperbaikinya. Sedangkan kelemahannya kurang sistematis, hanya menekankan pada obyek sasaran dan memberi penekanan pada kesenjangan.

#### h) Model *Countenance Stake*

Menurut Fernandes, yang dikutip oleh Arikunto model Stake menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok yaitu: (a) deskripsi (*description*); dan b) pertimbangan (*judgement*) serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program yaitu: (1) masukan (*antecedents/context*), (2) proses (*transactions/process*), dan (3) hasil (*output-outcomes*). Tiga tahap dalam evaluasi tersebut menunjukkan objek atau sasaran evaluasi. Dalam sasaran pemantauan dilihat seberapa jauh pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana program dan seberapa jauh pelaksanaan program telah menunjukkan tanda-tanda tercapainya tujuan program.<sup>21</sup>

Model evaluasi yang satu dengan yang lainnya memang bervariasi, namun maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan

---

<sup>21</sup> Arikunto dan Abdul Jabar, *op. cit.*, h. 2.

pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi. Selanjutnya informasi yang terkumpul dapat diberikan kepada pengambil keputusan agar dapat dengan tepat menentukan tindak lanjut tentang program yang sudah dievaluasi.

## **B. Konsep Program yang dievaluasi**

### **1. Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional di LPMP Jawa Barat**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah-sekolah di Indonesia melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sesuai dengan Permendiknas No. 63 tahun 2009.

Sebagai komponen penting dalam SPMP, Evaluasi Diri Sekolah (EDS) merupakan dasar peningkatan mutu dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sekolah. Untuk menindaklanjuti hasil EDS tersebut maka LPMP Jawa Barat melaksanakan Program Akselerasi Mutu Sekolah (PAMS). Program ini mengkombinasikan antara EDS dan implementasi *Lesson Study* dengan bantuan teknis dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Setelah berhasil mendampingi sekolah-sekolah sasaran selama periode 3

tahun dalam kegiatan PAMS (2011-2013), LPMP Jawa Barat melanjutkan program pendampingan kembali dengan nama PAMS Berwawasan Internasional atau disingkat PAMS-BWI (2014-2016). Kegiatan ini juga menekankan pada penguatan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah sasaran PAMS-BWI .

Secara umum program peningkatan mutu pendidikan ini bertujuan untuk melaksanakan fasilitasi proses penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan dengan tetap mengacu pada delapan standar nasional pendidikan. Tujuan PAMS-BWI yang dilaksanakan oleh LPMP Jawa Barat adalah pendampingan yang bertujuan untuk melaksanakan fasilitasi proses penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan dengan tetap mengacu pada delapan standar nasional pendidikan.

Program PAMS-BWI ditujukan untuk membantu sekolah yang telah mengikuti Pilot Project PAMS Tahun 2013 dan dinyatakan sebagai Rintisan Sekolah Standar Nasional (SSN) agar mampu mencapai kesetaraan standar internasional. Untuk itu sebelum PAMS-BWI diterapkan LPMP Jawa Barat telah terlebih dahulu menyelenggarakan *short course* dalam rangka menambah wawasan mengenai pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional.

Pengertian Sekolah berwawasan internasional yang dimaksud disini adalah bukan berarti sekolah sasaran program harus menggunakan pengantar berbahasa Inggris seperti halnya sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dulu, melainkan siswa dikondisikan sikap dan mentalnya selama di lingkungan sekolah untuk lebih mampu berkomunikasi berbahasa Inggris sesuai kebutuhan dan dapat bersaing pada taraf internasional.

Salah satu upaya mewujudkan sekolah berwawasan internasional adalah dengan melaksanakan program *Rintisan Sister School* yang telah dimulai pada tahun ke-2 PAMS-BWI (Tahun 2015). Maksud dari kegiatan *Rintisan Sister School* ini adalah memberikan pengalaman bagi guru-guru sesama sekolah sasaran PAMS-BWI agar dapat berbagi *Best Practices* dalam proses pembelajaran di kelas yang dipadukan dengan penerapan *Lesson Study* sesuai dengan tujuan program.

Sekolah PAMS-BWI (Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional) merupakan sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (8 SNP sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013) dan diperkaya dengan indikator-indikator tambahan lain, dengan mengadaptasi beberapa karakteristik sekolah/madrasah bertaraf internasional yang sebelumnya telah dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional

Tahun 2007. Secara khusus sekolah yang sudah menerapkan program tersebut adalah sekolah-sekolah yang sudah masuk dalam katagori sekolah standar nasional (SSN). Adapun yang menjadi sasaran program kegiatan PAMS-BWI ini adalah sekolah sasaran PAMS sebelumnya yang telah terverifikasi rintisan SSN atau telah memperoleh status SSN (memenuhi SI, Standar Proses, SKL, Standar Pendidik dan Kepala Sekolah, & Standar Penilaian). Sekolah-sekolah yang menjadi sasaran PAMS-BWI tersebut adalah :

Tabel 2.1. Nama sekolah-sekolah sasaran PAMS-BWI

No.	Sekolah Sasaran PAMS-BWI	Wilayah
1.	SMPN 1 Cipanas	Kab. Cianjur
2.	SMPN 2 Cipanas	Kab. Cianjur
3.	SMPN 1 Cugenang	Kab. Cianjur
4.	SMP Al Azhar	Kab. Cianjur
5.	SMPN 3 Cianjur	Kab. Cianjur
6.	SMPN 3 Cugenang	Kab. Cianjur
7.	SMPN 1 Banjar	Kota Banjar
8.	SMPN 2 Banjar	Kota Banjar

Upaya untuk mencapai keberhasilan program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan internasional ini, selain berusaha meningkatkan capaian SNP, juga dapat memenuhi standar lain yaitu IKKM dan IKKT. IKKM adalah Indikator Kinerja Kunci Minimal yang harus dikembangkan oleh sekolah-sekolah tersebut di atas sebagai karakter sekolah berwawasan internasional. Sedangkan IKKT adalah Indikator Kinerja Kunci Tambahan merupakan pengembangan dari Standar Nasional Pendidikan yang diakomodir oleh pihak sekolah, misalnya dalam Standar Proses: (1) Silabus dan RPP dapat mengakomodir pembelajaran *High Order Thinking Skill* (HOTS); (2) pembelajaran harus berbasis informasi dan teknologi (IT); (3) Pembelajaran memungkinkan dilakukan melalui fasilitas internet (*e-learning*) dalam mengakses materi pembelajaran, memberi atau mengirim tugas dan atau melakukan pembelajaran secara *on line chatting*; (4) sekolah memiliki website; dan (5) mengembangkan *lesson study* sebagai bagian peningkatan mutu proses pembelajaran. *Lesson study* yang dikembangkan adalah berbasis saintifik.

Berikut ini adalah acuan atau standar yang menjadi indikator keberhasilan Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan internasional tahap ke 2 (periode 2014-2016) :

Tabel 2.2 Indikator keberhasilan program PAMS-BWI

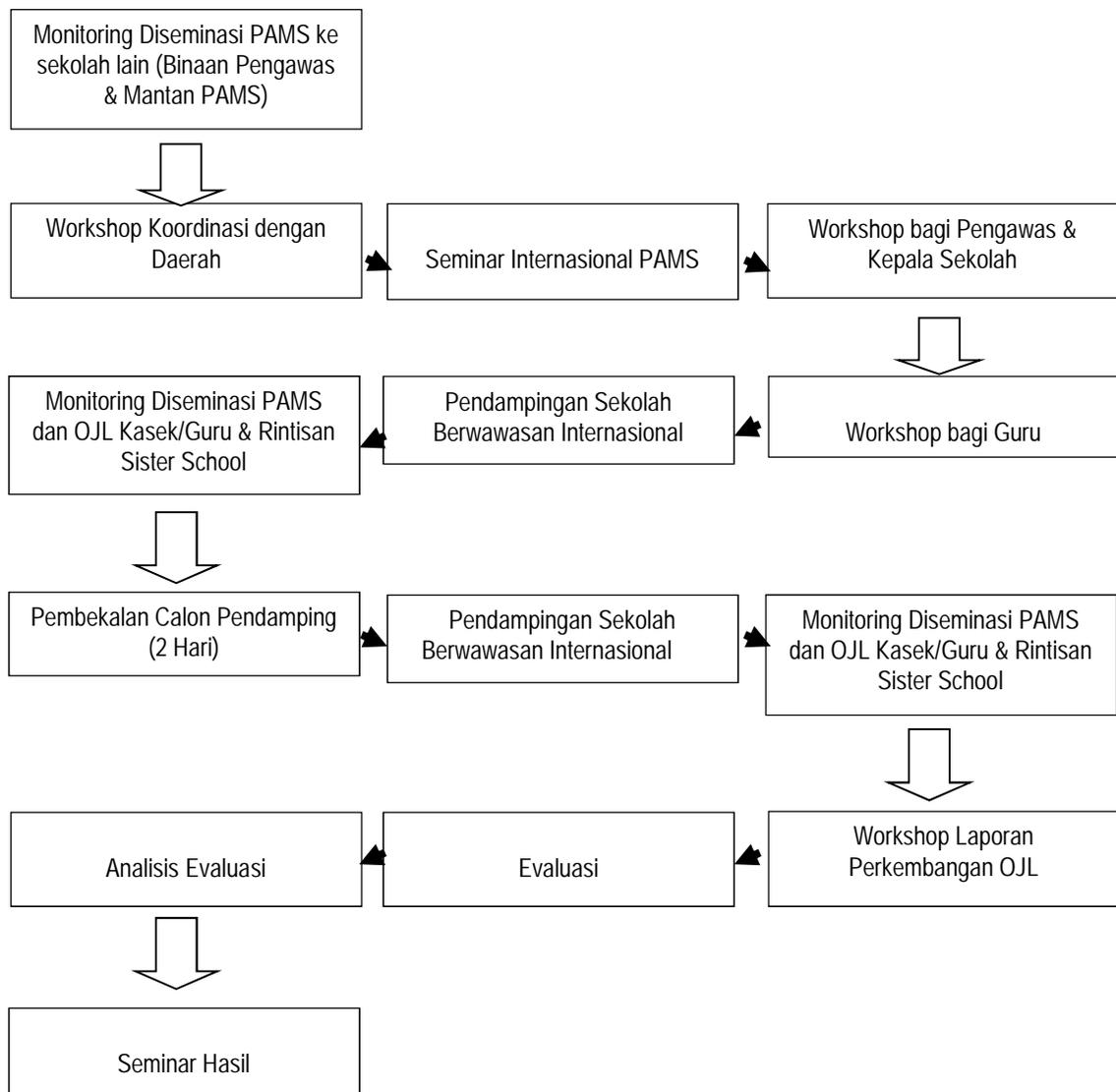
TAHUN	ASPEK
Tahun 1	a.Terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan di tiap sekolah sasaran dengan minimal 90 % dari sejumlah indikator tiap standar
2014	b. Tercapainya minimal satu indikator kinerja kunci tambahan (IKKT)
Tahun 2	a.Tercapainya minimal 30 % indikator kinerja kunci tambahan (IKKT)
2015	b.Meningkatnya capaian siswa dalam mengerjakan soal-soal berbasis TIMSS/NAPLAN/Olimpiade dengan nilai rata-rata minimal 60
Tahun 3	a.Tercapainya minimal 60% indikator kinerja kunci tambahan (IKKT)
2016	b.Meningkatnya capaian siswa dalam mengerjakan soal-soal berbasis TIMSS/NAPLAN/Olimpiade dengan nilai rata-rata minimal 70

Dengan demikian pada prinsipnya sekolah PAMS-BWI ini harus bisa memberikan jaminan mutu pendidikan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang ada di ke-8 sekolah tersebut.

Pendampingan program akselerasi mutu sekolah (PAMS) tahap pertama dimulai dengan kegiatan pendampingan bagi guru dan kepala sekolah atau *Center of Cluster* (COC) yang berisi pelatihan pembuatan RPP, pembahasan materi sosialisasi kurikulum 2013 dan pengisian instrumen rencana tindak lanjut sesuai kebutuhan program pendampingan. Selain itu

pada kegiatan tersebut mulai diperkenalkan *Open lesson* atau *Lesson study* yang merupakan salah satu model pembinaan yang menitikberatkan kepada kegiatan refleksi dan observasi guru saat mengajar di dalam kelas.

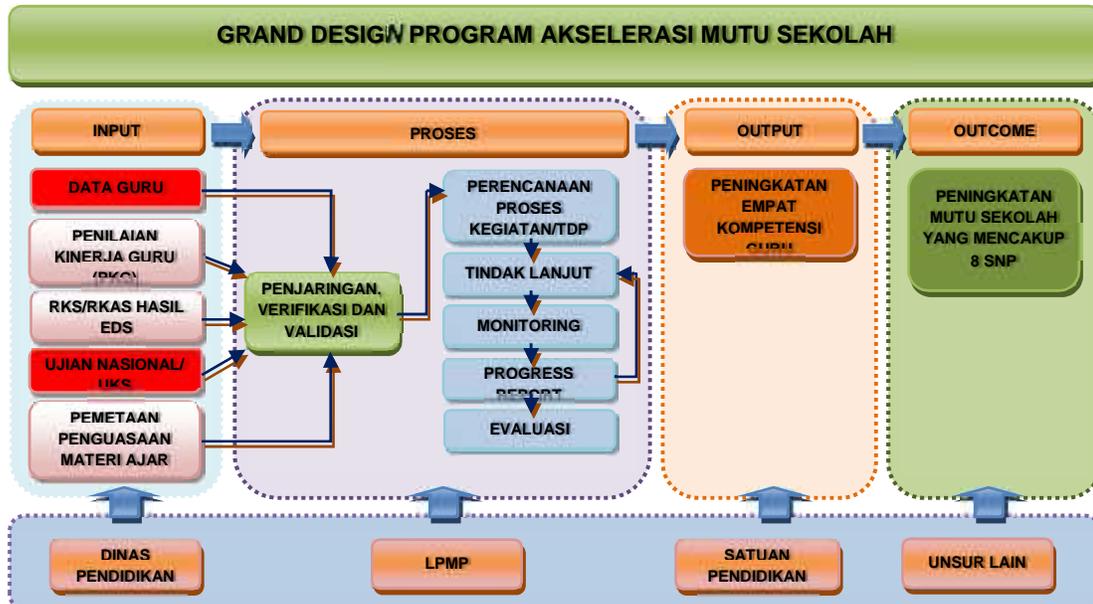
Workshop Rencana Tindak Lanjut Implementasi Program Akselerasi Mutu Sekolah (PAMS) BWI bagi Kepala Sekolah dan Pengawas dilakukan untuk menyepakati komitmen kepala sekolah dan manajemen sekolah agar mampu mewujudkan sekolah yang bermutu dan berwawasan internasional. Sebelum PAMS-BWI diluncurkan, kegiatan PAMS tahap pertama (2011-2013) memilih *Pilot Project* 15 sekolah jenjang SMP dengan status RSBI, SSN dan RSSN. LPMP Jawa Barat merekomendasikan Kabupaten Cianjur dan Kota Banjar sebagai sasaran kegiatan PAMS, dengan usulan nama-nama sekolah adalah sebagai berikut : 1) SMPN 1 Cianjur 2) SMPN 3 Cianjur 3) SMP Pasundan Cianjur 4) SMP Al Azhar 20 5) SMPN 1 Cipanas 6) SMPN 2 Cipanas 7) SMPS Mardiyuana, Cipanas 8) SMPN 1 Cugenang 9) SMPN 2 Cugenang 10) SMPN 3 Cugenang 11) SMPN 1 Banjar 12) SMPN 2 Banjar 13) SMPN 3 Banjar 14) SMPN 4 Banjar dan 15) SMPN 7 Banjar



Gambar 2.1 Mekanisme proses pendampingan PAMS

Kegiatan PAMS tahap pertama menindaklanjuti indikator-indikator yang dianggap belum sesuai dengan status sekolahnya. Indikator

keberhasilan dari PAMS adalah minimal 60% dari sejumlah indikator yang belum sesuai dengan status sekolahnya, dapat mencapai tahapan pengembangan yang diharapkan. Adapun tujuan khusus diadakannya PAMS tahap pertama ini adalah : (a) Melakukan pendampingan proses penjaminan dan peningkatan mutu di satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah untuk mencapai indikator-indikator kinerja dalam SNP; (b) Membantu sekolah dalam mencapai level statusnya, dari RSBI ke SBI, dari SSN ke RSBI dan dari RSSN ke SSN; dan (c) Menindaklanjuti hasil evaluasi diri sekolah sebagai bahan dasar penyusunan peta mutu Kabupaten dan perencanaan program investasi pendidikan.



Gambar 2.4 Grand Design Program Akselerasi Mutu Sekolah

Hasil yang diharapkan dari PAMS tahap pertama adalah sebagai berikut :

1. Minimal 60% indikator yang belum sesuai pada sekolah dengan status RSBI mampu mencapai tahapan pengembangan 4.
2. Minimal 60% indikator yang belum sesuai pada sekolah dengan status SSN mampu mencapai tahapan pengembangan 3 dengan terdapat kinerja-kinerja tambahan lain di luar SNP.
3. Minimal 60% indikator yang belum sesuai pada sekolah dengan status RSSN mampu mencapai tahapan pengembangan 3.
4. Peta mutu sekolah jenjang SMP di kabupaten sasaran PAMS.

Adapun mekanisme program PAMS tahap awal (2011-2013) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Mekanisme program tahap pertama PAMS

<b>Tahapan Kegiatan</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tempat</b>	<b>Hasil yang diharapkan</b>
Sosialisasi Program ke Sekolah Sasaran	✓ Mensosialisasikan Program kepada sekolah sasaran	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemahaman program oleh sekolah sasaran</li> <li>✓ MoU dengan Sekolah</li> <li>✓ MoU dengan Dinas Pendidikan Kab. Cianjur</li> </ul>

Tahapan Kegiatan	Uraian	Tempat	Hasil yang diharapkan
Visitasi dan Uji Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verifikasi dan validasi hasil EDS dan pemetaan data awal kompetensi kepala sekolah, guru dan siswa sebagai data pendukung evaluasi diri sekolah</li> </ul>	10 Sekolah sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Validasi hasil EDS</li> <li>✓ Hasil Uji Kompetensi Kepala Sekolah</li> <li>✓ Hasil Uji Kompetensi Guru</li> <li>✓ Hasil analisis kajian profil ketercapaian 8 SNP dari sekolah</li> </ul>
Workshop School Leadership	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penguatan kompetensi kepala sekolah dan wakasek terkait dengan standar pengelolaan, manajerial, pembiayaan dan sarana prasarana</li> <li>✓ Penguatan kompetensi guru</li> <li>✓ <i>Benchmarking</i> ke sekolah binaan</li> <li>✓ Tugas pengembangan dan <i>action plan</i></li> </ul>	Satu Sekolah Binaan LPMP yang dikunjungi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan Kompetensi para manajer sekolah</li> <li>✓ Action plan TPS berbasis EDS</li> <li>✓ RKS berbasis EDS</li> </ul>
Workshop <i>Lesson Study</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penguatan kompetensi guru terkait dengan standar isi, proses,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kunjungan ke LPTK</li> <li>✓ LPMP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan 4 Kompetensi para guru</li> <li>✓ Action plan TPS</li> </ul>

Tahapan Kegiatan	Uraian	Tempat	Hasil yang diharapkan
	kompetensi lulusan dan penilaian dengan supervisi dari UPI Bandung mengenai <i>Lesson Study</i> ✓ Benchmarking ke sekolah pelaksana <i>Lesson Study</i> ✓ Tugas pengembangan dan <i>action plan</i>		berbasis EDS ✓ RKS berbasis EDS
Progress Report (4 kali dalam setahun)	✓ <i>Progress report</i> yang dilaksanakan oleh para manajer sekolah sesuai dengan RKS dan <i>action plan</i> tindak lanjut EDS ✓ Setiap <i>Progress Report</i> difokuskan pada satu standar	LPMP	✓ Laporan pelaksanaan tindak lanjut EDS ✓ Peningkatan kompetensi para manajer sekolah
Pendampingan Peningkatan Kompetensi Guru	✓ Pendampingan langsung pada guru sesuai dengan fokus dan kebutuhan sekolah ✓ Pendamping adalah	Sekolah Sasaran	✓ Pendampingan berbasis lesson study ✓ Peningkatan 4 kompetensi guru dan mutu pembelajaran

Tahapan Kegiatan	Uraian	Tempat	Hasil yang diharapkan
(4 kali dalam setahun)	kolaborasi pengawas mata pelajaran, guru inti dan LPMP di bawah supervisi ✓ UPI Bandung		✓ RKS berbasis EDS
Visitasi Akhir	✓ Evaluasi ketercapaian kinerja sekolah berdasarkan 8 SNP merujuk pada instrumen EDS ✓ UK Kepala sekolah ✓ UK guru ✓ UK siswa ✓ Penyusunan MSPD untuk pengawas	10 Sekolah sasaran	✓ Validasi hasil EDS ✓ Hasil Uji Kompetensi Kepala Sekolah ✓ Hasil Uji Kompetensi Guru ✓ Hasil analisis kajian profil ketercapaian 8 SNP dari masing-masing sekolah sasaran
Seminar Hasil dan Penyusunan Action Plan	✓ Ekspose dan diseminasi ✓ Penyusunan <i>action plan</i>	LPMP	✓ Tersosialisasikan-nya hasil program ✓ Action plan tindak lanjut pada tahun berikutnya

## 2. Akselerasi Mutu Sekolah dan Lesson Study

Lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. Demikian halnya dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat melalui kegiatan pendampingan sebagai bagian dari Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional (PAMS-BWI) telah merancang dan menerapkan pola *lesson study* pada sistem pembelajaran di sekolah menengah pertama (SMP) yang menjadi sekolah sasaran (*pilot project*).

Salah satu poin penting dari undang-undang tersebut adalah guru sebagai jabatan profesi. Guru profesional harus memiliki kompetensi akademik dan kompetensi profesional sebagai suatu keutuhan, kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang dirumuskan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 harus dilihat sebagai sebuah kebutuhan yang tak terpisahkan dari kompetensi penguasaan bahan ajar yang terkandung di dalam kurikulum.

*Lesson Study* dapat memberi solusi, karena *lesson study* adalah model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkesinambungan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas

dan *mutual learning* untuk membangun komunitas belajar.<sup>22</sup> Para pendidik secara kolaboratif, pertama-tama menganalisis masalah pembelajaran, baik dari aspek materi ajar maupun metode pembelajaran. Selanjutnya secara kolaboratif pula para pendidik mencari solusi dan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Langkah berikutnya adalah menerapkan pembelajaran di kelas oleh seorang guru, sementara yang lain sebagai pengamat aktivitas siswa yang dilanjutkan dengan diskusi pasca pembelajaran untuk merefleksikannya. Jika prinsip-prinsip *lesson study* ini dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan berdampak pada akselerasi mutu pendidikan di Indonesia.<sup>23</sup>

*Lesson Study* telah berkembang sejak abad 18 di negara Jepang. Dalam Bahasa Jepang, *Lesson Study* dikenal dengan "*jugyokenkyu*" yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu "*jugyo*" yang berarti *lesson* atau pembelajaran, dan "*kenkyu*" yang berarti *study* atau kajian.<sup>24</sup> Dengan demikian *Lesson Study* merupakan proses pengkajian terhadap pembelajaran.

Konsep *Lesson Study* semakin berkembang pada tahun 1995 berkat kegiatan *The Third International Mathematics and Science Study* (TIMSS) yang

---

<sup>22</sup> Sumar Hendayana, dkk., *Lesson Study, Pengalaman IMSTEP-JICA* (Bandung: UPI Press, 2006), h. 10.

<sup>23</sup> Anthony, S and Murray, T. *Accelerating School Quality Through School Peer Reviews*. (New Delhi: Brooking Institution India, 2012), h.11

<sup>24</sup> Sumar Hendayana, dkk., *op. cit.* h. 20.

diikuti oleh empat puluh satu negara dan ternyata dua puluh satu negara di antaranya memperoleh skor rata-rata matematika yang secara signifikan lebih tinggi dari skor rata-rata matematika di Amerika Serikat.<sup>25</sup> Posisi tersebut membuat Amerika Serikat melakukan studi banding pembelajaran matematika di Jepang dan Jerman. Dari studi banding tersebut Tim Amerika Serikat menyadari bahwa Amerika Serikat belum memiliki sistem untuk melakukan peningkatan mutu pembelajaran, sedangkan Jepang dan Jerman melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Oleh karena itu, para ahli pendidikan Amerika Serikat mengadopsi *Lesson Study* dari Jepang dan kemudian mengembangkannya di negara-negara lain.

Di Indonesia, *Lesson Study* tidak begitu saja mengadopsi konsep *Lesson Study* yang berkembang dari Jepang akan tetapi melalui pengkajian dan uji coba di sekolah-sekolah piloting di Bandung, Jogjakarta dan Malang (2 SMP dan 2 SMA) sejak tahun 2001, melalui program *Indonesia Mathematics and Science Teacher Education Project* (IMSTEP) yang diimplementasikan sejak sejak Oktober tahun 1998 di tiga IKIP, yaitu (1) IKIP Bandung (sekarang bernama Universitas Pendidikan Indonesia, UPI), (2) IKIP Yogyakarta (sekarang bernama Universitas Negeri Yogyakarta, UNY), dan (3) IKIP Malang (sekarang menjadi Universitas Negeri Malang) yang telah bekerja sama dengan JICA (*Japan International Cooperation Agency*). Perkembangan selanjutnya, *Lesson Study*

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 22.

tidak hanya dilaksanakan pada mata pelajaran MIPA, tetapi juga mata pelajaran lainnya.

Sementara itu interaksi yang berkembang dalam suatu kegiatan seperti diskusi, ternyata dapat secara konstruktif menunjang proses berkembangnya pengetahuan pada diri seorang. *Lesson Study* sebagai suatu kegiatan yang diawali dengan pengembangan perencanaan secara bersama, proses pembelajaran terbuka dengan melibatkan sejumlah observer, dan refleksi atau diskusi pasca pembelajaran, merupakan suatu kegiatan yang sangat potensial untuk menciptakan proses interaksi antar berbagai pihak guru, kepala sekolah, dosen, pihak dinas pendidikan, dan lainnya. Maka sangat dimungkinkan terjadi *sharing* pengetahuan. Dengan berkembangnya pengetahuan secara konstruktif, maka selain masing-masing pihak yang terkait memperoleh input dan umpan balik, sebagai tindak lanjutnya tidak mustahil memunculkan berbagai inovasi pembelajaran.<sup>26</sup>

Persiapan *Lesson Study* melibatkan banyak pihak terkait, misalnya kelompok guru maka rencana pembelajaran yang disusun bersama diharapkan kualitasnya lebih baik jika dibandingkan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara individual. Keterlibatan berbagai unsur dalam pengembangan sebuah

---

<sup>26</sup> Anthony S. *op. cit.*, p.13

rencana pembelajaran, memungkinkan terjadinya *sharing* pendapat dan pengalaman.<sup>27</sup>

Berkembangnya pengetahuan guru tentang materi ajar dan pembelajaran dapat terjadi saat implementasi pembelajaran yakni melalui kegiatan observasi. Latar belakang pengetahuan observer yang beragam menyebabkan bervariasi hasil pengamatan yang diperoleh. Beragam temuan masing-masing observer menjadi sangat menarik pada saat dilakukan pasca pembelajaran. Temuan hasil observasi yang beragam tersebut terjadinya pertukaran pengetahuan secara lebih produktif sehingga masing-masing pihak pada akhirnya akan mampu memperoleh pengetahuan tentang pembelajaran yang terjadi secara komprehensif.

*Lesson Study* bukan sebuah proyek sesaat, tetapi merupakan kegiatan terus menerus yang tiada henti dan merupakan sebuah upaya untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam *Total Quality Management*, yakni memperbaiki proses dan hasil pembelajaran siswa secara terus-menerus, berdasarkan data. *Lesson Study* merupakan kegiatan yang dapat mendorong terbentuknya sebuah komunitas belajar (*learning society*) yang secara konsisten

---

<sup>27</sup> Ellen Moir. *Accelerating Teacher Effectiveness: Lessons Learned from Two Decades of New Teacher Induction*. (Phi Delta Kappan, 2009)

dan sistematis melakukan perbaikan diri, baik pada tataran individual maupun manajerial.<sup>28</sup>

*Lesson Study* sangat efektif bagi guru karena telah memberikan keuntungan dan kesempatan kepada para guru untuk dapat: (1) memikirkan secara lebih teliti lagi tentang tujuan, materi tertentu yang akan dibelajarkan kepada siswa, (2) memikirkan secara mendalam tentang tujuan-tujuan pembelajaran untuk kepentingan masa depan siswa, misalnya tentang arti penting sebuah persahabatan, pengembangan perspektif dan cara berfikir siswa, serta kegandrungan siswa terhadap ilmu pengetahuan, (3) mengkaji tentang hal-hal terbaik yang dapat digunakan dalam pembelajaran melalui belajar dari para guru lain (peserta atau partisipan *Lesson Study*), (4) belajar tentang isi atau materi pelajaran dari guru lain sehingga dapat menambah pengetahuan tentang apa yang harus diberikan kepada siswa, (5) mengembangkan keahlian dalam mengajar, baik pada saat merencanakan pembelajaran maupun selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran, (6) membangun kemampuan melalui pembelajaran kolegial, dalam arti para guru bisa saling belajar tentang apa-apa yang dirasakan masih kurang, baik tentang pengetahuan maupun keterampilannya dalam membelajarkan siswa, dan (7) mengembangkan *The Eyes to See Students*" (*kodomo wo miru me*), dalam arti

---

<sup>28</sup> Muhamad Fahmi, Maulana A, Yusuf A.N. *A Cost-Effectiveness-Analysis of Improving School Quality in Indonesia Center for Economics and Development Acceleration or Internationalization*. (Bandung: Center for Economics and Development Studies, Padjadjaran University, 2011)

dengan dihadirkannya para pengamat (observer), pengamatan tentang perilaku belajar siswa bisa semakin detail dan jelas.

Sementara itu, menurut *Lesson Study Project* (LSP) beberapa manfaat lain yang bisa diambil dari *Lesson Study*, diantaranya: (1) guru dapat mendokumentasikan kemajuan kerjanya, (2) guru dapat memperoleh umpan balik dari anggota/komunitas lainnya, dan (3) guru dapat mempublikasikan dan mendiseminasikan hasil akhir dari *Lesson Study*.<sup>29</sup> Dalam konteks pendidikan di Indonesia, manfaat yang ketiga ini dapat dijadikan sebagai salah satu karya tulis ilmiah guru, baik untuk kepentingan kenaikan pangkat maupun sertifikasi guru.

Terkait dengan penyelenggaraan *Lesson Study*, Hendayana dkk mengetengahkan tentang dua tipe penyelenggaraan *Lesson Study*<sup>30</sup>, yaitu *Lesson Study* berbasis sekolah dan *Lesson Study* berbasis MGMP. *Lesson Study* berbasis sekolah dilaksanakan oleh semua guru dari berbagai bidang studi dengan kepala sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan agar kualitas proses dan hasil pembelajaran dari semua mata pelajaran di sekolah yang bersangkutan dapat lebih ditingkatkan. Sedangkan *Lesson Study* berbasis MGMP merupakan pengkajian tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh kelompok guru mata pelajaran tertentu, dengan pendalaman kajian tentang proses pembelajaran pada mata

---

<sup>29</sup> *Lesson Study Research Group online*, p.3, 2003 ([http://www. tc. edu/lessonstudy/ what is lesson study. htmJ](http://www.tc.edu/lessonstudy/what_is_lesson_study.htm))

<sup>30</sup> Sumar Hendayana, *op.cit.* h. 47.

pelajaran tertentu, yang dapat dilaksanakan pada tingkat wilayah, kabupaten atau mungkin bisa lebih diperluas lagi.

Dalam hal keanggotaan kelompok, *Lesson Study Reseach Group* dari *Columbia University* menyarankan cukup 3-6 orang saja, yang terdiri unsur guru dan kepala sekolah, dan pihak lain yang berkepentingan. Kepala sekolah perlu dilibatkan terutama karena perannya sebagai *decision maker* di sekolah. Dengan keterlibatannya dalam *Lesson Study*, diharapkan kepala sekolah dapat mengambil keputusan yang penting dan tepat bagi peningkatan mutu pembelajaran di sekolahnya, khususnya pada mata pelajaran yang dikaji melalui *Lesson Study*.

Kegiatan *lesson study* ternyata memiliki dampak cukup luas bagi munculnya kegiatan-kegiatan lain yang inovatif. Dengan demikian, jika *lesson study* dilakukan benar-benar dipersiapkan dengan baik sehingga setiap orang yang mengikuti merasa memperoleh pengetahuan yang sangat berharga, maka baik disadari atau tidak, tindak lanjut dari kegiatan tersebut akan terjadi dengan sendirinya yang dapat berlangsung pada tataran individu, kelompok atau sistem tertentu.

Dari uraian di atas juga dapat disimpulkan bahwa *lesson study* pada dasarnya merupakan upaya inovatif guru-guru dalam mengatasi berbagai masalah pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan melalui *lesson study* di dalamnya terdapat aspek penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk itu, hasil-hasil terbaik dari kegiatan *lesson study* perlu disebar

luaskan dengan berbagai cara misalnya melalui seminar melalui tingkat kabupaten, provinsi, nasional, atau bahkan tingkat internasional. Selain itu hasil-hasil tersebut dapat juga dapat ditulis dalam bentuk karya ilmiah yang bisa dipublikasikan melalui jurnal. Untuk menjamin terjadinya proses *continous improvement* dikalangan para guru, maka penyediaan wahana berbentuk seminar berbagai tingkatan serta jurnal ilmiah yang dapat menampung hasil-hasil karya ilmiah para guru yang merupakan hal yang perlu diupayakan oleh pihak-pihak terkait. Hal tersebut perlu dilakukan demi menjamin keberlanjutan pelaksanaan *lesson study* proses pembelajaran, mengidentifikasi hal-hal penting yang terjadi dalam aktivitas belajar siswa dikelas, melakukan refleksi secara bersama-sama atas hasil observasi kelas, serta mengambil pelajaran berharga dari setiap proses yang dilakukan untuk kepentingan kualitas proses dan hasil pembelajaran lainnya.

#### **a). Persiapan Lesson Study**

Pada tahapan perencanaan, anggota komunitasnya selain guru-guru sebidang studi dari sekolah yang berbeda-beda, dimungkinkan pula datang dari pihak lain misalnya universitas. Sementara pada tahapan implementasi pembelajaran dan refleksi, anggota komunitasnya dimungkinkan untuk sangat beragam termasuk guru-guru dari bidang studi berbeda.

## **b). Pelaksanaan Pembelajaran dalam Lesson Study**

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, perlu dilakukan pertemuan singkat (*briefing*) yang dipimpin oleh kepala sekolah jika ini oleh sekolah. Pada pertemuan ini, setelah kepala sekolah menjelaskan secara umum kegiatan *lesson study* yang akan dilakukan, selanjutnya guru yang bertugas untuk melaksanakan pembelajaran hari itu diberi kesempatan mengemukakan rencana secara singkat. Informasi ini sangat penting bagi para *observer* terutama untuk merancang rencana observasi yang akan dilakukan di kelas. Selesai guru menyampaikan penjelasan, selanjutnya kepala sekolah mengingatkan kepada para observer untuk tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Observer dipersilahkan untuk memilih tempat strategi sesuai rencana pengamatannya masing-masing.<sup>31</sup>

Setelah secara *briefing* singkat dilakukan, selanjutnya guru yang bertugas sebagai pengajar melakukan proses pembelajaran sesuai dengan rencana. Walaupun pada saat pembelajaran hadir sejumlah observer, guru hendaknya dapat melaksanakan proses pembelajaran sealamiah mungkin. Berdasarkan pengalaman *lesson study* yang sudah dilakukan, proses pembelajaran dapat berjalan secara alamiah. Hal ini dapat terjadi karena

---

<sup>31</sup> Hendayana, *op. cit*, p. 43.

*observer* tidak melakukan intervensi apapun terhadap siswa. Mereka biasanya hanya melakukan pengamatan sesuai dengan fokus perhatian masing-masing.

Setelah setiap kelompok selesai dengan pekerjaannya masing-masing, beberapa kelompok yang memiliki strategi penyelesaian berbeda diberi kesempatan untuk menjelaskan hasilnya di depan kelas. Kegiatan ini merupakan bagian yang sangat penting dari proses pembelajaran karena hasil-hasil pemikiran siswa yang berbeda dapat disajikan kepada kelompok siswa lainnya sehingga setiap siswa memiliki pemahaman yang lebih baik dan lengkap karena telah terjadi *sharing* pengalaman. Pada kegiatan presentasi ini guru memiliki peran yang sangat penting terutama dalam memfasilitasi proses diskusi kelas dan memberikan penguatan atau koreksi terhadap materi yang disajikan siswa.

### **c). Strategi Observasi dalam Lesson Study**

Agar proses observasi dalam pembelajaran dari suatu *lesson study* dapat berjalan dengan baik, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan baik oleh guru maupun *observer* sebelum proses pembelajaran dimulai. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, guru dapat memberikan gambaran secara umum apa yang akan terjadi di kelas yakni meliputi informasi tentang rencana pembelajaran, tujuan apa, bagaimana hubungan materi ajar hari itu dengan mata pelajaran secara umum, bagaimana kedudukan materi ajar dalam kurikulum yang berlaku dan kemungkinan respon siswa yang diperkirakan.

Selain apa yang disebutkan tentang hal di atas, observasi juga perlu diberikan informasi tentang lembar kerja siswa dan peta posisi tempat duduk yang menggambarkan *setting* kelas yang digunakan. Akan lebih baik jika peta posisi tempat duduk tersebut dilengkapi dengan nama- nama siswa secara lengkap.

Dengan memiliki gambaran yang lengkap tentang pembelajaran yang akan dilakukan, maka seorang *observer* dapat menetapkan apa yang akan dilakukan di kelas pada saat melakukan pengamatan. Sebagai contoh, seorang *observer* dapat memfokuskan perhatiannya pada siswa tertentu yang penting untuk diamati misalnya karena alasan tingkat kemampuannya dibandingkan siswa lain atau ada hal khusus yang penting untuk diamati. *Observer* lain mungkin tertarik dengan cara siswa berinteraksi dengan temannya dalam kelompok, cara mengkomunikasikan ide baik dalam kelompok atau kelas, atau cara mengajukan argumentasi atas solusi dari masalah yang diberikan. Ada juga *observer* yang mungkin tertarik dengan respon siswa pada saat mengalami kesulitan dan memperoleh intervensi dari guru. Fokus observasi pada pelaksanaannya akan sangat beragam tergantung pada minat serta tujuannya masing- masing. Semakin beragam target yang menjadi fokus observasi, maka semakin lengkaplah informasi yang bisa digali, dianalisis dan diungkap pada saat dilakukan refleksi.

Pada saat melakukan observasi, disarankan untuk melakukan beberapa hal berikut: a) membuat catatan tentang komentar atau diskusi yang dilakukan siswa serta jangan lupa menuliskan nama atau posisi tempat duduk siswa, b) membuat catatan tentang situasi dimana siswa melakukan kerjasama atau memilih untuk tidak melakukan kerjasama, c) mencari contoh-contoh bagaimana terjadinya proses konstruksi pemahaman melalui diskusi dan aktivitas belajar yang dilakukan siswa, dan d) membuat catatan tentang variasi metode penyelesaian masalah dari siswa secara individual atau kelompok siswa, termasuk strategi penyelesaian yang salah.

Adapun pedoman tersebut berdasarkan pada sejumlah pertanyaan sebagai berikut: a) apakah tujuan pembelajaran sudah jelas? b) apakah aktivitas yang dikembangkan berkontribusi secara efektif pada pencapaian tujuan tersebut, c) Apakah langkah-langkah pembelajaran yang dikembangkan berkaitan satu dengan yang lainnya? d) apakah hal tersebut mendukung pemahaman siswa tentang konsep yang dipelajari? c) apakah *hands-on* atau *teaching material* yang digunakan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan? d) apakah diskusi kelas yang dilakukan membantu pemahaman mahasiswa tentang konsep yang dipelajari? e) apakah materi ajar yang dikembangkan dosen sesuai dengan tingkat kemampuan mahasiswa? f) apakah mahasiswa menggunakan pengetahuan

awal atau pengetahuan sebelumnya untuk memahami konsep baru yang dipelajari? g) apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dosen dapat mendorong dan memfasilitasi cara berfikir mahasiswa? h) apakah gagasan mahasiswa dihargai dan dikaitkan dengan materi yang sedang dipelajari? i) apakah kesimpulan akhir yang diajukan didasarkan pada pendapat siswa? j) apakah kesimpulan yang diajukan sesuai dengan tujuan pembelajaran? dan k) bagaimana guru memberi penguatan capaian hasil belajar mahasiswa selama pembelajaran berlangsung?.

#### **d). Aktivitas yang Dilakukan dalam Kegiatan Refleksi**

Kegiatan refleksi harus dilakukan segera setelah selesai pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar setiap kejadian yang diamati dan dijadikan bukti pada saat mengajukan pendapat atau saran dapat terjaga individual atau kelompok siswa, termasuk strategi penyelesaian yang salah.

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator dalam refleksi adalah: 1) memperkenalkan peserta refleksi sambil menyebutkan bidang keahliannya, 2) menyampaikan agenda yang akan dilakukan, 3) menjelaskan cara memberi komentar, mengajukan umpan balik. Hal ini meliputi; a) selama diskusi berlangsung hanya satu orang yang berbicara, b) setiap peserta memiliki kesempatan untuk berbicara, c) saat mengajukan pendapat, harus ada bukti

pengamatan (tidak berbicara berdasarkan opini). 4) dosen model diberi kesempatan berbicara paling awal; mengomentari proses pembelajaran yang telah dilakukannya, mengemukakan yang telah terjadi di kelas, kejadian yang sesuai harapan, apa yang berubah dari rencana semula, 5) dosen anggota *team teaching* diberi kesempatan memberi komentar, 6) memberi kesempatan kepada *observer* mengajukan pendapatnya, 7) setelah masukan *observer* dianggap cukup, fasilitator mempersilahkan dosen sebagai tim pengelola *lesson study* memberi tanggapan, merangkum, menyimpulkan hasil diskusi, 8) berterimakasih kepada seluruh partisipasi, dan mengumumkan kegiatan *lesson study* berikutnya.

#### **e). Tindak Lanjut Kegiatan Lesson Study**

Kegiatan *lesson study* pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang mampu mendorong terbentuknya sebuah komunitas belajar (*learning community*) yang secara konsisten melakukan *continuous improvement* baik pada level individu, kelompok, maupun pada sistem yang lebih umum.. Pengetahuan yang dibangun melalui *lesson study* dapat menjadi model sangat berharga untuk meningkatkan kualitas kinerja masing-masing pihak yang terlibat. Sebagai contoh; seorang guru yang terlibat dalam observasi sebuah *lesson study* berhasil menemukan sejumlah hal penting berkenaan dengan model

pembelajaran yang dikembangkan. Bahan ajar eksploratif yang digunakan ternyata telah mampu mendorong kreativitas siswa sehingga mereka mampu menampilkan sebuah strategi baru yang bersifat orisinal. Berdasarkan pengalaman ini seorang guru/dosen akan berusaha mencoba menerapkan pendekatan tersebut dalam pembelajaran.<sup>32</sup> Seorang Kepala Sekolah, telah mengikuti beberapa kali *lesson study* secara intensif, mengajukan pendapatnya bahwa kegiatan tersebut sangat potensial mendorong banyak pihak untuk melakukan hal yang terbaik. Siswa ternyata menunjukkan motivasi yang sangat tinggi untuk menunjukkan potensinya masing-masing pada saat *lesson study* dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut mampu menjadi dorongan untuk tumbuhnya motivasi berprestasi pada diri siswa. Guru-guru lain yang baru melihat aktifitas *lesson study* banyak yang mulai tertarik untuk mencobanya oleh para guru/dosen serta menjamin terjadinya proses peningkatan kualitas pembelajaran secara terus menerus.

Pemerintah selalu melakukan usaha peningkatan mutu guru melalui pelatihan dan tidak sedikit dana yang dialokasikan untuk pelatihan guru. Sayangnya usaha dari pemerintah ini kurang memberikan dampak yang

---

<sup>32</sup> Syamsuri dan Ibrahim, *op. cit.*, p. 149

signifikan terhadap peningkatan mutu guru. Ada dua hal yang menyebabkan pelatihan guru belum berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, pertama, pelatihan tidak berbasis pada permasalahan nyata di dalam kelas, kedua, pelatihan hanya menjadi pengetahuan saja, tidak diterapkan dalam pembelajaran di kelas.

Untuk mengatasi kelemahan pelatihan konvensional yang kurang menekankan pada pasca pelatihan, maka *lesson study* memberikan solusinya, karena merupakan model *in service training* yang lebih berfokus pada upaya pemberdayaan guru sesuai kapasitas serta permasalahan yang dihadapi masing-masing.<sup>33</sup>

Usaha pembinaan mutu guru tersebut perlu diberikan kepada usaha meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran dan memanfaatkan waktu belajar sehingga benar-benar efektif. *Lesson Study* bukanlah suatu strategi atau metode dalam pembelajaran, tetapi merupakan salah satu upaya pembinaan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekelompok guru secara kolaboratif dan berkesinambungan, dalam merencanakan, melaksanakan, mengobservasi dan melaporkan hasil pembelajaran.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 10.

*Lesson study* merupakan suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan *mutual learning* untuk membangun komunitas belajar. Dengan demikian *lesson study* bukan metode atau strategi pembelajaran tetapi kegiatan *lesson study* dapat menerapkan berbagai metode/strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi, kondisi dan permasalahan yang dihadapi guru. *Lesson study* dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu *plan* (merencanakan), *do* (melaksanakan), dan *see* (merefleksi) yang berkelanjutan. Dengan kata lain *lesson study* merupakan suatu cara peningkatan mutu pendidikan yang tak pernah berakhir (*continuous improvement*).<sup>34</sup>

Lebih lanjut Syamsuri dan Ibrohim seperti yang dikutip Hendayana mengatakan, ada beberapa manfaat studi pembelajaran (*lesson study*) yakni:

- a) meningkatkan keprofesionalan guru, sebab dengan studi pembelajaran guru melakukan pengkajian kurikulum, merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan metode pembelajaran yang sesuai dan menentukan media. Selain itu guru melakukan penelitian/ pengkajian terhadap proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran, serta menganalisis dan

---

<sup>34</sup> Moran, Renee Melinda. *Educator Acceleration Model : Teacher Perceptions of One Policy Implementation*. (Tennessee: Research and Creative Exchange, 2013)

melakukan refleksi; dan b) meningkatkan mutu pembelajaran di kelas karena guru mengembangkan studi pembelajaran berdasarkan sharing dan berkolaborasi dengan guru lain, melakukan penelitian dengan mengkaji pembelajaran, mendasarkan pada kelas nyata dan memfokuskan pada belajar siswa.

Selain itu kegiatan *lesson study* dapat mendatangkan banyak kegunaan yaitu meliputi meningkatnya pengetahuan guru tentang materi ajar dan pembelajarannya, meningkatnya pengetahuan guru tentang cara mengobservasi aktivitas belajar siswa, menguatnya hubungan kolegalitas baik antar guru maupun dengan observer selain guru, menguatnya hubungan antara pelaksanaan pembelajaran sehari-hari dengan tujuan pembelajaran jangka panjang.

### **3. Evaluasi Diri Sekolah (EDS)**

Acuan mutu yang digunakan untuk pencapaian atau pemenuhan mutu pendidikan pada satuan pendidikan adalah SNP dan standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat. SNP adalah standar yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan standar lain adalah standar yang dibuat oleh satuan pendidikan dan lembaga lain yang dijadikan acuan oleh satuan pendidikan. Standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat

digunakan setelah SNP dipenuhi oleh satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. SNP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundangan yang relevan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggaraan satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategi satuan atau program pendidikan. Satuan pendidikan merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Di berbagai Negara yang memiliki proses pendidikan yang baik meletakkan satuan pendidikan sebagai sentra penjaminan mutu. Satuan pendidikan adalah ujung tombak dari segala proses membelajarkan peserta didik. Merujuk pada PP no 19 tahun 2005 yang mengamanatkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai standar minimal pendidikan yang meliputi standar isi, SKL, proses, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan dan penilaian. Pemetaan ketercapaian 8 SNP yang diantaranya telah dilakukan

melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS) menjadi dasar satuan pendidikan melakukan kajian posisi kekurangan/ keberhasilannya. Hasil EDS memberikan gambaran performa satuan pendidikan pada posisi belum, telah atau melampaui Standard.

Di dalam panduan teknis Evaluasi Diri Sekolah, disebutkan bahwa Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah proses evaluasi yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah. Dijelaskan pula bahwa evaluasi diri sekolah adalah sebuah proses reflektif dalam evaluasi yang bersifat internal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah. Hal ini jelas dikatakan bahwa Evaluasi diri adalah langkah awal dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan melakukan evaluasi diri warga sekolah dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan sekolahnya, sehingga langkah-langkah perbaikan dan titik fokus pengembangan sekolah dapat dilakukan dengan tepat secara internal. Oleh karena itu, evaluasi diri dapat lebih efektif dalam pencapaian mutu pendidikan di sekolah. Kegiatan evaluasi diri sekolah dilakukan oleh internal sekolah dibawah bimbingan pengawas sekolah binaan masing-masing.

EDS adalah suatu proses dimana anggota staf di suatu sekolah mampu merefleksi praktek/kinerja mereka lalu mengidentifikasi area untuk tindakan perbaikan pada bidang murid dan belajar secara profesional.

Artinya semua warga sekolah mempunyai peran yang sama dalam memperbaiki kinerjanya sekolah untuk mendapatkan mutu yang lebih baik lagi. Sudrajat mengatakan bahwa EDS merupakan suatu upaya yang dilakukan kepada warga sekolah dan diberikan wewenang dalam memantau secara akademis dan profesional untuk dapat menyimpulkan kinerja sekolah. Evaluasi diri juga sekaligus menjadi umpan balik guna meningkatkan kinerja sekolah.

Evaluasi Diri Sekolah (EDS), sebagai komponen penting dalam SPMP, merupakan dasar peningkatan mutu dan penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Evaluasi Diri Sekolah juga menjadi sumber informasi kebijakan untuk penyusunan program pengembangan pendidikan kabupaten/kota. Oleh karena itu EDS menjadi bagian yang integral dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Dijelaskan juga dalam pedoman penjamin mutu pendidikan bahwa EDS adalah suatu proses yang memberikan tanggung jawab kepada sekolah untuk mengevaluasi kemajuan mereka sendiri dan mendorong sekolah untuk menetapkan prioritas peningkatan mutu sekolah.

Dapat disimpulkan bahwa EDS merupakan usaha yang dilakukan sekolah untuk memperbaiki kinerjanya dalam meningkatkan mutu pendidikan

di sekolah. Evaluasi Diri Sekolah merupakan komponen penentu yang sangat penting dalam membangun sistem informasi pendidikan nasional.

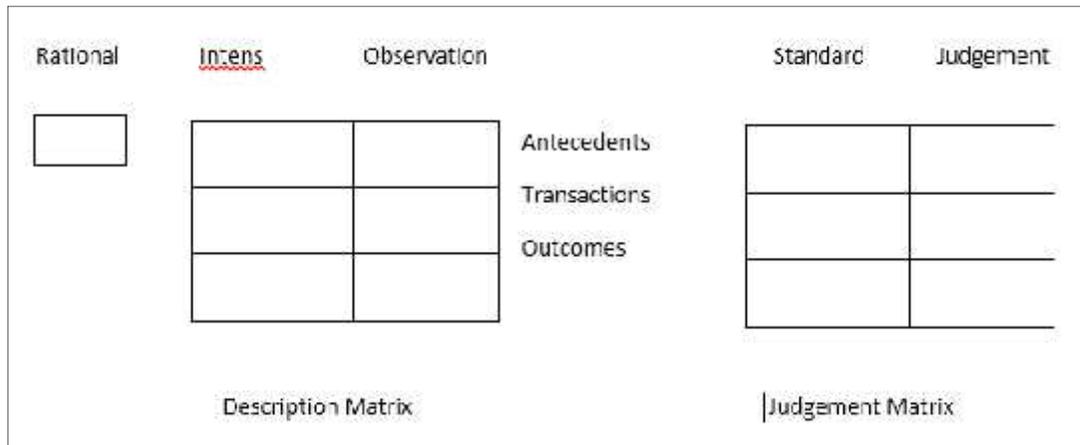
### **C. Model Evaluasi Program Countenance Stake**

Dalam penelitian evaluasi ini digunakan model evaluasi *Countenance Stake*, dimana didalamnya diberikan: (1) Informasi secara deskriptif pada seluruh tahap evaluasi, dan (2) penjelasan standar yang akan digunakan.<sup>35</sup> Hal ini berarti ada satu set data dan satu set standar, dimana orang yang tidak langsung berhubungan dengan program tersebut bisa menentukan manfaat program. Jadi model evaluasi tersebut *countenance model* lebih khusus menggali informasi dengan dua hal pokok yaitu melalui deskripsi dan melalui pertimbangan.

Model ini memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem, dimana ketiga unsur tersebut (*antecedents, transactions, output*) merupakan suatu rangkaian yang utuh. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seorang evaluator tidak harus mengevaluasi semua unsur tersebut jika memang kepentingan evaluasi hanya berkaitan dengan salah satu sebagian unsur saja didalam suatu program.

---

<sup>35</sup> Daniel. Stufflebeam dan Anthony J. Sinkfield, *Evaluation Theory, Models, and Applications* (San Fransisco: Jossey-Bass, 2007), h. 406.



Gambar 2.3. Model Evaluasi *Countenance Stake*

Penjelasan singkat mengenai model *countenance* sebagai berikut: a) *Rational*, yaitu menjelaskan pentingnya suatu program; b) *Antecedents*, yaitu kondisi-kondisi yang diharapkan sebelum kegiatan berlangsung, seperti motivasi, tingkat keterampilan, dan minat; c) *Transactions*, yaitu proses atau kegiatan-kegiatan yang saling mempengaruhi selama kegiatan; d) *Outcomes*, yaitu hasil yang diperoleh dari kegiatan, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai; e) *Judgements*, yaitu menilai pendekatan dan prosedur yang digunakan dalam kegiatan, para pelatih/instruktur, dan bahan-bahan; f) *Intents*, yaitu tujuan apa yang diharapkan dari suatu program; g) *Observations*, yaitu apa yang dilihat oleh para pengamat tentang pelaksanaan kegiatan; h) Standar, yaitu apa yang diharapkan dari para

*stakeholders*; dan i) *Judgements*, yaitu menilai suatu program, baik yang dilakukan oleh penilai itu sendiri maupun dari pihak-pihak lain.<sup>36</sup>

Dari gambar 2.3 di atas dapat dipahami bahwa tahapan dalam evaluasi menunjukkan objek atau sasaran. Model *countenance* memiliki dua kelengkapan utama yang tercakup dalam matrik yaitu matrik deskripsi dan matrik keputusan. Setiap matrik dibagi menjadi dua kolom, yaitu kolom tujuan dan kolom pengamatan. Pada kolom ini mencakup deskripsi matrik dan deskripsi standar, sedangkan pada deskripsi keputusan berisi matrik pertimbangan (*judgement matrix*). Kedua matrik dibagi menjadi dua tiga baris yang secara vertikal atau dari bawah ke atas, disebut baris awal (*antecedent*), proses (*transactions*) dan hasil (*outcome*).

Dalam pengumpulan data, untuk isian kolom pada matrik deskripsi, setiap tujuan dispesifikasi dalam kolom. Sedangkan data yang perlu dikumpulkan adalah data yang akan menunjukkan keadaan di mana tujuan akan dicapai pada hasil penelitian. Melalui Model *countenance*, informasi yang diperoleh menunjukkan apakah kondisi dalam kontek dan input sebelumnya dapat terpenuhi, seperti yang telah ditentukan dalam standar Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan internasional (PAMS-BWI).

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 78.

Evaluasi model stake meletakkan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi yaitu *description* dan *judgement*. Model stake membedakan adanya tiga tahap dalam program pendidikan, yaitu: *Antecedents* (masukan), *Transactions* (proses) dan *Output* (hasil).<sup>37</sup>

1. *Antecedents phase*, sebelum program diimplementasikan: Kondisi/kejadian apa yang ada sebelum implementasi program? Apakah kondisi/kejadian ini akan mempengaruhi program?
2. *Transactions phase*, pelaksanaan program: Apakah yang sebenarnya terjadi selama program dilaksanakan? Apakah program yang sedang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana program?
3. *Output phase*, mengetahui akibat implementasi pada akhir program. Apakah program itu dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan? Apakah klien menunjukkan perilaku pada level yang tinggi dibanding dengan pada saat mereka berada sebelum program dilaksanakan?

Selanjutnya Farida menjelaskan bahwa hasil dari pelaksanaan program yang berjalan harus diketahui dalam rangka memberikan *Judgement* yang diberikan berdasarkan dua dasar yaitu: (1) Standar yang ideal (*absolute*

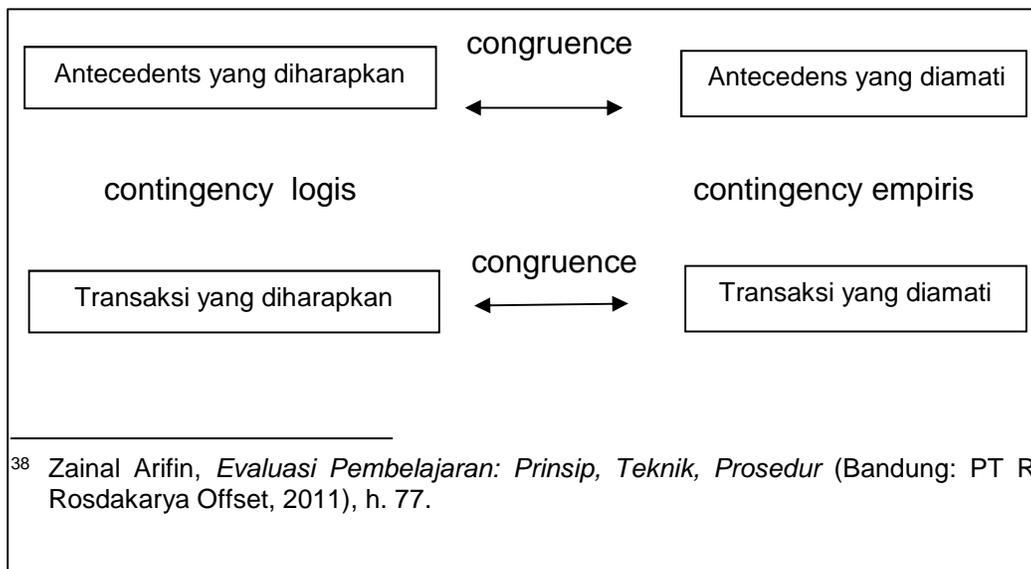
---

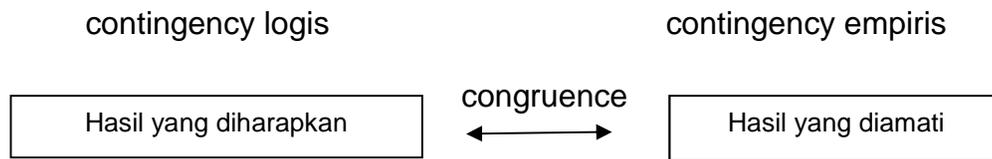
<sup>37</sup> Tayibnapi, *op. cit.*, h.22

*standard*), (2) Standar relatif (*Relative standard*). Standar yang ideal menjelaskan pada posisi program yang telah terealisasi sedangkan standar relatif menekankan pada suatu standar/kriteria yang diinginkan. Hal yang penting dalam model stake ialah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi.

Inti yang paling mendasar dan terpenting dalam model Stake adalah bagaimana menghubungkan antara *intens-observations-standard-judgement* atau *antecedents, transactions* dan *output*. Model tersebut menyeimbangkan antara kesesuaian (*congruence*), antara yang diharapkan (*intended*) dengan yang diamati (*observed*) pada evaluasi program pendidikan.<sup>38</sup>

Selanjutnya untuk melakukan pengolahan data, Stake mengajukan format pengolahan data sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut ini:





Gambar 2.4 Pengolahan Data Deskriptif Model Stake.<sup>39</sup>

Dari bagan matrik model evaluasi Stake tersebut diatas, terlihat jelas ada hubungan komparasi bersifat kongkurensi antara data pada saat awal dilakukan evaluasi (*intended antecedents*) dengan saat dilakukan observasi (*observed antecedents*) dengan data saat dilakukan observasi pada proses transaksi (*observed transactions*) dan juga ada hubungan timbal balik dengan data keluaran yang dilakukan pada saat observasi (*observed output*). Kotak-kotak pada matrik Stake di atas, menunjukkan adanya siklus dan sistem *feedback* pada saat melakukan pengolahan data hasil observasi.

Adapun penjelasan mengenai komponen-komponen evaluasi program model stake terhadap Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional (PAMS-BWI) adalah sebagai berikut :

### 1. Komponen Antecedents

<sup>39</sup> Robert E Stake, *Center For Instructional Research Ana Curriculum Evaluation Countenance* (Illinois: University of Illinois, 1976), h. 365

Antecedents yaitu kondisi-kondisi yang diharapkan sebelum kegiatan berlangsung, seperti motivasi, tingkat keterampilan dan minat.<sup>40</sup> Orientasi utama dari evaluasi *antecedents* yang diartikan sebagai evaluasi konteks adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu obyek, seperti institusi, program, populasi target, atau orang, dan juga untuk menyediakan arahan atau perbaikan. *Antecedents* merupakan keadaan persyaratan sebelum proses berlangsung yang berpengaruh terhadap hasil yang diharapkan tercapai. Indikator yang menjadi fokus dalam mengevaluasi konteks program penelitian terdiri dari : (1) Landasan Hukum (2) Sosialisasi Program; (3) Satuan Operasi Prosedur (SOP); (4) SDM pelaksana program; (5) Pendanaan; (6) Dukungan manajemen; dan (7) Dukungan kinerja dari sekolah sasaran program

Stufflebeam mengemukakan bahwa objektivitas utama tipe ini adalah untuk menelaah status objek secara keseluruhan, untuk mengidentifikasi kekurangan, untuk mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan, untuk mendiagnosa masalah sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat

---

<sup>40</sup> Arifin, *op. cit.*, h. 78

memperbaikinya dan secara umum untuk memberikan gambaran karakteristik lingkungan/setting program.<sup>41</sup>

Evaluasi *antecedent* juga bertujuan untuk melihat apakah tujuan yang lama dan prioritas terhadapnya sesuai kebutuhan yang seharusnya dilayani. Apapun yang menjadi fokus objeknya, hasil dari evaluasi *antecedent* harus menyediakan dasar untuk penyesuaian tujuan dan prioritas, serta perubahan yang dibutuhkan.

## **2. Komponen Transactions**

Proses selanjutnya adalah *transactions* yakni proses atau kegiatan-kegiatan yang saling mempengaruhi selama program berjalan. Evaluasi *transactions* yang diartikan sebagai evaluasi proses merupakan evaluasi yang dilakukan untuk melihat apakah perencanaan program sesuai dengan strategi yang telah direncanakan.

Evaluasi *transactions* bertujuan untuk mengidentifikasi atau memprediksi dalam proses pelaksanaan, seperti cacat dalam desain implementasinya. Evaluasi *transactions* juga bertujuan untuk menyediakan informasi sebagai dasar memperbaiki program, serta untuk mencatat, dan menilai prosedur kegiatan atau peristiwa. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan

---

<sup>41</sup> Stufflebeam dan Shinkfield, *op. cit.*, h. 169.

mengobservasi kegiatan dan dokumentasi terhadap pelaksanaan kegiatan PAMS-BWI, yang mencakup perencanaan, mekanisme pengelolaan program, pendampingan, penilaian, monitoring dan evaluasi. Adapun proses ini terdiri dari: (1) Pelaksanaan Desiminasi, OJL dan Pelaksanaan pendampingan oleh widyaiswara (WI); (2) Pelaksanaan Standar Proses di sekolah-sekolah sasaran PAMS-BWI; (3) Pelaksanaan Standar Penilaian; dan (5) Pelaksanaan standar Pengelolaan di obyek sasaran program PAMS-BWI.

Evaluasi *transaction* dipahami sebagai evaluasi proses, merupakan evaluasi yang dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan program sesuai dengan strategi yang telah direncanakan. Stufflebeam dan Shinkfield mengatakan bahwa evaluasi proses merupakan pengecekan yang berkelanjutan atas implementasi perencanaan.<sup>42</sup> Evaluasi *transactions* bertujuan mengidentifikasi atau memprediksi dalam proses pelaksanaan, seperti cacat desain prosedur atau implementasinya. Juga bertujuan menyediakan informasi sebagai dasar memperbaiki program, serta untuk mencatat, dan menilai prosedur kegiatan dan peristiwa.

Evaluasi *transactions* ini dapat dilakukan dengan memantau kegiatan, berinteraksi terus menerus, serta dengan mengobservasi kegiatan,

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 175

kesesuaian antara program dengan pelaksanaan, keterlaksanaan program, serta hambatan-hambatan yang ditemui.

### 3. Komponen Outcomes

Evaluasi *Outcome* yang diartikan sebagai evaluasi hasil adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai pencapaian program. *Outcome* merupakan hasil yang diperoleh dari pelatihan seperti pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai.

Evaluasi *Outcome* juga bertujuan mengumpulkan deskripsi dan penilaian terhadap keluaran (*Outcome*) dan menghubungkan itu semua dengan *antecedents*, dan informasi *transactions*, serta untuk menginterpretasikan kelayakan dan keberhargaan program. Evaluasi *outcomes* merupakan ukuran pengaruh program setelah dilakukan proses secara efektif dan efisien.

Evaluasi *Outcome* dalam penelitian ini akan berfokus pada : (1) Standar kompetensi Lulusan (SKL) (2) Pencapaian Prestasi siswa, guru dan Pencapaian mutu sekolah

Dalam tulisannya *The Countenance of Educational Evaluation Stake* (1967) memperkenalkan model evaluasi *countenance* dengan konsep evaluasi pada sifat dasar pendidikan yang kompleks dan dinamis, yang

memberi penekanan pada tujuan yang beragam dan *judgement* praktisi. Menurut Stake, sebuah evaluasi seharusnya menggambarkan nilai dan kekurangan yang diperoleh melalui identifikasi yang baik, yang dikumpulkan dan diproses secara sistematis.

Jika hasil yang diinginkan tidak tercapai, maka dengan model *countenance* ini masih dimungkinkan untuk dapat menyusun beberapa acuan dasar guna mengajukan hipotesis tentang penyebab tujuan yang tidak terpenuhi berdasarkan konteks dan input serta proses evaluasi. Perbedaan yang akan muncul dapat terlihat dari ketiga tingkatan *antecedent*, *transaction* dan *outcomes* sebagai patokan dari matrik keputusan. Berikutnya, Stake mengatakan studi evaluasi mengandalkan sebagian besar pada angka dan berpikir kriteria dikenali sebagai studi berbasis standar. Evaluasi tersebut, tidak hanya menekankan kriteria untuk deskripsi dan pertimbangan, tetapi menyinggung standar yang kualitatif.<sup>43</sup>

Seperti yang disarankan Stake bahwa untuk membuat desain evaluasi tentang sesuatu hal, sebaiknya memperoleh nasehat dari teman sejawat yang berpengalaman, atau seorang pemandu atau mengikuti suatu model dari buku teks, atau melakukan kegiatan yang masuk akal tentang

---

<sup>43</sup> Robert E. Stake, *loc. cit.* p.47

aktivitas yang berharga.<sup>44</sup> Untuk itu dalam melakukan evaluasi program hendaknya memilih model yang sesuai dengan apa yang akan dievaluasi.

### **5. Dasar Pemilihan Model Evaluasi Countenance Stake.**

Pemilihan model evaluasi sangat penting karena setiap program memiliki karakteristik yang berbeda dan setiap model evaluasi memiliki asumsi, pendekatan, terminologi dan logika berpikir yang berbeda pula. Berbagai macam model evaluasi dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Walaupun keberadaan antara satu model evaluasi dengan model yang lainnya berbeda, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni melakukan kegiatan yang sistematis untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang akan dievaluasi. Hasil evaluasi pun digunakan untuk hal yang relatif sama yaitu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam menentukan program selanjutnya.

Pemilihan model seringkali disesuaikan dengan misi, kepentingan, penekanannya atau pendekatannya bahkan berdasarkan waktu pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam melakukan evaluasi program hendaknya memilih model yang sesuai dengan apa yang akan dievaluasi.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 205.

Pada tahun 1970-an, Stufflebeam mencatat telah ada sekitar lima puluh model evaluasi. Oleh karena itu, salah satu permasalahan ketika kita hendak melakukan evaluasi program adalah pemilihan model yang dianggap paling sesuai terhadap program yang hendak dievaluasi. Itulah sebabnya, penggunaan lebih dari satu model dalam suatu evaluasi sangat tidak disarankan karena justru akan memunculkan kerancuan dan benturan logika antar model.

Meskipun setiap model evaluasi memiliki keterbatasan, namun pemilihan model yang tepat akan berimplikasi langsung terhadap kualitas informasi yang dihasilkan oleh suatu evaluasi. Kualitas informasi dalam suatu evaluasi bisa menjadi ukuran keberhasilan suatu evaluasi. Hal ini disebabkan tujuan utama evaluasi adalah menyediakan informasi bagi pengambil keputusan mengenai suatu program untuk menentukan apakah suatu program dihentikan, diteruskan dengan perbaikan, atau diteruskan dengan pengembangan.

Alasan penggunaan Model Countenance Stake dalam penelitian tentang Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional (PAMS-BWI) ini adalah karena ; (1). *Description* dan *Judgement Matrix* mengarahkan pengumpulan dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan serta rekomendasi keputusan melalui tahapan-tahapan masukan

(*antecedents*), proses (*transactions*) dan keluaran (*outcomes*) (2) Dengan model *Countenance Stake*, kegiatan evaluasi program dilaksanakan dengan melakukan perbandingan antara data di lapangan dengan standar yang ditentukan; (3) Peneliti dapat membuat penelitian tentang pelaksanaan PAMS-BWI dilihat dari komponen masukan (*antecedents*), proses (*transactions*), dan keluaran (*outcomes*) data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan sebenarnya tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut, untuk menilai manfaat program.<sup>45</sup> Dengan demikian, Model *Countenance Stake* dapat memberikan gambaran pelaksanaan program secara detail. Selanjutnya, (4) Keistimewaan dari model *Countenance Stake* ini adalah memiliki spesifikasi dari standar yang digunakan dalam membuat keputusan atau penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model *Countenance Stake* memberikan, (1) Informasi deskripsi yang lebih banyak dari seluruh fase evaluasi, dan (2) Lebih detail pemaparan dari setiap tahapan evaluasi terhadap standar-standar yang digunakan. Untuk spesifikasi standar-standar

---

<sup>45</sup> Farida Yusuf Tayibnapsis. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta. 2008), p. 22.

yang digunakan dalam penilaian, penggunaan independen informan dimungkinkan.<sup>46</sup>

Akhirnya, model penelitian evaluasi dengan menggunakan Model *Countenance Stake* ini lebih mudah mengukurnya karena standar yang digunakan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi keberhasilan program digunakan standar yang sudah ada. Selanjutnya, dengan menggunakan model *Countenance Stake* ini, maka untuk membandingkan informasi tentang persepsi para Tim Manajemen/LPMP, widyaiswara, kepala sekolah, pengawas dinas pendidikan, guru ataupun siswa terkait PAMS-BWI dapat digunakan instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran yang dimaksud adalah instrumen yang berguna untuk membantu menginternalisasi hasil PAMS-BWI. Dalam hubungan ini untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat, maka dilakukan triangulasi sumber data. Artinya, sumber data dan informasi tidak hanya dilakukan dari satu *key informan* tetapi diupayakan untuk memperoleh sumber data lainnya.

#### **D. Kriteria Evaluasi**

---

<sup>46</sup> George F. Madaus, Michael S. Scriven, dan Daniel L. Stufflebeam, *Evaluation Models, Viewpoints of Educational and Human Services Evaluation* (Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing, 1983), p. 294.

Kriteria memiliki kedudukan yang sangat penting dalam evaluasi program. Adanya kriteria dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan sebuah program. Program akan sukses apabila memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Membahas mengenai kriteria keberhasilan sebagai patokan evaluasi tidak akan terlepas dari pembahasan standar, dan indikator. Makna ketiga konsep tersebut tentunya tidak sama, akan tetapi memiliki kaitan satu dengan yang lainnya.

Dasar penyusunan kriteria adalah peraturan atau ketentuan yang sudah dikeluarkan berkenaan dengan yang melatar belakangnya, pedoman atau pelaksanaan, konsep atau teori-teori yang didapat dari buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, pertimbangan para ahli (*expert judgment*), bersama-sama dengan tim yang berwawasan tentang program yang akan di evaluasi dan jika keenam hal tersebut tidak juga ditemui maka dengan keterpaksaan penyusun kriteria atau tolok ukur hanya mengandalkan akal atau nalar penyusun sendiri.<sup>47</sup>

Dengan kriteria dapat dipertimbangkan berbagai komponen telah tercapai.<sup>48</sup> Kriteria yang sudah dibuat dapat digunakan untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang sudah dilakukan. Dan dalam

---

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin, *op. cit.*, p. 33-34

<sup>48</sup> Arikunto, *op.cit.*,h. 6.

evaluasi ini, kriteria menuntun evaluator mengikuti butir-butir kriteria sehingga hasilnya lebih obyektif.

Tayibnapsis mengatakan bahwa kriteria yang digunakan untuk menilai suatu obyek harus sesuai dengan konteks dan fungsi evaluasinya<sup>49</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengertian yang berbeda antara standar dan kriteria. Dalam konteks program, standar lebih mengacu pada seberapa banyak kriteria penting yang telah terpenuhi atau tercukupi dalam penyelenggaraan suatu program. Sedangkan kriteria merupakan karakteristik program yang dianggap sebagai basis relevan. Pemberian nilai pada kriteria didasarkan pada keyakinan, pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, dan hasil kajian teoritis.

Pendekatan yang digunakan untuk menyusun kriteria dalam penelitian ini adalah gabungan antara pendekatan *fidelity* dan pendekatan proses. Pendekatan *fidelity* yaitu kriteria evaluasi dikembangkan sebelum peneliti turun ke lapangan untuk pengumpulan data. Kriteria ini tidak bersifat umum tetapi dikembangkan secara khusus sesuai dengan karakteristik program PAMS-BWI, dikembangkan berdasarkan kajian pustaka dan diskusi dengan pakar yaitu dosen pembimbing dan pengelola PAMS-BWI. Sedangkan dari sisi pendekatan proses yaitu kriteria evaluasi dikembangkan

---

<sup>49</sup> Tayibnapsis, *op. cit.*, h. 36

setelah peneliti berada di lapangan. Dengan demikian kriteria sangat berhubungan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Adapun indikator yang menjadi acuan dan telah disepakati oleh LPMP Jawa Barat dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program PAMS-BWI ini adalah :

Tabel 2.4 Kriteria Evaluasi PAMS-BWI

KOMPONEN EVALUASI	ASPEK YANG DIEVALUASI	INDIKATOR	KRITERIA EVALUASI
<b>A. ANTECEDENTS</b> (Konteks dan Input)	A.1. Landasan Hukum	Dasar hukum yang kuat dan jelas	▪
	A.2. Sosialisasi Program	Efektivitas sosialisasi	▪ Subyek maupun obyek program dapat memahami materi sosialisasi program dengan baik
	A.3. SOP	SOP dapat diaplikasikan	▪ SOP dapat dipahami oleh yang berkepentingan
	A.4. SDM pelaksana program	Kualifikasi SDM / Widyaiswwara memadai	▪ SDM yang terlibat dalam pelaksanaan program tersedia sesuai kebutuhan
	A.5. Pendanaan	Terdapat alokasi dana untuk kegiatan PAMS-	▪ Waku pencairan dana tepat waktu

KOMPONEN EVALUASI	ASPEK YANG DIEVALUASI	INDIKATOR	KRITERIA EVALUASI
		BWI	
	A.6. Dukungan manajemen	Berjalannya fungsi manajemen di LPMP dalam program PAMS-BWI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase kehadiran Tenaga pendamping 95%</li> <li>▪ Tertib administrasi pelaporan kegiatan</li> </ul>
	A.7. Dukungan Kinerja Sekolah	Berakreditasi minimal A	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berakreditasi minimal A dengan rata-rata minimal 90 dan tidak ada nilai standar di bawah 86 kecuali standar PTK dan Sarpras nilai minimal adalah 71</li> </ul>
	Diterapkannya kurikulum yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurikulum setiap mata pelajaran terpublikasi di web sekolah</li> </ul>	
	Standar isi terpenuhi sesuai program PAMS-BWI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta didik dapat mengakses program pembelajaran tiap semester</li> </ul>	
Standar Pendidik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan pendidikan dan</li> </ul>		

KOMPONEN EVALUASI	ASPEK YANG DIEVALUASI	INDIKATOR	KRITERIA EVALUASI
		dan Kepala Sekolah terpenuhi sesuai program PAMS-BWI	pelatihan serta pengembangan profesi bagi guru dan kepala sekolah dilakukan secara terprogram
<b>B. TRANSACTIONS</b> (Proses)	B.1. Pelaksanaan Workshop, OJL, pendampingan dan monev oleh Widyaiswara (WI)	Widyaiswara melaksanakan program Workshop, OJL, pendampingan dan monev di sekolah-sekolah sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 95% kehadiran WI dan keterwakilan obyek sasaran</li> <li>▪ Jadwal pelaksanaan program sesuai skedul/rencana</li> </ul>
	B.2. Pelaksanaan Standar Proses di sekolah-sekolah sasaran PAMS-BWI	Standar proses terpenuhi sesuai program PAMS-BWI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RPP/silabus dimuat di web sekolah dan dapat diakses dengan mudah</li> <li>▪ Pembelajaran memungkinkan dilakukan lewat fasilitas internet (<i>e-learning</i>)</li> <li>▪ Kesetaraan gender dalam</li> </ul>

KOMPONEN EVALUASI	ASPEK YANG DIEVALUASI	INDIKATOR	KRITERIA EVALUASI
			<p>proses pembelajaran sudah diterapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Lesson Study</i> sebagai bagian peningkatan mutu proses pembelajaran dikembangkan dengan berbasis saintifik</li> <li>▪ Pembelajaran mengakomodir peserta didik berkebutuhan khusus</li> <li>▪ Proses konseling diterapkan dalam proses pembelajaran</li> </ul>
	B.4 Pelaksanaan Standar Penilaian di sekolah sasaran	Standar penilaian terpenuhi sesuai program PAMS-BWI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil penilaian dimuat dalam web sekolah dan dapat diakses secara individual</li> <li>▪ Soal-soal pengukuran kompetensi yang ada di sekolah setara dengan</li> </ul>

KOMPONEN EVALUASI	ASPEK YANG DIEVALUASI	INDIKATOR	KRITERIA EVALUASI
			soal TIMSS/ PISA, NAPLAN atau olimpiade
	B.5. Pelaksanaan standar Pengelolaan di obyek sasaran program PAMS-BWI	Diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RKS dapat diakses di web sekolah</li> <li>▪ Dana BOS dipublikasikan di web sekolah</li> <li>▪ Kultur lokal dan global dikembangkan di sekolah</li> </ul>
<b>C. OUTCOMES</b> (Keluaran)	C.1. Kompetensi Lulusan (SKL)	Memiliki Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) belajar peserta didik paling rendah 75	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50% peserta didik mendapatkan KKM minimal 80</li> </ul>
		Peningkatan Hasil kompetensi siswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nilai Ujian Peserta didik mencapai nilai lebih dari 60 untuk soal-soal setara TIMSS/PISA</li> </ul>
	C.2. Pencapaian Prestasi	Peningkatan Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaian hasil uji</li> </ul>

KOMPONEN EVALUASI	ASPEK YANG DIEVALUASI	INDIKATOR	KRITERIA EVALUASI
		kompetensi Guru	kompetensi guru terjadi peningkatan

Kriteria-kriteria standar tersebut di atas merupakan ukuran atau patokan standar objektif. Selanjutnya hasil evaluasi atau intensitas objektif dari lapangan dibandingkan dengan standar objektif yang telah ditetapkan. Teknik pengambilan keputusan aktualitas pada setiap tahapan evaluasi atau aspek dilakukan dengan cara melakukan pengukuran pada setiap fokus evaluasi. Model matrik khusus order ini memiliki karakteristik yang khas yaitu menampilkan adanya efek-efek perbandingan antara standar objektif berupa kriteria-kriteria standar normatif yang telah ditetapkan sebelumnya dibandingkan dengan intensitas objektif yaitu berupa hasil rekaman nyata di lapangan. Perbandingan tersebut akan menghasilkan efek kesimpulan yaitu berupa aktualitas rekomendasi keputusan pada setiap kasus yang diambil.

## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **A. Tujuan Evaluasi**

Penelitian evaluatif pada pelaksanaan program penjaminan mutu pendidikan ini ditujukan untuk menjelaskan efektivitas program akselerasi mutu sekolah berwawasan internasional (PAMS-BWI) yang dilakukan LPMP Jawa Barat. Pada prinsipnya hasil akhir dari kegiatan tersebut adalah untuk perbaikan dan penyempurnaan program yang sudah berjalan atau yang akan dilanjutkan.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengevaluasi sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan PAMS-BWI di LPMP Jawa Barat; 2) Hasil Penelitian evaluatif ini dapat menjadi masukan berharga dalam penyempurnaan kegiatan PAMS-BWI pada tahap selanjutnya; 3) Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk diseminasi pelaksanaan PAMS-BWI yang menjadi *role model* bagi pemerintah pusat dalam pelaksanaan program sejenis/serupa pada program akselerasi mutu sekolah yang rencananya akan diterapkan secara nasional dengan cakupan yang lebih luas.

Sebagai salah satu program yang menjadi unggulan LPMP Jawa Barat dan program yang baru pertama dilakukan di Indonesia, tentunya penelitian evaluatif ini sangat penting dilakukan, agar dapat diketahui aspek-

aspek apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas program PAMS-BWI ditinjau dari komponen masukan (*antecedents*), komponen proses (*transactions*) dan komponen keluaran (*outcomes*) menurut Model Evaluasi *Countenance Stake*.

Secara operasional, penelitian evaluasi PAMS-BWI pada setiap komponen masukan (*antecedents*), proses (*transactions*) dan keluaran (*outcomes*) bertujuan untuk: (1) Mengetahui efektivitas program PAMS-BWI dikaitkan dengan ketercapaiannya dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lain (setara internasional) hasil pengembangan indikator kinerja yang sudah ditetapkan LPMP Jawa Barat yaitu Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM) dan Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) di sekolah-sekolah sasaran; (2) Mengetahui efektivitas PAMS-BWI yang berhubungan dengan pelaksanaan program pendampingan oleh widyaiswara (WI) kepada guru-guru model/inti di sekolah-sekolah sasaran yang menerapkan *Lesson Study* dan *Sister school*; dan (3) Mengetahui efektivitas program PAMS-BWI dalam rangka meningkatkan mutu sekolah yang setara internasional.

Berbagai permasalahan yang ditemukan pada saat peninjauan awal di lapangan perlu dicari penyelesaiannya, terutama permasalahan yang berkaitan dengan kesiapan : kegiatan sosialisasi program, standar operasi prosedur (SOP), ketepatan waktu pencairan dana, sumber daya manusia (widyaiswara/ tenaga pendamping) serta dukungan kinerja sekolah sasaran.

Permasalahan lain yang muncul berhubungan dengan komponen proses meliputi : pelaksanaan tahapan kegiatan yang belum ideal sesuai jadwal, seperti desiminasi dan OJL, program pendampingan oleh widyaiswara, standar proses, standar penilaian yang mengadopsi standar setara internasional dari TIMMS/PISA, dan juga pelaksanaan standar pengelolaan sekolah berbasis MBS/M di sekolah sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka evaluasi pelaksanaan program PAMS-BWI ini sangat diperlukan dalam rangka melakukan penjaminan mutu pendidikan dasar (Dikdas), khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP). Seluruh pihak yang berhubungan dengan PAMS-BWI, baik itu Pemerintah Pusat, LPMP, pemerintah daerah propinsi/kab/kota, sekolah, komite sekolah maupun peneliti dari perguruan tinggi harus bekerja sama secara sinergis untuk menjalankan amanat Permendiknas No. 37/2012 Pasal 3 ayat c dan Inpres No. 1 Tahun 2010.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di LPMP Jawa Barat (Padalarang, Bandung Barat) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Pusat di propinsi dan beberapa sekolah sasaran kegiatan PAMS-BWI, yaitu SMP-SMP terseleksi yang berlokasi di Kabupaten Cianjur dan Kota Banjar.

Alasan penentuan lokasi tersebut adalah karena: (1) LPMP Jawa Barat, sebagai unit pelaksana teknis program PAMS-BWI ini memiliki data

dan informasi yang cukup lengkap, yaitu sejak Program Akselerasi Mutu Sekolah (PAMS) ini dilaksanakan tahun 2011 sampai dengan diubahnya menjadi model PAMS tahap lanjutan yaitu PAMS-Berwawasan Internasional yang dimulai pada Tahun 2014. Selain itu program yang dirintis LPMP Jawa Barat ini belum pernah diteliti secara lebih terperinci dari pihak eksternal (luar institusi); (2) Alasan SMP-SMP di Kabupaten Cianjur dipilih oleh LPMP sebagai *Pilot Project* PAMS-BWI adalah selain karena lokasinya yang cukup dekat dengan LPMP Jawa Barat yang berkantor di Padalarang-Bandung Barat, juga berdasarkan data hasil EDS yang diperoleh menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di Kabupaten Cianjur merupakan sekolah yang memerlukan pembinaan lebih intensif, terlebih lagi Kabupaten Cianjur memiliki nilai APM dan APK relatif rendah dibanding kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat.

Hal ini menjadi dasar pertimbangan pemilihan lokasi tersebut, sehingga lebih memungkinkan untuk dilihat dampak pelaksanaan PAMS-BWI terhadap adanya peningkatan mutu sekolah. Cianjur juga merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Barat setelah Kabupaten Sukabumi yang berdasarkan kondisi geografi dan demografinya berbeda antara wilayah bagian utara dengan selatan, sehingga mutu antar sekolah tersebut memiliki ketimpangan/ kesenjangan/ *gap* yang cukup signifikan; (3) Sedangkan Kota Banjar digunakan oleh LPMP Jawa Barat sebagai *Pilot Project* pada program PAMS-BWI ini adalah dalam rangka keperluan dan kaitannya dengan fungsi sebagai sampel pembandingan, dimana Kota Banjar (daerah baru hasil

pemekaran dari Kabupaten Ciamis) berdasarkan data hasil EDS yang diperoleh memiliki rata-rata nilai yang cukup baik, dan juga berdasarkan data hasil angket yang pernah dilakukan oleh LPMP Jawa Barat terhadap tingkat antusiasme sekolah dalam pembelajaran, Kota Banjar termasuk dalam kategori yang memiliki nilai cukup tinggi dalam hal percepatan dan perbaikan mutu. Semua data dan informasi tersebut diatas (Butir 1 sampai 3) diperoleh peneliti pada saat berkunjung ke LPMP dan juga beberapa sampel sekolah sasaran di Cianjur yang dilakukan untuk penjajakan lapang tahap pendahuluan (awal) di lokasi penelitian yaitu pada tanggal 3 Desember 2015 dan 11 Februari 2016.

Sasaran PAMS-BWI tahun 2015 adalah 8 sekolah jenjang SMP dengan status SSN yang telah ditetapkan LPMP Jawa Barat di wilayah Kabupaten Cianjur dan Kota Banjar. Nama-nama sekolah tersebut adalah sebagai berikut : SMPN 3 Cianjur, SMP Al Azhar 20, SMPN 1 Cipanas, SMPN 2 Cipanas, SMPN 1 Cugenang, SMPN 2 Cugenang, SMPN 1 Banjar dan SMPN 2 Banjar.

Sebelum mulai menentukan tempat penelitian terlebih dahulu peneliti sudah mengadakan penjajakan lapangan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang kondisi lingkungan sekitar lokasi kantor, tokoh-tokoh kunci, kebiasaan-kebiasaan, pendidikan, suasana kerja, lingkungan sekolah dan

sebagainya.<sup>1</sup> Tujuan penjajakan ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum mengenai sasaran penelitian serta terciptanya situasi akrab antara peneliti dengan subjek penelitian. Kondisi ini memudahkan peneliti dalam mengorek informasi dan data pada diri subjek penelitian.

Rencana waktu penelitian akan dimulai dari pertengahan bulan Mei sampai dengan awal bulan Juni 2016. Sedangkan penyusunan laporan dilakukan setiap saat selesai melakukan evaluasi.

### **C. Pendekatan, Metode dan Desain Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi ini adalah pendekatan kualitatif. Evaluasi yang menggunakan pendekatan kualitatif bersifat induktif, artinya evaluator berupaya menyikapi dengan akal sehat suatu situasi tanpa mengedepankan harapan sebelumnya pada setting penelitian atau program. Rancangan kualitatif diawali dengan pengamatan spesifik menuju terbangunnya pola-pola umum. Kategori atau dimensi analisis muncul dari pengamatan yang bersifat terbuka, seperti peneliti mendatangi obyek evaluasi untuk memahami pola-pola program yang ada sebagai dunia empiris dari suatu kajian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdiakarya, Edisi Revisi, 2010), p. 187.

<sup>2</sup> Michael Quinn Patton, *Qualitative Evaluation Methods* (Beverly Hill: Sage Publications Ins, 1987), hal. 40-41

Penelitian kualitatif menurut Patton,<sup>3</sup> bersifat naturalistik, yang artinya peneliti tidak diperkenankan memanipulasi setting penelitian (program ataupun peserta program) guna tujuan evaluasi. Aktivitas dan proses penelitian harus bersifat ilmiah, tidak direncanakan atau dimanipulasi seperti pada eksperimen.

Sebagai upaya untuk menemukan informasi dan unsur-unsur pada penelitian kualitatif ini, pendekatan yang digunakan adalah **goal oriented approach** yaitu pendekatan berorientasi pada tujuan yang mana menggunakan tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan.<sup>4</sup>

Evaluasi pada program PAMS-BWI ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian evaluatif. Model desain penelitian yang digunakan yaitu *Model Countenance Stake* yang dikembangkan oleh Robert Stake. Evaluasi ini menekankan adanya dua hal pokok, yaitu: deskripsi (*descriptions*) dan keputusan/penilaian (*judgements*), serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu: masukan (*antecedents/context-input*), proses (*transactions/process*), dan keluaran (*outcomes/output*). Model ini berorientasi pada pengambilan keputusan pada setiap aspek dengan cara melakukan pengukuran pada fokus evaluasi yang kemudian dirangkum dalam matriks. Secara umum alur

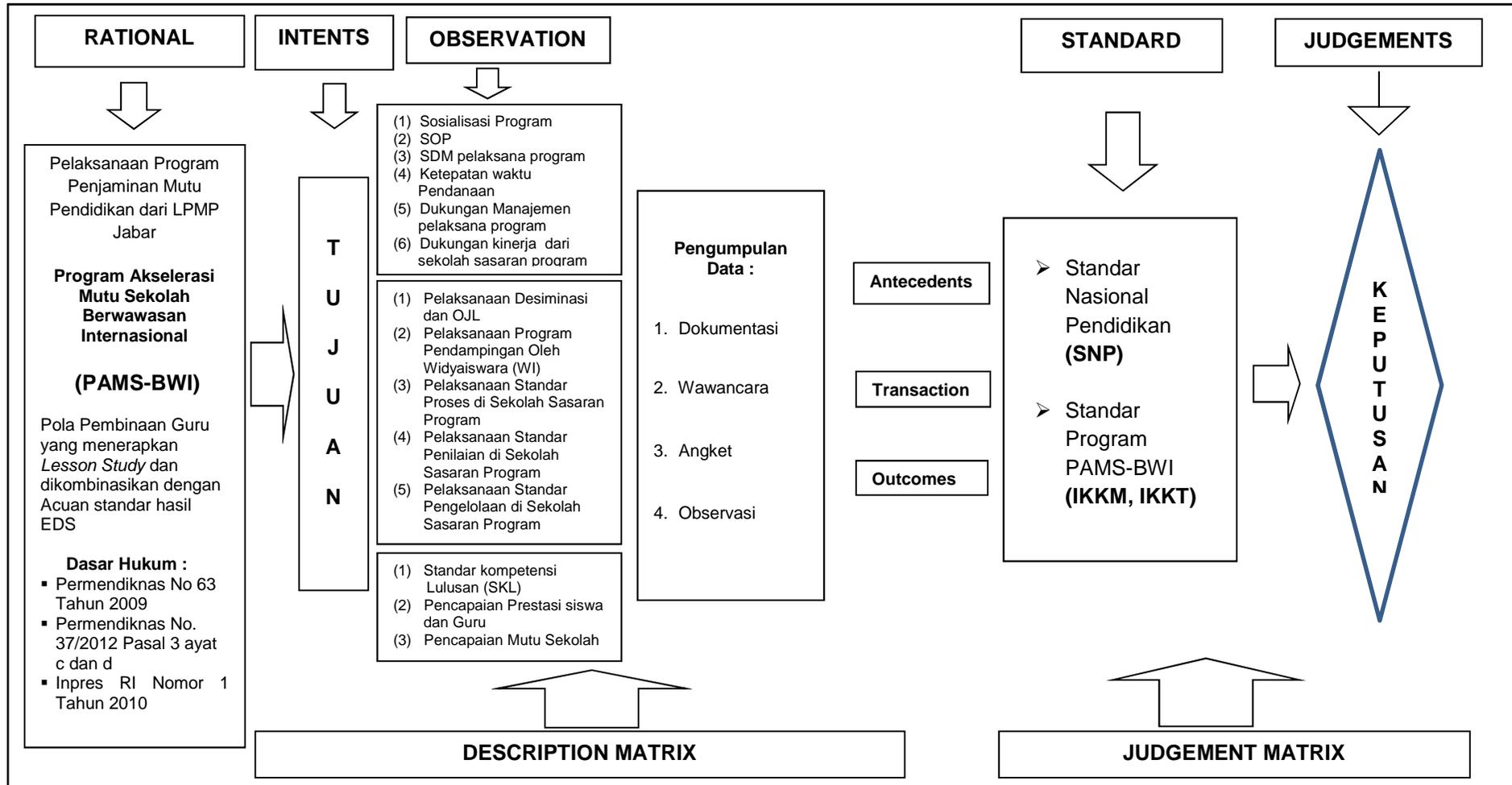
---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.41.

<sup>4</sup> Farida Yusuf Tayibnapi, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi: untuk Program Pendidikan dan Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 24.

penelitian evaluasi Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan internasional (PAMS-BWI) dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Dari gambar tersebut dapat dibaca bahwa matriks pertama, yaitu deskripsi, berkaitan atau menyangkut dua hal yang menunjukkan posisi sesuatu (yang menjadi sasaran evaluasi), yaitu maksud/tujuan yang diharapkan oleh program, dan yang kedua pengamatan/akibat yaitu apa yang sesungguhnya terjadi. Kemudian pada matriks selanjutnya adalah menunjukkan langkah pertimbangan, yang dalam langkah tersebut mengacu pada standar dan menghasilkan kesimpulan. Tindakan pengambilan kesimpulan dari hasil analisis adalah berbentuk keputusan yang pada akhirnya menghasilkan suatu rekomendasi tentang PAMS-BWI yang sedang dievaluasi.



Gambar 3.1. Desain Penelitian Model Evaluasi *Countenance Stake* pada PAMS-BWI

## **D. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian terdapat proses pengukuran. Untuk itu memerlukan alat ukur yang baik berupa instrumen penelitian. Dengan instrumen yang baik, akan diperoleh informasi atau data yang dikehendaki, sehingga hasil penelitiannya pun dapat dipertanggung-jawabkan.

Teknik pengumpulan data dalam evaluasi PAMS-BWI ini bersifat menghimpun (non pengukuran) yaitu berupa angket, wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Instrumen yang akan digunakan adalah : (a) Pedoman wawancara untuk wawancara; (b) Kuesioner untuk angket; (c) Daftar cek (*check list*) untuk observasi; dan (d) Daftar inventory untuk studi dokumentasi.

### **1. Kisi-kisi Instrumen**

Evaluasi program PAMS-BWI ini menggunakan empat jenis instrument penelitian, yaitu wawancara, angket/kuesioner, studi dokumentasi, dan daftar ceklis, yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu: masukan (*antecedents*), proses (*transactions*), dan hasil (*output*).

#### **a. Instrumen Masukan (Antecedents)**

Yang dimaksud masukan dalam penelitian ini adalah gambaran karakteristik lingkungan yang mempengaruhi program serta sumber-sumber yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan program.

Variabel masukan yang digunakan dalam program PAMS-BWI adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen *antecedent*

KOMPONEN EVALUASI	ASPEK YANG DIEVALUASI	INDIKATOR	NO. BUTIR INSTRUMEN	
1	2	3	4	
<b>ANTECEDENTS</b> (Konteks dan Masukan)	Landasan Formal	Dasar hukum yang kuat dan jelas	1,2	
	Sosialisasi PAMS	Efektifitas sosialisasi	3,4	
	SOP	SOP dapat diaplikasikan	5,6	
	SDM pelaksana program	Jumlah dan kualifikasi SDM/ Widyaiswara memadai	7,8	
	Pendanaan	Ketepatan waktu proses pencairan dana program	9,10	
	Dukungan manajemen	Berjalannya fungsi manajemen di LPMP dalam program PAMS-BW	11,12	
	Dukungan kinerja dari sekolah sasaran program PAMS-BWI	Sekolah sasaran berakreditasi minimal A		13,14
		Sekolah sararan menerapkan kurikulum 2013		15,16
		Program pembelajaran memenuhi standar isi		17,18
		Guru memenuhi standar PTK		19,20
Kepala sekolah Memenuhi standar PTK			21,22	

### b. Instrumen Proses (Transactions)

Yang dimaksud dengan proses dalam penelitian evaluasi ini adalah seluruh rangkaian kegiatan transformatif dan atau interaktif dalam pemanfaatan segala masukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan program PAMS-BWI.

Tabel 3.3 Kisi-kisi instrumen *transaction*

KOMPONEN EVALUASI	ASPEK YANG DIEVALUASI	INDIKATOR	NO INSTRUMEN
1	2	3	4
<b>TRANSACTIONS</b> (Proses)	Pelaksanaan Desiminasi dan OJL PAMS-BWI	Adanya kegiatan desiminasi dan koordinasi yang melibatkan	23,24
	Pelaksanaan pendampingan oleh Widyaiswara	Widyaiswara melaksanakan pendampingan di sekolah sasaran sesuai jadual	25,26
	Pelaksanaan standar proses di sekolah sasaran	Memenuhi standar proses sesuai program PAMS-BWI	27,28
	Pelaksanaan standar penilaian di sekolah sasaran	Memenuhi standar penilaian sesuai program PAMS-BWI	29,30
	Pelaksanaan standar pengelolaan di sasaran sasaran	Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M)	31,32

### c. Instrumen Hasil (Outcomes)

Instrumen *outcomes* dalam penelitian evaluasi ini adalah hasil interaksi dari variabel masukan dan variabel proses kegiatan transformatif atau interaktif yang terjadi di dalam (*intern*) program pelaksanaan PAMS-BWI. Keluaran itu disebut keluaran (*outcomes*), jika langsung dan segera dapat diamati dan diukur. Variabel *outcomes* dijabarkan kedalam sub variabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kisi-kisi instrumen *outcomes*

KOMPONEN EVALUASI	ASPEK YANG DIEVALUASI	INDIKATOR	NO INSTRUMEN
1	2	3	4
<b>OUTCOMES</b> (Keluaran)	Kompetensi Lulusan (SKL)	Memiliki Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) belajar peserta didik paling rendah 75	33,34
	Pencapaian Prestasi dan Mutu	Peningkatan Capaian Hasil kompetensi siswa	35,36
		Peningkatan Capaian Hasil kompetensi Guru	37,38

### 3. Validasi Instrumen

Untuk mengetahui sejauh mana instrumen dapat mengukur apa yang hendak diukur berdasarkan acuan teoritik yang telah ditetapkan, maka instrumen terlebih dahulu dinilai oleh panelis. Rekomendasi para panelis

bertujuan untuk mengetahui ketepatan atau relevansi butir dengan sasaran ukur.

Ada dua persyaratan pokok dari instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas berhubungan dengan kemampuan sesuatu yang ingin diukur. Menurut Sugiyono bahwa untuk instrumen non tes yang digunakan dalam mengukur sikap, cukup memenuhi validitas konstruk.<sup>5</sup> Lebih lanjut dikatakan untuk menguji validitas konstruk, maka dapat digunakan pendapat dari para ahli dimana para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen penelitian yang telah disusun.

Dalam memvalidasi instrumen, untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan pengisian akibat ketidakjelasan angket ataupun persepsi responden yang salah terhadap angket, maka dilakukan validasi konstruk terhadap instrumen angket tersebut. Validasi untuk instrumen penelitian evaluasi program melibatkan panelis yang dipandang mempunyai kredibilitas dan kapabilitas untuk melakukan penelitian dan koreksi secara obyektif terhadap angket yang akan digunakan.

Untuk mengetahui sejauh mana satu instrumen mengukur apa yang hendak diukur berdasarkan kajian teori yang ditetapkan, instrumen terlebih dahulu dinilai oleh pakar/panelis. Rekomendasi para pakar/panelis bertujuan untuk mengetahui ketepatan atau relevansi butir instrumen dengan sasaran

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: CV Alfabeta,2009), h.350

yang hendak diukur. Menurut Sugiyono dalam Eko Putro Widoyoko, bahwa tenaga ahli/pakar yang melakukan penilaian validitas instrumen umumnya mereka yang telah bergelar doktor sesuai dengan lingkup yang diteliti.<sup>6</sup> Penilaian validitas instrumen dilakukan oleh dua orang pakar menggunakan formula yang dikemukakan oleh Gregory. Untuk menentukan koefisien validitas isi, hasil penilaian dari kedua pakar dimasukkan kedalam tabulasi silang 2x2 yang terdiri dari kolom A, B, C dan D. Kolom A adalah sel yang menunjukkan ketidaksetujuan kedua penilai. Kolom B dan C adalah sel yang menunjukkan perbedaan pandangan antara penilai pertama dan kedua. Kolom D adalah sel yang menunjukkan persetujuan antara kedua penilai. Validitas isi adalah banyaknya butir soal pada kolom D dibagi dengan banyaknya butir soal kolom A+B+C+D.<sup>7</sup>

**Tabel 3.2.** Tabulasi Silang

Tabulasi Penilaian dari ahli		Penilai I	
		Relevansi Lemah Skor (1-2)	Relevansi Kuat Skor (3-4)
Penilai II	Relevansi Lemah Skor (1-2)	A ( - - )	B ( + - )
	Relevansi Kuat Skor (3-4)	C ( - + )	D ( + + )

<sup>6</sup> Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 146.

<sup>7</sup> Robert J. Gregory, *Tes Psikologi: Sejarah, Prinsip dan Aplikasi* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 121.

Setelah butir soal divalidasi selanjutnya dianalisis dengan menggunakan perhitungan menurut Gregory sebagai berikut.

$$VI = \frac{D}{A + B + C + D}$$

Keterangan :

VI = Validasi Isi

A = Kedua pakar/penilai tidak setuju

B = Penilai I setuju, penilai II tidak setuju

C = Penilai I tidak setuju, penilai II setuju

D = Kedua pakar/penilai setuju

Kriteria Validasi isi :

0,80 – 1,00 : validasi isi sangat tinggi

0,60 – 0,79 : validasi isi tinggi

0,40 – 0,59 : validasi isi sedang

0,20 – 0,39 : validasi rendah

0,00 – 0,19 : validasi sangat rendah

### **E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Data yang valid dan reliabel menjadi tujuan utama dan sangat penting dalam sebuah penelitian, sehingga dibutuhkan teknik pengumpulan data yang tepat dengan langkah-langkah yang strategis. Untuk keperluan

penelitian ini, pemilihan informan perlu dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan maksud dan tujuan penelitian.

Subyek dalam penelitian adalah orang-orang yang mengetahui, berkaitan atau menjadi pelaku dari suatu kegiatan program. Kriteria pemilihan informan antara lain: Kepala LPMP, Ketua Program PAMS-BWI, tenaga pendamping/ widyaswara, guru model/inti, pengawas dari dinas kabupaten-kota dan siswa-siswi sekolah sasaran yang mendapat perlakuan program PAMS-BWI di Cianjur dan Banjar.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, angket/kuesioner, studi dokumen, dan observasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Komponen Evaluasi	Aspek yang dievaluasi	Sumber Data / Informasi	Teknik Pengumpulan Data
<b>ANTECEDENTS</b> (Konteks dan Input)	Landasan Hukum	▪ Tim PAMS-BWI di LPMP	Wawancara Studi dokumen
	Sosialisasi PAMS	▪ Tim PAMS-BWI di LPMP ▪ Kepsek dan guru model ▪ Pengawas Disdik	Wawancara Studi dokumen
	SOP	▪ Tim PAMS-BWI di LPMP	Wawancara Studi dokumen
	SDM pelaksana program	▪ Tim PAMS-BWI di LPMP	Wawancara Studi dokumen

Komponen Evaluasi	Aspek yang dievaluasi	Sumber Data / Informasi	Teknik Pengumpulan Data
	Pendanaan	▪ Tim PAMS-BWI di LPMP	Wawancara
	Dukungan manajemen	▪ Tim PAMS-BWI di LPMP	Wawancara Observasi Studi dokumen
	Dukungan kinerja dari sekolah sasaran program PAMS-BWI	▪ Kepala Sekolah	Angket Wawancara Observasi Studi dokumen
		▪ Guru Model	Wawancara Studi dokumen
<b>TRANSACTIONS</b> (Proses)	Pelaksanaan Desiminasi, OJL, pendampingan dan monev PAMS-BWI	▪ Tim PAMS-BWI di LPMP ▪ Kepala Sekolah dan Guru model, pengawas	Angket Wawancara Studi dokumen
	Pelaksanaan Standar Penilaian di sekolah sasaran program PAMS-BWI	▪ Tim PAMS-BWI di LPMP ▪ Kepala Sekolah dan Guru	Angket Wawancara Studi dokumen
	Pelaksanaan Standar Pengelolaan di sekolah-sekolah sasaran program PAMS-BWI	▪ Kepala Sekolah ▪ Guru ▪ Siswa	Angket Wawancara Studi dokumen Observasi

Komponen Evaluasi	Aspek yang dievaluasi	Sumber Data / Informasi	Teknik Pengumpulan Data
<b>OUTCOMES</b> (Keluaran)	Kompetensi Lulusan (SKL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim PAMS-BWI dari sekolah</li> </ul>	Wawancara Studi dokumen
	Pencapai prestasi Siswa, guru dan mutu sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala Sekolah</li> <li>▪ Guru model</li> <li>▪ Siswa di sekolah sasaran</li> <li>▪ Tim PAMS-BWI dari LPMP</li> </ul>	Angket Wawancara Studi dokumen Observasi

## 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.

Maksud diadakan wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan

pribadi.<sup>8</sup> Pertanyaan yang disampaikan berhubungan dengan komponen evaluasi.

Sebagai alat atau instrumen wawancara, digunakan pedoman wawancara. Pedoman memuat sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta jawaban atau respon dari responden. Isi dari pertanyaan atau pernyataan bisa meliputi fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi atau evaluasi responden berkaitan dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini pewawancara adalah peneliti, sementara responden terdiri dari: Kepala LPMP, Ketua Program PAMS-BWI, tenaga pendamping/widyaswara, guru model, pengawas dinas pendidikan dan siswa sekolah sasaran yang mendapat perlakuan program PAMS-BWI di Cianjur dan Banjar yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Pedoman wawancara memuat garis-garis besar yang akan ditanyakan kepada responden yang berkaitan dengan data untuk dijadikan dasar penelitian.

## **2. Observasi**

Untuk mendapatkan data yang objektif maka dilakukan observasi langsung ke lokasi penelitian. Observasi digunakan untuk menilai hasil

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2007), h. 72

<sup>9</sup> Sukmadinata, *op. cit.*, h. 216

Program Akselerasi Mutu Sekolah (PAMS-BWI) melalui proses pendampingan widyaiswara di sekolah-sekolah sasaran.

Hasil observasi merupakan deskripsi yang faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan yang terjadi di lapangan dimana kegiatan program itu dilaksanakan. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen, format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku, berisi tentang pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan dengan komponen evaluasi, peneliti menggunakan model *check list*. Kekuatan data hasil observasi terletak pada objektivitas dan ketelitian dari keadaan atau kejadian yang dicatat dalam foto.

### **3. Dokumentasi atau Studi Dokumen**

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat berharga, dokumen yang berhubungan dengan lokasi penelitian.

Dokumentasi merupakan bagian yang dapat mendukung dalam proses mengungkapkan dan mendeskripsikan hasil penelitian dan menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, sehingga hasil penelitian lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen. Dokumentasi yang dikumpulkan yaitu dokumen yang berhubungan dengan program PAMS-BWI di lokasi penelitian. Dalam

menggunakan metode dokumentasi peneliti menggunakan model *check list* untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Dokumentasi yang sudah ada akan digunakan untuk mempertajam analisis hasil penelitian.

#### **4. Angket atau Kuesioner**

Angket atau kuesioner adalah pertanyaan yang didistribusikan melalui pos untuk diisi dan dapat dikembalikan atau dapat juga dijawab dibawah pengawasan peneliti.<sup>10</sup> Kuesioner berisi daftar pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau diisi oleh responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus berdasarkan pada komponen dan indikator evaluasi yang bersangkutan. Namun kelemahannya adalah kemungkinan jawaban yang diberikan responden tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Angket disebarakan kepada orang-orang kunci yang terlibat dalam PAMS-BWI. Untuk memudahkan dalam pengisiannya, digunakan angket tertutup dan responden diminta untuk memilih salah satu dari beberapa jawaban yang telah disiapkan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan selesai pengumpulan data dalam

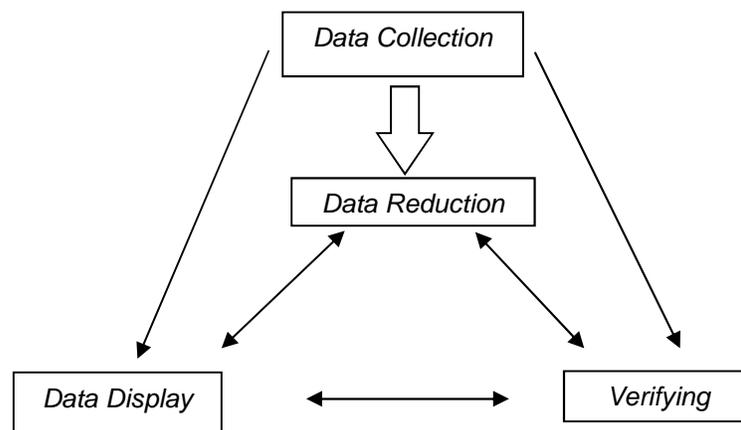
---

<sup>10</sup> Sugiyono, *op. cit.*, h. 232

periode tertentu.<sup>11</sup> Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, hingga data dianggap kredibel.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan atau proses yang terjadi secara bersamaan yakni: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>12</sup> Evaluasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan prosedur evaluasi yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi kata-kata tertulis atau lisan dari fakta yang diamati.

Analisis data pada penelitian evaluasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Model Analisis Data

<sup>11</sup> Sugiyono, *op.cit.*, h. 246

<sup>12</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi* (Jakarta: UI Press, 2009), hh.15-20

Teknik analisis data pada penelitian ini sebagaimana digambarkan di atas dapat dijelaskan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan ini akan terus menerus bertambah dan akan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisis sejak awal. Untuk itu perlu adanya reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemulihan, penyederhanaan, transformasi data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber. Data tersebut dikelompokkan ke dalam data yang lebih penting, yang bermakna, relevan dan fokus pada persoalan untuk memecahkan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Data yang sudah disederhanakan tersebut kemudian disusun secara sistematis dengan menonjolkan hal-hal yang penting tentang hasil, temuan serta maknanya.

Dengan reduksi hasil pengkajian diharapkan dapat menjadi lebih jelas. Proses reduksi data dilakukan terus menerus selama proses pengumpulan data berlangsung. Dalam penelitian ini reduksi data yang dilakukan oleh peneliti ialah merangkum, menajamkan, mengarahkan, mengorganisasi data, mengambil data yang pokok dan penting, sehingga data tersusun secara sistematis dan memudahkan untuk penarikan kesimpulan.

## 2. Penyajian Data

*Display* data dari hasil analisis dapat berupa penjelasan rinci para informan sesuai dengan ungkapan atau pandangan mereka apa adanya tanpa ada komentar, evaluasi dan interpretasi.<sup>13</sup> Penyajian data penelitian kualitatif pada prinsipnya berproses dalam bentuk induktif-interpretasi-konseptualisasi yaitu kutipan langsung pandangan responden perlu disajikan dalam bahasan atau kalimat mereka.

Setelah data direduksi dan tersusun dengan baik kemudian untuk supaya mempermudah permasalahan dilakukan pengelompokkan dan disesuaikan dengan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan pada masing-masing tahapan *antecedents*, *transactions* dan *outcomes*. Setiap komponen yang dievaluasi disesuaikan dengan dengan kriteria yang telah dirumuskan atas dasar pencapaian tujuan program dan kesesuaian dengan standar objektif dari hasil penelitian.

*Display* data berfungsi untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini, data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk grafik, tabel, dan teks naratif.

## 3. Pengambilan Kesimpulan dan verifikasi data

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara

---

<sup>13</sup> Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang, Universitas Muhamadyah, 2004), h.83

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dalam penelitian ini, verifikasi data merupakan upaya untuk memaknai data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul. Dalam proses ini dilakukan proses interpretasi data dengan melakukan sintesis terhadap data yang telah dikumpulkan sambil terus melakukan proses verifikasi terhadap kesimpulan yang telah dibuat secara tentatif, yang kemudian dapat dirumuskan kesimpulan yang lebih tepat. Kesimpulan akhir akan menjadi suatu rekomendasi dan keputusan dari penelitian pelaksanaan PAMS-BWI.

### **G. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pada penelitian ini akan diperoleh data hasil kajian yang perlu dicek kebenarannya dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Selanjutnya Sugiyono menyatakan bahwa dalam pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik dapat diartikan bahwa peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, sedangkan

triangulasi sumber diartikan bahwa untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.<sup>14</sup>

Untuk mempertajam analisis dan meningkatkan kredibilitas hasil yang diperoleh, maka evaluator harus melakukan triangulasi, baik triangulasi data maupun triangulasi sumber.<sup>15</sup> Artinya data yang sama akan lebih valid kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang tersedia.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *op. cit.*, h. 30

<sup>15</sup> Arikunto, dan Abdul Jabar, *op. cit.*, h. 167.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian terhadap program akselerasi mutu sekolah berwawasan internasional (PAMS-BWI) di LPMP Jawa Barat untuk mengetahui efektifitas atau ketercapaian tujuan program berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditentukan berdasarkan model *Countenance Stake* dengan meninjau tiga aspek, yaitu: (1) evaluasi *antecedent*; (2) evaluasi *transactions*, dan (3) evaluasi *outcomes*.

Namun demikian sebelum dideskripsikan hasil-hasil penelitian pada setiap aspek-aspek evaluasinya, berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai karakteristik program akselerasi mutu sekolah berwawasan internasional (PAMS-BWI) berdasarkan studi dokumen dan hasil observasi di lapangan.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat dalam salah satu kegiatan PAMS-BWI melakukan kegiatan pendampingan ke sekolah-sekolah sasaran di kabupaten Cianjur dan Kota Banjar. Kegiatan pendampingan tersebut adalah berbentuk *coaching and mentoring* terhadap sekolah sasaran untuk membantu pencapaian tujuan dan indikator program. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan pendampingan dapat dipandang

sebagai esensi utama perlakuan program dari serangkaian kegiatan PAMS Berwawasan Internasional sepanjang tahun 2015.

Sekolah PAMS-BWI memiliki karakteristik keunggulan yang ditunjukkan dengan prestasi dan perilaku peserta didik yang baik dan teruji dalam berbagai aspek. Sekolah diharapkan menghasilkan lulusan yang mampu menempatkan dirinya pada era tantangan global dalam berbagai bentuknya. Oleh karena itu peserta didik perlu dibekali dengan moralitas yang kuat agar mempunyai pijakan/landasan yang kuat dalam menentukan sikapnya di masa depan.

#### **A. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN EVALUASI**

Hasil penelitian ini secara umum melaporkan data dan informasi hasil kajian dokumentasi, kepustakaan, observasi, wawancara dan grup diskusi (*group discussion*) dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program akselerasi mutu sekolah berwawasan internasional (PAMS-BWI).

Berkenaan dengan apa yang dikemukakan diatas, hasil penelitian ini melaporkan hal-hal sebagai berikut :

## I. EVALUASI ANTECEDENTS (MASUKAN)

Komponen masukan mengungkapkan kesiapan beberapa aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan PAMS-BWI di LPMP Jawa Barat.

Aspek-aspek penelitian evaluasi pada komponen *antecedents* adalah :

### 1. Landasan Formal Penggunaan Program PAMS-BWI

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses penjaminan mutu pendidikan di Tingkat Propinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) harus mampu menjadi mitra utama Pemerintah Daerah dalam melakukan setiap upaya penjaminan mutu pendidikan. Dalam menjalankan peran dan fungsinya LPMP harus dapat memastikan ketersediaan layanan penjaminan mutu bagi setiap stakeholders di tingkat propinsi. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 37 tahun 2012 maupun Permendikbud Nomor 16 tahun 2013 menuntut LPMP untuk menyelenggarakan fungsi supervisi dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu fungsi layanan penjaminan mutu pendidikan untuk satuan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, LPMP Jawa Barat sejak tahun 2011 telah mengembangkan model Program Akselerasi Mutu Sekolah (PAMS) di Kabupaten Cianjur dan Kota Banjar, sebagai bentuk pengembangan tupoksinya. Sampai tahun 2013 PAMS telah menghasilkan sekolah yang

telah mencapai Standar Nasional Pendidikan dan sebagai bentuk keberlanjutan program, maka mulai tahun 2014 terjadi penambahan tujuan agar sekolah-sekolah sasaran PAMS mencapai SNP plus yaitu memiliki wawasan keinternasionalan. Sehingga nama program menjadi PAMS Berwawasan Internasional (PAMS-BWI).

Berdasarkan dokumen dan hasil wawancara dan yang diperoleh dari pejabat atau ketua tim pengelola PAMS-BWI dan tim inti, diketahui bahwa landasan formal dilaksanakannya program ini adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Dasar 1945, amandemen ke-4, Pasal 31 tentang Pendidikan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UGD)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikbud nomor 37 tahun 2012
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Sekolah PAMS-BWI merupakan sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan indikator-indikator tambahan lain, dengan mengadaptasi beberapa karakteristik sekolah/madrasah bertaraf internasional yang sebelumnya telah dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007. Pada sekolah bertaraf internasional, acuan yang digunakan adalah salah satu negara anggota *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)* dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional. Acuan yang disusun oleh sekolah bertaraf internasional tersebut kemudian diadaptasi dan disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kebutuhan sekolah yang akan diproses menjadi sekolah program akselerasi mutu sekolah (PAMS-BWI). Pada prinsipnya, sekolah PAMS-BWI harus bisa memberikan jaminan mutu pendidikan dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan tetap mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang ada.

Esensi dari rumusan konsepsi Sekolah PAMS-BWI tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sekolah PAMS yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan yaitu sekolah yang sudah melaksanakan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kepala sekolah, dan standar penilaian.
- b. Diperkaya dengan mengacu pada standard Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional, yang kemudian diadaptasi dan disesuaikan dengan kondisi sekolah.

Sekolah PAMS-BWI harus mencapai standard mutu yang terkandung dalam indikator kinerja kunci minimal (IKKM) dan indikator kinerja kunci tambahan (IKKT). Ringkasan mengenai pengembangan mutu dalam bentuk IKKM dan IKKT tergambar dalam indikator dan kriteria evaluasi.

Dari hasil wawancara dengan ketua pengelola tim PAMS-BWI dapat diketahui akan adanya kebutuhan penguatan dasar hukum mengenai alokasi anggaran belanja di daerah kabupaten/kota secara sah dan proporsional guna menunjang kelancaran program PAMS-BWI, mengingat selama program berjalan kebutuhan mobilitas sangat tinggi. Terlebih lagi pada kegiatan pendampingan dan *sister school* yang melibatkan banyak pihak dan tempat, sementara dari pihak sekolah sasaran tidak memiliki alokasi dana khusus untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Seperti pada umumnya dalam sebuah acara, biaya konsumsi dan transportasi menjadi kebutuhan standar

minimal, oleh karenanya diperlukan alokasi anggaran di sekolah untuk kegiatan tersebut supaya berlangsung lebih efektif.

Dengan adanya legalitas hukum yang kuat, manajemen sekolah sasaran akan memiliki keleluasaan dalam hal mendukung program kegiatan secara maksimal, terutama dana/finansial. Untuk itu diperlukan payung hukum tambahan atau bahkan undang-undang yang direvisi untuk dimunculkannya sebuah peraturan baru terkait PAMS-BWI dengan kewenangan para Pengawas Dinas Pendidikan kabupaten kota secara penuh dalam hal tugas dan tanggung jawab di sekolah sasaran atau binaannya..

## **2. Proses Sosialisasi Program PAMS-BWI**

Sebagai program baru PAMS-BWI perlu disosialisasikan kepada pemangku kepentingan khususnya tim pengembang di sekolah sasaran, pengawas, dan pegawai dinas pendidikan kabupaten kota yang diharapkan dapat mendiseminasikan program tersebut ke sekolah-sekolah lain di luar sekolah sasaran.

Kegiatan sosialisasi difasilitasi oleh LPMP Jawa Barat selaku pihak pelaksana program dengan secara berjenjang melakukan workshop, koordinasi, dan seminar. Kegiatan ini penting sebagai upaya untuk menyamakan persepsi para *stakeholders*, seperti apa yang disampaikan dan

diperkuat oleh pernyataan salah satu widyaiswara di tim inti PAMS-BWI bahwa :

*"Sosialisasi program PAMS-BWI diawali dengan sosialisasi dari narasumber pusat atau juga pakar pendidikan perguruan tinggi kepada para kepala sekolah, pengawas atau pejabat struktural, kemudian sekolah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim pengembang PAMS-BWI di sekolah dan juga guru".*

Adapun guru melakukan proses sosialisasi kepada siswa di kelas mengenai rencana proses pembelajaran yang akan dilakukan selama satu tahun untuk mendukung program PAMS-BWI ini.

Dari catatan studi dokumen berkas kegiatan-kegiatan sosialisasi yang berhasil dihimpun, terlapor bahwa pada Tahap ke-2 PAMS-BWI yakni tanggal 8-9 April 2015 telah dilakukan pemantauan keterlaksanaan rencana tindak lanjut (RTL) pengawas di sekolah-sekolah sasaran diseminasi PAMS dan juga keberlanjutan PAMS di sekolah-sekolah pasca-PAMS. Kemudian dilakukan pula workshop koordinasi pada tanggal 21 April 2015 yang menjelaskan bagaimana mekanisme PAMS BWI 2015 dan menyusun RTL dinas, pengawas dan sekolah.

Bentuk sosialisasi lain dalam rangka memperkenalkan program baru dalam PAMS-BWI ini adalah workshop bagi pengawas dan kepala sekolah pada 27-30 Mei 2015. Pada tahapan tersebut, dilakukan pengumpulan

laporan kemajuan kegiatan RTL (hasil EDS, PKG/PKKS) guna memperkuat kompetensi kepala sekolah dan pengawas, juga menyusun RTL implementasi PAMS-BWI. Masing-masing sekolah sasaran diwakili oleh Kepala Sekolah, pengawas dan pejabat struktural dinas pendidikan kabupaten kota. Terdapat pula kegiatan workshop bagi guru yang dilangsungkan tanggal 20–23 September 2015, dengan tujuan untuk memperkuat kompetensi guru dalam penilaian pembelajaran, menjelaskan mekanisme PAMS BWI 2015, dan menyusun RTL implementasi PAMS-BWI. Dalam acara ini dari setiap sekolah sasaran diwakili oleh 2 orang guru mata pelajaran matematika dan IPA beserta pengawas dinas yang menjadi pembina sekolah tersebut. Bahkan untuk memperkuat materi berwawasan internasionalnya telah dihadirkan narasumber yang berasal dari Puspendik (TIMSS/PISA) kemdikbud pusat.

Sosialisasi dan pelatihan terhadap seluruh guru, pengawas dan dinas kabupaten kota dilaksanakan pada awal pelaksanaan program PAMS-BWI. Kendala yang dihadapi menurut pernyataan widyaiswara dalam wawancaranya, diketahui bahwa seringkali terjadi inkonsistensi dalam hal penunjukkan personal yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Hal ini diperkuat juga oleh pernyataan dari guru-guru inti di sekolah-sekolah sasaran yang seringkali mengeluhkan tidak sinambung atau tidak ada keberlanjutan untuk mengikuti tahapan-tahapan lain dalam PAMS-BWI

karena harus berganti personal. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut ini :

*“Sayangnya terkadang penunjukkan guru yang dikirim untuk mengikuti kegiatan kelanjutan PAMS ini suka ganti-ganti, mungkin dengan alasan pemerataan kesempatan diklat, tapi sebenarnya malah jadi nggak konsisten, nggak kontinyu programnya” (Guru model di sekolah sasaran)*

Bahkan penunjukkan perwakilan struktural maupun fungsional seperti pengawas dan pegawai dinas pendidikan kabupaten kota terkadang bukanlah berasal dari orang yang memiliki kapasitas untuk membuat keputusan. Hal ini mengakibatkan keputusan dalam membuat kebijakan terutama terkait dengan dukungan dana terhadap PAMS-BWI menjadi tidak tuntas.

Sosialisasi PAMS-BWI ini pula masih kurang didiseminasikan ke sekolah-sekolah di luar *pilot project* oleh dinas pendidikan kabupaten/kota terutama oleh pengawas yang menjadi ujung tombak proses penjaminan mutu pendidikan di tingkat daerah. Pentingnya kesadaran akan peran, fungsi dan tanggung jawab pengawas amat diperlukan dalam rangka mensosialisasikan program akselerasi mutu sekolah berwawasan internasional ini.

### 3. Satuan Operasi Prosedur (SOP)

Pada pelaksanaan tugas seorang tenaga pendamping/widyaiswara dalam kegiatan PAMS-BWI tentunya sudah memiliki tata cara dan aturan yang sudah ditentukan. Untuk itu dibutuhkan *Standard operating procedure* (SOP) yang digunakan sebagai petunjuk kerja dalam proses kegiatannya.

Standard operating procedure (SOP) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam satu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi berjalan secara efisien, efektif, konsisten, standar dan sistematis.

Penjelasan penilaian mengenai ketersediaan SOP pada PAMS-BWI ini dapat dipahami dari hasil wawancara bersama widyaiswara berikut ini :

*"{...} untuk pelaksanaan SOP, kita ada ..dan setiap akan terjun ke lapangan biasanya kita membawa petunjuk yang harus dilakukan disana. Tapi memang kadang-kadang tidak semua personal tim mempelajari dengan baik petunjuk yang diberikan, sehingga kadang kala terjadi miskomunikasi".*

Berdasarkan cuplikan diatas dapat diketahui bahwa SOP tersedia dalam program PAMS-BWI ini, dan setiap tim kecil ditugaskan ke lapangan akan mengacu pada SOP tersebut. Namun demikian SOP yang sudah

disusun masih dalam bentuk yang kurang operasional dan kurang teknis. Untuk itu sebaiknya SOP dibuat dalam bentuk kumpulan dokumen yang dibuat berurutan dan komprehensif pada sebuah pedoman dalam bentuk buku. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya kesalahan teknis di lapangan, terutama pada saat tim kecil yang ditugaskan berasal dari personal widyaiswara yang belum pernah terlibat sama sekali dalam kegiatan PAMS-BWI.

#### **4. SDM pelaksana program**

Mengingat begitu banyak tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga pendamping/widyaiswara serta dibutuhkannya kesabaran dan ketelatenan dalam menjalani proses pekerjaan selama di lapangan, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang memadai, terutama dalam hal pedagogik. Dengan jadwal yang begitu ketat dan intensif dibutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari kegiatan sosialisasi, workshop, OJL, pendampingan, seminar sampai dengan monev.

Kendala yang dihadapi pihak LPMP sebagai pelaksana program adalah kurangnya SDM/widyaiswara yang menjadi tenaga pendamping pada saat jadwal pelaksanaan berlangsung secara serentak. Hal ini dikarenakan pada saat yang sama seluruh tenaga pendamping secara paralel tersebar ke seluruh sekolah-sekolah sasaran di tempat yang berbeda. Untuk setiap

sekolah sasaran akan didampingi oleh 3 orang tenaga pendamping dari LPMP, bahkan tidak semuanya merupakan personal inti dari tim PAMS-BWI, melainkan dari staf administrasi, fungsional maupun struktural.

Selain itu terdapat masalah lain yang cukup strategis yang perlu menjadi perhatian manajemen dan harus diatasi secara periodik yaitu terkait dengan standarisasi kompetensi widyaiswara. Sebagai tenaga pendamping yang harus terjun ke lapangan, tidaklah bisa dipungkiri wawasan, pengetahuan dan keterampilan seorang widyaiswara/tenaga pendamping tentunya berbeda-beda, terutama ketika menghadapi suatu permasalahan yang kompleks. Kadang terjadi misinterpretasi dan mispersepsi terhadap suatu konsep dan materi PAMS-BWI yang harus disampaikan, tentunya ini menyebabkan tidak seragamnya *treatment* yang diberlakukan kepada sekolah-sekolah sasaran yang dituju sehingga apa yang ingin dicapai menjadi kurang efektif dan kurang tepat sasaran.

## **5. Pendanaan program**

Pembiayaan atau dana adalah faktor utama untuk menjalankan sebuah program dalam sebuah institusi. Biaya operasi dalam sebuah institusi diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi agar dapat berlangsung kegiatan program secara teratur dan berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara dengan ketua tim *ad hoc* PAMS-BWI dan tim inti diketahui sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraan program sepenuhnya bergantung pada anggaran yang asalnya dari pusat.

Seperti pernyataan ketua tim inti yang juga seorang widyaiswara, "Sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraan PAMS-BWI sepenuhnya berasal dari Kemendikbud... sebenarnya sih untuk dana tidak terlalu masalah juga ya..karena anggaran dari pemerintah sebenarnya cukup dan waktu pencairan waktu tahun tahun awal tdk terlalu mengganggu skedul.....baru tahun kemarin saja waktu tahun 2015 ada keterlambatan luar biasa sehingga kami disini jadi terlambat semua kegiatannya, tapi tidak hanya PAMS saja sih, ternyata juga program kegiatan yang lain yang juga milik kemdikbud juga sama. Akhirnya kegiatan PAMS ini jadi sangat terlambat dan tentunya berpengaruh juga sama kegiatan kita di sekolah sasaran" (wawancara, Ketua Tim , Dr. Dida Hamidah, M.Si, 23 Kamis Juni 2016).

Namun demikian Tim PAMS-BWI tidak dapat dijadikan sebagai unit kerja di LPMP yang berdiri khusus dan terpisah menjadi organisasi sendiri dikarenakan program ini merupakan bagian dari program pusat dan juga dianggap sebagai bagian dari pekerjaan rutin harian, sehingga secara legal tidak dibuatkan Surat Keputusan (SK) tersendiri dalam hal struktur organisasinya. Tentunya ini berpengaruh juga terhadap tidak berlakunya honor sebagai kompensasi hasil kerja, kecuali untuk keperluan di lapangan yang memang membutuhkan biaya operasional.

Dampak kebijakan tersebut mempengaruhi terhadap motivasi kerja dan kerjasama tim untuk sebagian personal tim tertentu .

## **6. Dukungan Manajemen**

Keterlaksanaan kegiatan PAMS-BWI sangat ditentukan oleh adanya dukungan dari pimpinan manajemen dan tim inti. Tugas pokok tim PAMS-BWI adalah terlaksananya program dan berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Kesimpulan yang didapat dari evaluasi tentang manajemen Tim *Adhoc* dalam melaksanakan dan memantau kegiatan PAMS-BWI secara umum sudah sangat baik.

Dalam hal ini Kepala LPMP yang menggagas program, tim Inti dan widyaiswara beserta tim pengembang di sekolah sasaran secara kompak bersama-sama melaksanakan kegiatan PAMS-BWI untuk mencapai visi dan misi sekolah. Dari hasil wawancara dengan ketua tim *adhoc* dan tim inti dalam sebuah *focus group discussion* (FGD) diketahui bahwa karena program ini digagas dan dibidani oleh LPMP Jawa Barat sendiri, terlebih lagi menjadi program unggulan satu-satunya di Indonesia, maka dukungan dari pimpinan manajemen dan juga jajaran tim widyaiswara yang menjadi tim inti, menjadikan PAMS-BWI sebagai kebanggaan bagi warga LPMP Jawa Barat. Tentunya ini menjadi peluang besar untuk LPMP Jabar untuk menjadikan program PAMS-BWI sebagai *Role Model* atau percontohan bagi program-

program serupa yang saat ini juga dikembangkan oleh kemdikbud dengan nama program lain dalam ruang lingkup nasional.

Dukungan manajemen LPMP terhadap pelaksanaan PAMS-BWI juga dapat diketahui dengan terlihatnya kinerja seluruh staf ketenagaan di LPMP. Dari data dokumentasi terkait daftar hadir para tenaga pendamping dalam kegiatan PAMS ini mencapai lebih dari 90%. Adapun absensi sisanya pada umumnya disebabkan oleh adanya bentrok jadwal dengan program lain di LPMP atau memang berhalangan karena mendapat tugas dari manajemen. Apabila dalam sebuah kegiatan seperti pendampingan atau monev terdapat personal yang berhalangan ikut dalam kegiatan lapang tersebut, biasanya manajemen tim PAMS-BWI sudah menyiapkan personal cadangan, tanpa harus mengganggu keberlangsungan acara sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pembatalan jadwal atau kekosongan aktifitas PAMS-BWI di sekolah-sekolah sasaran.

## **7. Dukungan Kinerja dari Sekolah Sasaran**

Di tingkat sekolah yang menjadi sasaran program, tindak lanjut implementasi PAMS-BWI dilakukan dengan membuat komitmen antara tim pengelola PAMS-BWI dengan kepala sekolah agar mampu mewujudkan sekolah yang bermutu dan berwawasan internasional sesuai dengan cita-cita program. Sebelum PAMS-BWI diluncurkan, kegiatan PAMS tahap pertama (2011-2013) memilih *Pilot Project* 15 sekolah jenjang SMP dengan status

RSBI, SSN dan RSSN. LPMP Jawa Barat merekomendasikan Kabupaten Cianjur dan Kota Banjar sebagai sasaran kegiatan PAMS, dengan usulan nama-nama sekolah adalah sebagai berikut : 1) SMPN 1 Cianjur; 2) SMPN 3 Cianjur; 3) SMP Pasundan Cianjur; 4) SMP Al Azhar 20; 5) SMPN 1 Cipanas; 6) SMPN 2 Cipanas; 7) SMPS Mardiyuana Cipanas 8) SMPN 1 Cugenang; 9) SMPN 2 Cugenang; 10) SMPN 3 Cugenang; 11) SMPN 1 Banjar; 12) SMPN 2 Banjar; 13) SMPN 3 Banjar; 14) SMPN 4 Banjar dan 15) SMPN 7 Banjar

Program PAMS-BWI ditujukan untuk membantu sekolah yang telah mengikuti *Pilot Project* PAMS sampai Tahun 2013 dan dinyatakan sebagai Rintisan Sekolah Standar Nasional (SSN) agar mampu mencapai kesetaraan standar internasional. Untuk itu sebelum PAMS-BWI diterapkan LPMP Jawa Barat telah terlebih dahulu menyelenggarakan *short course* dalam rangka menambah wawasan mengenai pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional.

Pengertian Sekolah berwawasan internasional dalam PAMS-BWI yang dimaksud disini adalah bukan berarti sekolah sasaran program harus menggunakan pengantar berbahasa Inggris seperti halnya sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dulu, melainkan siswa dikondisikan sikap dan mentalnya selama di lingkungan sekolah untuk lebih mampu berkomunikasi berbahasa Inggris sesuai kebutuhan dan dapat bersaing pada taraf internasional.

Salah satu upaya mewujudkan sekolah berwawasan internasional adalah dengan melaksanakan program Rintisan *Sister School* yang telah dimulai pada tahun 2015. Maksud dari kegiatan Rintisan *Sister School* ini adalah memberikan pengalaman bagi guru-guru sesama sekolah sasaran PAMS-BWI agar dapat berbagi *Best Practices* dalam proses pembelajaran di kelas yang dipadukan dengan penerapan *Lesson Study* sesuai dengan tujuan program.

Sekolah PAMS-BWI (Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional) merupakan sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (8 SNP sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013) dan diperkaya dengan indikator-indikator tambahan lain, dengan mengadaptasi beberapa karakteristik sekolah/madrasah bertaraf internasional yang sebelumnya telah dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007. Secara khusus sekolah yang sudah menerapkan program tersebut adalah sekolah-sekolah yang sudah masuk dalam katagori sekolah standar nasional (SSN). Adapun yang menjadi sasaran program kegiatan PAMS-BWI ini adalah sekolah sasaran PAMS sebelumnya yang telah terverifikasi rintisan SSN atau telah memperoleh status SSN (memenuhi SI, Standar Proses, SKL, Standar Pendidik dan Kepala Sekolah, & Standar Penilaian). Sekolah-sekolah yang menjadi sasaran PAMS-BWI tersebut adalah :

Tabel 4.1. Nama sekolah-sekolah sasaran PAMS-BWI

No.	Sekolah Sasaran PAMS-BWI	Kode Sekolah	Wilayah
1.	SMPN 1 Cipanas	C1	Kab. Cianjur
2.	SMPN 2 Cipanas	C2	Kab. Cianjur
3.	SMPN 1 Cugenang	CG1	Kab. Cianjur
4.	SMP Al Azhar	ALZ	Kab. Cianjur
5.	SMPN 3 Cianjur	CJ3	Kab. Cianjur
6.	SMPN 3 Cugenang	CG3	Kab. Cianjur
7.	SMPN 1 Banjar	B1	Kota Banjar
8.	SMPN 2 Banjar	B2	Kota Banjar

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi dan wawancara, maka dapat dilihat kondisi akhir yang dicapai oleh sekolah-sekolah sasaran pada setiap aspek dan kriteria evaluasi seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.2.

**a. Berakreditasi minimal A**

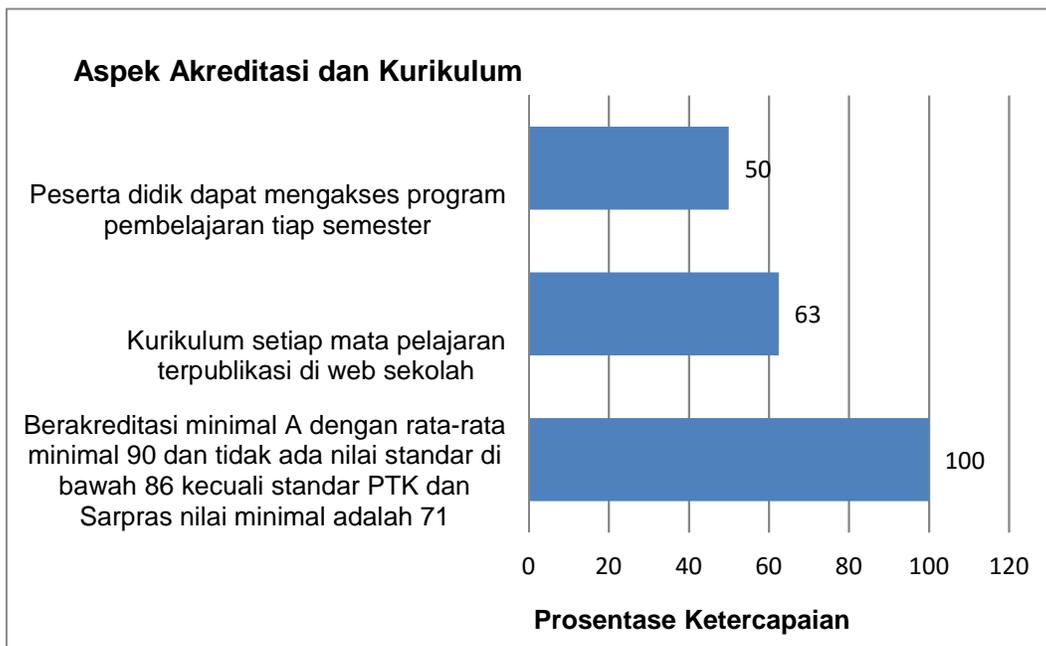
Pengembangan PAMS Berwawasan Internasional diarahkan dengan keberhasilan memperoleh akreditasi yang sangat baik. Akreditasi menentukan kelayakan program pendidikan dan/atau satuan pendidikan itu sendiri. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja

kunci minimal, yaitu perolehan sertifikat akreditasi minimal "predikat A" dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

Tabel 4.2 Ketercapaian kriteria evaluasi pada dukungan kinerja sekolah

No.	Aspek Evaluasi	Kriteria Evaluasi	ALZ	B1	B2	C1	C2	CG1	CG3	CJ3
1.	Akreditasi	Berakreditasi minimal A dengan rata-rata minimal 90 dan tidak ada nilai standar di bawah 86 kecuali standar PTK dan Sarpras nilai minimal adalah 71	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kurikulum/SKL	Kurikulum setiap mata pelajaran terpublikasi di web sekolah	0	0			0		0	0
		Peserta didik dapat mengakses program pembelajaran tiap semester	0				0	0		0

Perolehan "predikat A" pada setiap periode akreditasi berarti sekolah setiap saat selalu menunjukkan keunggulan kinerja yang sangat baik dan sekaligus merupakan pengakuan terhadap kemampuan Sekolah/Madrasah untuk melakukan pengembangan mutu secara optimal.



Gambar 4.1. Prosentase ketercapaian aspek akreditasi dan kurikulum

Selain itu, keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan, yaitu hasil akreditasi BAN S/M "predikat A" dengan rata-rata nilai minimal 90 dan tidak ada nilai standar di bawah 86. Namun demikian dikarenakan PAMS Berwawasan Internasional tidak melakukan

penguatan secara langsung terhadap standar sarpras, maka kepadanya diperkenankan memperoleh capaian minimal 71.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari studi dokumentasi dan wawancara dapat diketahui bahwa seluruh sekolah sasaran PAMS-BWI sudah mencapai nilai akreditasi dengan predikat A, yaitu 100%, khusus SMPN 3 Cugenang kembali diperoleh pada tahun 2015 dengan hasil yang lebih memuaskan.

#### **a. Menerapkan kurikulum yang berlaku dan memenuhi standar isi**

Mutu setiap sekolah perlu dijamin dengan keberhasilan melaksanakan kurikulum secara tuntas. Kurikulum merupakan acuan dalam menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.

Seluruh sekolah sasaran di Kabupaten Cianjur, masih menggunakan jenis kurikulum lama KTSP. Namun demikian sosialisasi dan penguatan materi kurikulum 2013 sudah sering dimasukkan dalam program pendampingan PAMS-BWI, sehingga sikap mental, pikiran dan pengetahuan para guru lebih siap ketika kurikulum 13 dan kurikulum nasional diberlakukan secara menyeluruh.

Hal ini sejalan dengan pernyataan salah seorang widyaiswarra yang mengatakan “Salah satu keuntungan sekolah sasaran dengan mengikuti kegiatan PAMS-BWI ini adalah kita terbiasa dalam setiap kesempatan pendampingan terutama waktu menerapkan *lesson study* selalu disisipkan

materi-materi yang berhubungan dengan kurtilas, jadi para guru model di sekolah sasaran sih sudah terbiasa dan familiar dengan kurtilas meskipun mereka belum dapat diklat dari pusat”.

## **b. Memenuhi standar isi sesuai PAMS-BWI**

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut.

### **b.1. Kurikulum setiap mata pelajaran terpublikasi via web sekolah.**

Maksudnya adalah Dokumen I dan Dokumen II Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang berlaku di sekolah dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Dalam Dokumen I dan Dokumen II tergambar jelas suatu upaya sekolah untuk memunculkan kebiasaan nilai-nilai universal yang harus dilakukan oleh semua warga sekolah.

Dari prosentasi ketercapaian program terlihat hampir 63% sekolah yang berhasil mempublikasikan kurikulum di web sekolah. Karena web sekolah wajib dimiliki sekolah dan menjadi salah satu persyaratan untuk mengikuti kegiatan PAMS-BWI.

Tabel 4.3 Alamat web sekolah sasaran PAMS-BWI

Nama Sekolah	Alamat Web
SMPN 1 Cugenang	<a href="http://www.smpnsatucugenang.sch.id">www.smpnsatucugenang.sch.id</a>
SMPN 3 Cugenang	<a href="http://www.smpn3cugenang.sch.id">www.smpn3cugenang.sch.id</a>
SMPN 1 Cipanas	<a href="http://www.smpn1cipanas.sch.id">www.smpn1cipanas.sch.id</a>
SMPN 2 Cipanas	<a href="http://www.smpn2cipanas.sch.id">www.smpn2cipanas.sch.id</a>
SMPN 3 Cianjur	<a href="http://www.smpnegeri3cianiur.sch.id">www.smpnegeri3cianiur.sch.id</a>
SMP Islam Al-Azhar	<a href="http://www.smpia20.sch.id">www.smpia20.sch.id</a>
SMPN 1 Banjar	<a href="http://www.smpn1banjar.sch.id">www.smpn1banjar.sch.id</a>
SMPN 2 Banjar	<a href="http://www.smpn2banjar.sch.id">www.smpn2banjar.sch.id</a>

Untuk mengelola web, tentunya memerlukan SDM atau operator yang ahli di bidang informasi dan teeknologi (IT). Untuk keperluan tersebut perlu ditunjuk penanggung jawab yang mengurus masalah sistem informasi manajemen (SIM) yang juga sekaligus menjadi operator EDS.

**b2. Peserta didik dapat mengakses program pembelajaran tiap semester.**

Hal yang dapat diakses peserta didik terkait program pembelajaran adalah mengenai waktu, materi, kegiatan tes dan perkembangan proses pembelajaran dirinya baik itu melalui web

sekolah atau *sms calling*. Untuk kepentingan akses ini, maka setiap guru dan peserta didik harus memiliki *username* dan *password* masing-masing. Demikian juga halnya pada orangtua peserta didik.

Dan ketercapaian program sampai dengan tahun 2015 sudah mencapai 50%. Dengan demikian sangat diperlukan adanya sistem terpadu di kurikulum yang sudah menggunakan web sekolah.

### **c. Memenuhi Standar Pendidik dan Kepala sekolah**

Mutu sekolah berwawasan internasional dikembangkan oleh kepala sekolah dan pendidik yang menunjukkan kinerja yang optimal sesuai dengan tugas profesionalnya. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Kepala Sekolah dan Pendidik.

Selain itu pengembangan sekolah berwawasan internasional juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan yaitu sekolah melakukan kegiatan pengembangan profesi kepala sekolah dan guru secara berkala. Hasil kegiatan pengembangan profesi tersebut kemudian diseminarkan dalam sebuah program yang telah direncanakan.

Dalam berbagai kegiatan lomba dan kompetisi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional, sekolah-sekolah sasaran PAMS-BWI menunjukkan prestasi yang cukup signifikan. Berbagai kejuaraan dan penghargaan diperoleh, tidak hanya oleh siswa tetapi juga guru dan kepala



No.	Aspek Evaluasi	Kriteria Evaluasi	ALZ	B1	B2	C1	C2	CG1	CG3	CJ3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembelajaran memungkinkan dilakukan lewat fasilitas internet (<i>e-learning</i>)</li> </ul>	0	0		0				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Memungkinkan terjadinya kesetaraan gender</li> </ul>								
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan <i>Lesson Study</i> sebagai bagian peningkatan mutu proses pembelajaran. <i>Lesson Study</i> yang dikembangkan adalah berbasis saintifik</li> </ul>	0	0	0				0	0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembelajaran mengakomodir peserta didik berkebutuhan khusus</li> </ul>						0		

No.	Aspek Evaluasi	Kriteria Evaluasi	ALZ	B1	B2	C1	C2	CG1	CG3	CJ3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembelajaran mengaktifkan proses konseling</li> </ul>			0				0	0
2.	Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil penilaian dimuat di web sekolah dan dapat diakses secara individual</li> </ul>	0		0	0				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Soal-soal pengukuran kompetensi yang ada di sekolah setara dengan soal TIMSS/PISA, NAPLAN atau olimpiade</li> </ul>	0	0	0		0			
3.	Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>RKS dapat diakses di web sekolah</li> </ul>		0					0	0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana BOS dipublikasikan di web sekolah</li> </ul>								
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan kultur local dan</li> </ul>		0	0			0	0	

No.	Aspek Evaluasi	Kriteria Evaluasi	ALZ	B1	B2	C1	C2	CG1	CG3	CJ3
		global								
		• Bebas narkoba dan rokok							0	0
		• Bebas kekerasan ( <i>bullying</i> )							0	0

**a. Proses Workshop, On The Job Learning (OJL), Seminar, Pendampingan dan Monev dilaksanakan di sekolah-sekolah sasaran**

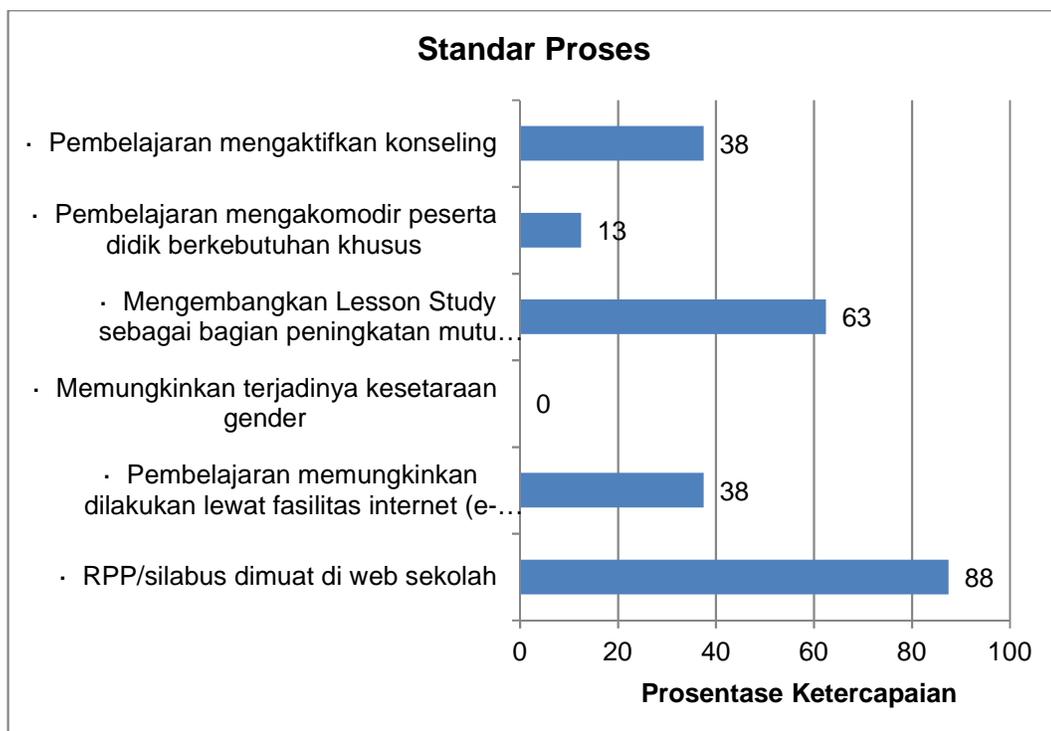
Kegiatan tersebut membutuhkan kehadiran pihak-pihak yang terlibat dalam komitmen pelaksanaan PAMS-BWI. Komitmen guru-guru di sekolah sasaran perlu terus ditingkatkan demi keberhasilan program ini. Demikian juga pengawas dinas pendidikan sangat diperlukan kehadirannya untuk dapat memantau keberlanjutan program PAMS-BWI.

Berdasarkan hasil wawancara dan dibuktikan dengan dokumen yang diperoleh, dapat diketahui hasil yang dicapai kegiatan ini diantaranya bahwa : (1) sebagian besar IKKM dan IKKT sudah terlaksana, (2) soal HOTS mata pelajaran IPA dan Matematika belum memenuhi kriteria soal HOTS, (3) Program SBL sudah terlaksana

dengan baik, (4) Web sekolah sudah baik namun masih perlu dilengkapi dalam hal materi pelajaran yang lain dan hasil penilaian,

Pelaksanaan monitoring OJL Kepala Sekolah dan Guru di SMPN 1 Cipanas Kab. Cianjur tanggal 13 -14 November 2015 berjalan dengan lancar. Namun demikian kegiatan monev ini seharusnya dilakukan lebih awal. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 terdapat keterlambatan pencairan dana PAMS-BWI untuk seluruh kegiatan yang berhubungan dengan anggaran pemerintah.

#### b. Melakukan standar proses sesuai program PAMS-BWI



Gambar 4.2. Prosentase ketercapaian aspek standar proses

### **b.1 RPP/silabus dimuat di web sekolah dan dapat diakses dengan mudah**

Semua guru memiliki silabus dan RPP sesuai acuan yang berlaku. Silabus/RPP yang dibuat haruslah mengakomodir pembelajaran *high order thinking skill* (HOTS) dengan pendekatan *problem based learning, project based learning, dan discovery learning*. Silabus dan RPP yang diunggah di web sekolah sudah mencakup administrasi untuk satu semester pada tahun ajaran berjalan.

Silabus dari RPP yang sudah diunggah dapat direvisi dan diunggah ulang setelah verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi memungkinkan dilakukan secara *online*. Oleh karenanya, melalui silabus dan RPP terbuka untuk dikomentari oleh pihak lain baik *itu* melalui online maupun non online. Dan Silabus dan RPP dapat diunduh oleh berbagai pemangku kepentingan

### **b.2 Pembelajaran memungkinkan dilakukan lewat fasilitas internet (e-learning)**

Fasilitas internet digunakan minimal dalam mengakses materi pembelajaran, memberi atau memberi tugas dan atau melakukan pembelajaran *on line chatting*. Pembelajaran berbasis internet ini minimal dilakukan oleh 50% guru mata pelajaran. Dan

yang tidak kalah penting lagi adalah web sekolah dapat diakses setiap waktu, jangan sampai di sebuah sekolah web yang dimiliki tidak termanfaatkan baik

### **b.3 Kesetaraan gender dalam proses pembelajaran sudah diterapkan**

Diskriminasi antara peserta didik laki-laki dan perempuan di sekolah berwawasan internasional harus benar-benar ditiadakan. Sekolah harus benar-benar memastikan bahwa peserta didik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri.

Namun demikian meski sekolah sasaran PAMS-BWI untuk point kesetaraan gender tidak menjadikan kriteria ini sebagai target prioritas, dalam prakteknya kehidupan di Indonesia selalu memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada perempuan untuk maju

### **b.4 Lesson study yang dikembangkan adalah berbasis saintifik.**

Terdapat aturan dalam melaksanakan *lesson study* ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Dilakukan secara berkala minimal dalam lingkup MGMP
- b. Setiap mata pelajaran minimal melaksanakan kegiatan *open lesson* sekali dalam semester.

**b.5. Pembelajaran mengakomodir peserta didik berkebutuhan khusus.**

Proses akomodasinya ditunjukkan dengan adanya proses deteksi dini terhadap peserta didik yang memiliki perlakuan khusus, menindaklanjuti deteksi tersebut, dan adanya pembinaan berkala bagi guru yang memiliki peserta didik berkebutuhan.

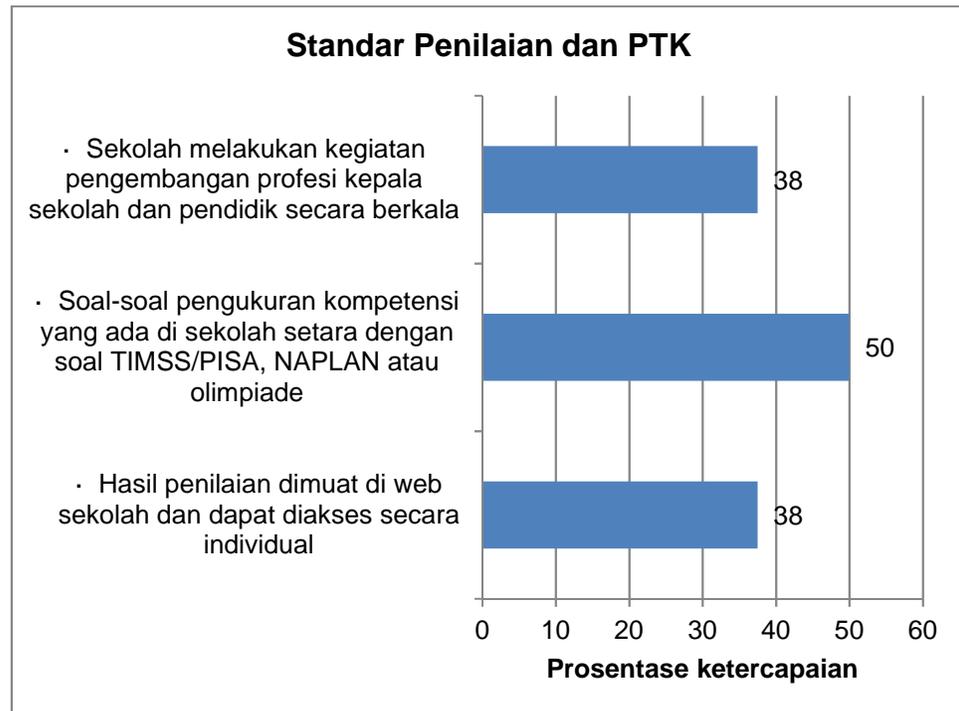
**b.6 Proses konseling diterapkan dalam proses pembelajaran**

Sekolah memiliki minimal seorang guru yang memiliki kompetensi dan atau diutamakan berkualifikasi pendidikan Bimbingan Konseling (BK). Guru BK mengembangkan program BK dan disosialisasikan ke semua warga sekolah. Semua guru memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip konseling dengan memberdayakan guru BK

**c. Melakukan Standar Penilaian sesuai program PAMS-BWI**

Penilaian Mutu sekolah/madrasah berwawasan internasional dijamin dengan keberhasilan menunjukkan kinerja pendidikan yang optimal melalui penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengendalikan mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penilaian terhadap peserta didik dilakukan oleh para guru untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu Standar Penilaian.

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan, yaitu sebagai berikut.



Gambar 4.3. Standar penilaian dan PTK.

### **c.1 Hasil penilaian dimuat dalam web sekolah dan dapat diakses secara individual**

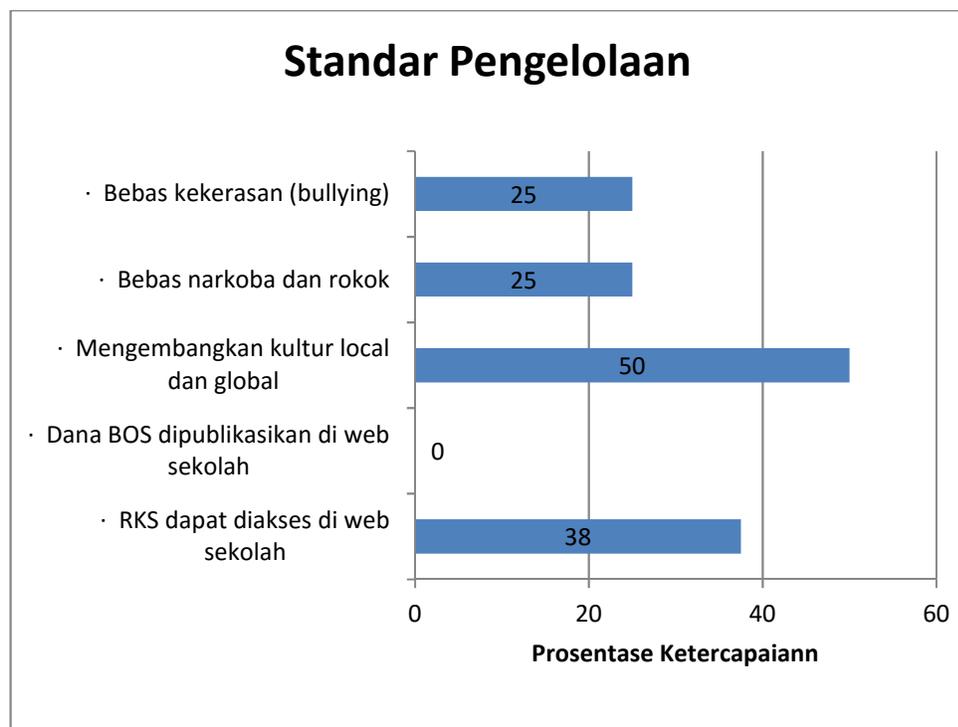
Nilai tugas dapat diakses oleh peserta didik setelah paling lambat 3 hari setelah kegiatan penilaian dilaksanakan. Yang diunggah adalah nilai ulangan harian, tugas/portofolio, UTS, UAS, dan rapor.

**c.2 Soal-soal pengukuran kompetensi yang ada di sekolah setara dengan soal TIMSS/ PISA, NAPLAN atau olimpiade**

KKM untuk soal-soal dengan tipe seperti ini ditetapkan oleh sekolah untuk terus meningkat dari tahun ke tahun.

**d. Melaksanakan Standar Pengelolaan di obyek sasaran program PAMS-BWI**

Bentuk pengelolaan sekolah menurut PAMS-BWI adalah dengan diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M)



Gambar 4.4. Standar pengelolaan

#### **d.1 RKS dapat diakses di web sekolah dan Dana BOS dipublikasikan di web sekolah**

Berdasarkan grafik diatas dapat terlihat pada aspek dana bos yang memiliki prosentase ketercapaian 0%, hal ini disebabkan seluruh sekolah sasaran belum memilih aspek tersebut dalam target tahunan ke dalam program sekolah dalam rangka mendorong kegiatan PAMS. Seperti kita ketahui bahwa pemilihan target jumlah IKKT oleh manajemen SMK cipanas hanya dibatasi 6 point saja dari 19 kriteria yang sudah ditetapkan LPMP. Sedangkan untuk RKS sudah hampir 38% sekolah sasaran sudah menerapkannya

#### **d.2 Kultur lokal dan global dikembangkan di sekolah**

Pengembangan ini ditunjukkan dengan adanya papan slogan dan upaya-upaya tertentu untuk menumbuhkembangkan kultur tersebut. seperti: adanya lomba pasangiri bilingual, adanya kebiasaan berbahasa daerah dan asing pada hari tertentu,

#### **e. Sekolah bebas narkoba, rokok dan kekerasan (bullying)**

Hal ini ditunjukkan dengan adanya papan slogan anti narkoba dan rokok. Atau sekolah dapat mengembangkan program penyuluhan anti rokok dan narkoba melalui bekerjasama dengan pihak terkait.

*Bullying* adalah sebuah tindakan kekerasan secara fisik, mental, sosial, dan seksual yang dilakukan dengan sengaja. *Bullying* dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap peserta didik secara fisik maupun psikis. Jenis-jenis *bullying*: kekerasan fisik, pelecehan seksual, tindakan pengabaian dan penelantaran, kekerasan, emosional (kata-kata yang mengancam), menakut-nakuti berkata kasar, kekerasan ekonomi, atau anak diberi tugas secara berlebihan. Hal-hal semacam ini harus tidak muncul di sekolah berwawasan internasional.

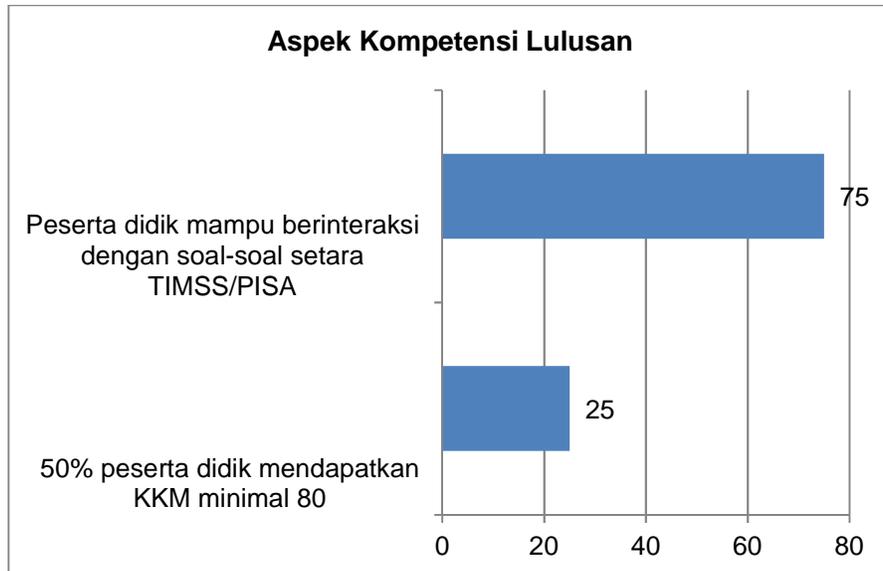
### 3. EVALUASI OUTCOMES

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang diperoleh dapat diketahui ketercapaian kriteria pada komponen *outcomes* pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Ketercapaian kriteria evaluasi pada komponen *outcomes* di sekolah sasaran

No.	Aspek Evaluasi	Kriteria Evaluasi	ALZ	B1	B2	C1	C2	CG1	CG3	CJ3
1.	Kompetensi Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50% peserta didik mendapatkan KKM minimal 80</li> </ul>		0				0		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta didik mampu berinteraksi dengan soal-soal setara TIMSS/PISA</li> </ul>	0	0	0		0	0		0

### a. Kompetensi Lulusan (SKL)



Gambar 4.5. Standar pengelolaan

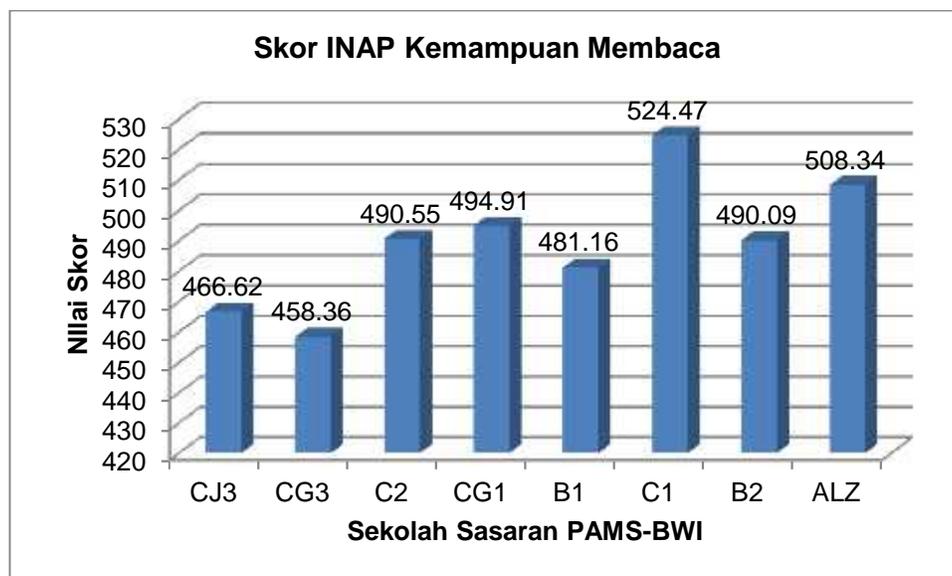
#### a.1 Memiliki Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) belajar peserta didik paling rendah 75

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa baru sekitar 25% dari sekolah sasaran yang dapat memenuhi ketercapaian dimana peserta didiknya mendapatkan nilai minimal 80, yaitu SMPN 1 Banjar dan SMPN 1 Cugenang. Artinya untuk sekolah lain yang masih berada dibawah 80 KKM nya perlu ditingkatkan kembali proses pembelajaran yang efektif melalui pola pembinaan *lesson study*.

## b. Pencapaian prestasi dan Mutu

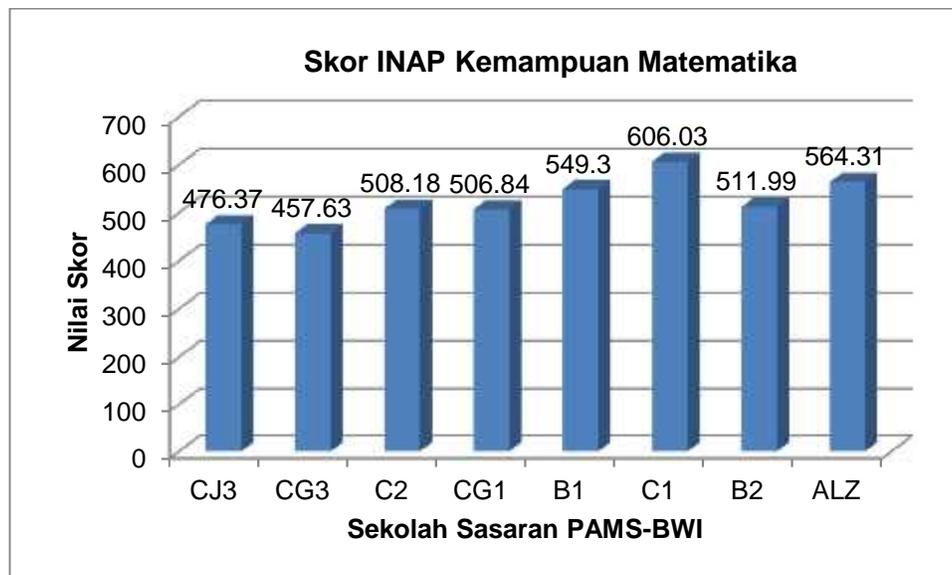
### b.1 Nilai Ujian Peserta didik mencapai nilai lebih dari 60 untuk soal-soal setara TIMSS/PISA

Melalui data yang diperoleh dari hasil pengolahan nilai tes INAP pada kompetensi membaca, matematika dan IPA, diketahui bahwa PAMS-BWI ini memberikan dampak atau pengaruh signifikan terhadap kemampuan menyelesaikan soal-soal yang setara internasional. Soal-soal yang diujikan merupakan soal yang sudah terstandarisasi dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena dibuat langsung oleh tim khusus dari Puspendik.



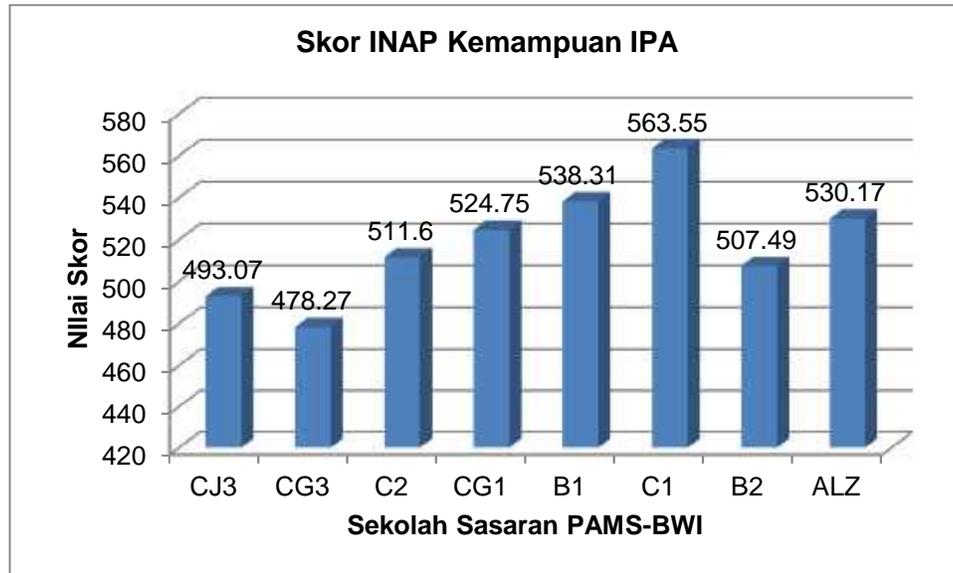
Gambar 4.6 Nilai Skor INAP untuk kemampuan siswa dalam membaca

Rata-rata skor nilai kemampuan membaca pada tes INAP diatas adalah 489. Terdapat 2 sekolah saja yang berhasil melampaui nilai diatas skor 500 yaitu SMPN 1 Cipanas dan SMPIT Al Azhar 20.



Gambar 4.7 Nilai Skor INAP untuk kemampuan siswa dalam matematika

Sedangkan untuk kemampuan matematika pada tes INAP yang diberikan menghasilkan rata-rata untuk keseluruhan pencapaian hasil adalah 523. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kemampuan matematika anak-anak sekolah sasaran cukup tinggi, dimana berhasil melampaui skor standar TIMMS-PISA yaitu 500. Adapun sekolah yang skornya masih dibawah 500 adalah SMPN 3 Cianjur dan SMPN 3 Cugenang. Dan ternyata untuk mata pelajaran IPA pun memiliki trend skor yang sama seperti halnya yang terjadi pada matematika yaitu dengan nilai skor rata-rata 518.



Gambar 4.8 Nilai Skor INAP untuk kemampuan siswa dalam IPA

Berdasarkan tabel skor hasil Tes INAP dari delapan sekolah PAMS BWI, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. SMPN 1 Cipanas Kabupaten Cianjur konsisten memiliki skor paling tinggi dan menempati peringkat pertama untuk semua kategori soal INAP yaitu membaca, Matematika dan IPA.
2. SMP IT Al Azhar 20 Kabupaten Cianjur menempati peringkat ke-2 untuk kategori membaca dan matematika, sedangkan untuk IPA menempati peringkat ke-3. Prestasi ini masih dianggap baik dan konsisten karena peringkatnya masih tidak jauh berbeda untuk ke-3 jenis tes tersebut.
3. Empat sekolah, yaitu SMPN 2 Cipanas dan SMPN 1 Cugenang dari Kabupaten Cianjur, serta SMPN 1 Banjar dan SMPN 2 Banjar dari Kota

Banjar memiliki skor INAP yang tidak konsisten. Perolehan skor ke-4 sekolah tersebut bervariasi untuk semua kategori soal INAP.

4. Dua sekolah yaitu SMPN 3 Cianjur dan SMPN 3 Cugenang menempati posisi terendah, yaitu di peringkat ke-7 untuk SMPN 3 Cianjur dan peringkat ke-8 untuk SMPN 3 Cugenang.

Tabel 4.6 Ketercapaian skor INAP PAMS-BWI di sekolah sasaran Kota Banjar dan Kabupaten Cianjur berdasarkan peringkat

NO	SEKOLAH	SKOR		SKOR		SKOR	
		MEMBACA	PERINGKAT	MATEMATIKA	PERINGKAT	IPA	PERINGKAT
1.	SMPN 3 Cianjur	466.62	7	476.37	7	493.07	7
2.	SMPN 3 Cugenang	458.36	8	457.63	8	478.27	8
3.	SMPN 2 Cipanas	490.55	4	508.18	5	511.60	5
4.	SMPN 1 Cugenang	494.91	3	506.84	6	524.75	4
5.	SMPN 1 Banjar	481.16	6	549.30	4	538.31	2
6.	SMPN 1 Cipanas	524.47	1	606.03	1	563.55	1
7.	SMPN 2 Banjar	490.09	5	511.99	3	507.49	6
8.	SMPIT Al Azhar 20	508.34	2	564.31	2	530.17	3

Dengan demikian dapat diperoleh sebuah hasil analisis yaitu soal matematika nilainya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IPA. Ini menunjukkan adanya beberapa faktor penyebab antara lain: (1) soal IPA kurang kontekstual, (2) Guru IPA yang mengajar di SMP berlatar belakang pendidikan Biologi, Kimia atau Fisika saja, sehingga guru mengalami kesulitan dalam mengajarkan beberapa topik dalam mata pelajaran IPA.

Tabel 4.7 Kecenderungan Kuantitatif Target IKKT

No.	Aspek yang dievaluasi	Kriteria Evaluasi	JML Sekolah
1.	Akreditasi	Berakreditasi minimal A dengan rata-rata minimal 90 dan tidak ada nilai standar di bawah 86 kecuali standar PTK dan Sarpras nilai minimal adalah 71	6
2.	Kurikulum/SKL	▪ Kurikulum setiap mata pelajaran terpublikasi di web sekolah	5
		▪ Peserta didik dapat mengakses program pembelajaran tiap semester	4
3.	Kompetensi Lulusan	▪ 50% peserta didik mendapatkan KKM minimal 80	2
		▪ Peserta didik mampu berinteraksi dengan soal-soal setara TIMSS/PISA	6
4.	Proses pembelajaran	• RPP/silabus dimuat di web sekolah	7
		• Pembelajaran memungkinkan dilakukan lewat fasilitas internet ( <i>e-learning</i> )	3
		• Memungkinkan terjadinya kesetaraan gender	0

No.	Aspek yang dievaluasi	Kriteria Evaluasi	JML Sekolah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan <i>Lesson Study</i> sebagai bagian peningkatan mutu proses pembelajaran. <i>Lesson Study</i> yang dikembangkan adalah berbasis saintifik</li> </ul>	5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran mengakomodir peserta didik berkebutuhan khusus</li> </ul>	1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran mengaktifkan konseling</li> </ul>	3
5.	Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penilaian dimuat di web sekolah dan dapat diakses secara individual</li> </ul>	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soal-soal pengukuran kompetensi yang ada di sekolah setara dengan soal TIMSS/PISA, NAPLAN atau olimpiade</li> </ul>	4
6.	Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RKS dapat diakses di web sekolah</li> </ul>	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana BOS dipublikasikan di web sekolah</li> </ul>	0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan kultur local dan global</li> </ul>	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bebas narkoba dan rokok</li> </ul>	2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bebas kekerasan (<i>bullying</i>)</li> </ul>	2
7.	Pendidik dan Kepala Sekolah (PTK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekolah melakukan kegiatan pengembangan profesi kepala sekolah dan pendidik secara berkala</li> </ul>	3

Tabel 4.8 Ketercapaian Kuantitatif Indikator (IKKT) 2015

Kriteria	ALZ	B1	B2	C1	C2	CG1	CG3	CJ3
Rencana	9	10	7	6	5	9	9	11
Jml IKKT	19							
% IKKT	47	53	37	32	26	47	42	57
% Indikator IKKT 2015	30%							

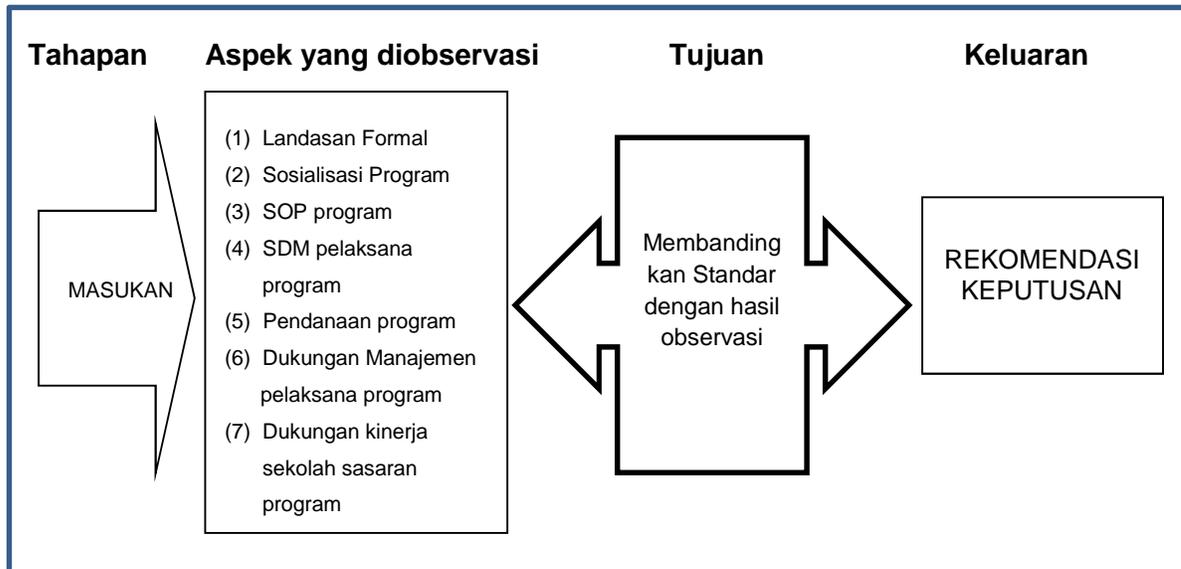
## B. PEMBAHASAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan kategorisasi terhadap 13 aspek dan 30 sub aspek ternyata menghasilkan 10 aspek dan 15 sub aspek yang memenuhi standar objektif, untuk aspek dan sub aspek lainnya secara aktual pencapaiannya belum terpenuhi sesuai target.

Berikut ini secara khusus, evaluasi setiap tahapan *antecedents*, *transaction* dan *outcome* akan dibahas lebih mendetail sebagai berikut :

### i. EVALUASI ANTECEDENTS (MASUKAN)

Berdasarkan sub evaluasi *antecedent*, terdapat 7 aspek dan 13 sub aspek yang dievaluasi. Berikut ini adalah skema kerangka berpikir dalam penelitian evaluasi pada tahapan komponen *antecedent* PAMS-BWI :



Gambar 4.9 Kerangka pikir evaluasi *antecedents* PAMS-BWI

Ketujuh aspek masukan tersebut dikategorisasikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.9 Dibawah ini :

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
<b>A. Landasan Formal</b> 1) Dasar hukum kebijakan terselenggaranya PAMS-BWI kuat dan jelas	Dasar hukum terselenggaranya PAMS-BWI sudah sangat jelas dan tegas,				0	0		Landasan formal bagi terselenggaranya PAMS-BWI ini sangat jelas

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
	karena merupakan bagian dari Tupoksi LPMP							dan kuat, namun perlu adanya penguatan peraturan terkait dengan penambahan fungsi pengawas di daerah sebagai penjamin mutu pendidikan yang sinergis dengan tupoksi LPMP
<b>B. Sosialisasi program</b>								
2) Kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap pemangku	Sosialisasi dan harmonisasi program				0	0		Sosialisasi program terlaksana 100%. Perlu

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
kepentingan PAMS-BWI minimal 1 tahun sekali	dilaksanakan 1 kali dalam setahun pada awal pelaksanaan program untuk menyamakan persepsi diantara pemangku kepentingan, sekaligus juga mendiseminasi kan program di luar sekolah sasaran							juga diseminasi ke selain sekolah sasaran
3) Subyek maupun obyek program dapat memahami materi sosialisasi program dengan baik	Materi sosialisasi program yang telah dipahami subyek dan obyek program kemudian diimplementasi				0	0		Materi sosialisasi dapat dipahami dan dimengerti oleh subyek maupun

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
	kan dalam bentuk penyusunan RTL							obyek program melalui penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
<b>C. SOP program</b>  4) SOP dapat dipahami oleh yang erkepentingan	SOP tersedia dan dipahami oleh pengelola program namun kurang detail			0		0		Adanya ketersediaan SOP sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, namun perlu dilakukan pembukuan dan penyusunan ulang dalam bentuk yang lebih rinci dan runut

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
<p><b>D. SDM pelaksana program</b></p> <p>5) SDM yang terlibat dalam pelaksanaan program tersedia sesuai kebutuhan</p>	<p>SDM/Tenaga widyaiswara dalam program PAMS-BWI sudah cukup memadai dari segi jumlah, namun perlu dipertimbangkan juga adanya peningkatan kapabilitas tenaga pendamping yang ke lapangan</p>			0		0		<p>Kebutuhan SDM/ Widyaiswara dalam program PAMS-BWI masih perlu ditingkatkan, dari segi kompetensinya sehingga perlu juga diadakan standarisasi kompetensi widyaiswara yang sudah <i>existing</i></p>

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
<p><b>E. Pendanaan program</b></p> <p>6) Waktu pencairan dana tepat waktu</p>	<p>Pendanaan PAMS-BWI biasanya tepat waktu sesuai rencana, namun khusus tahun 2015 terjadi keterlambatan akibat adanya perubahan politik dan anggaran di kemendikbud</p>			0		0		<p>Pendanaan program tetap berjalan meski tidak sepenuhnya sesuai rencana. Proporsi baru agar dievaluasi, terutama adanya alokasi untuk anggaran di sekolah sasaran. Kemudian juga perlu ada kejelasan struktur</p>

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
								organisasi khusus Tim PAMS beserta Surat Keputusan agar memiliki otoritas membuat keputusan
<b>F. Dukungan Manajemen pelaksana program</b>  7) Persentase kehadiran pelaksana program (widyaiswara) diatas 95%	Kehadiran widyaiswara dan tim pendamping mencapai diatas 90%			0		0		95% kehadiran tenaga pendamping menjadi indikasi adanya pengaturan dan

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
8) Administrasi pelaporan kegiatan tertib dan rapi	Kegiatan pelaporan rutin dilakukan dan terantau dengan adanya rapat koordinasi, namun penyimpanan dan penyusunan dokumen masih belum tertib			0		0		<p>pengorganisasian yang baik, meskipun tenaga pendamping tidak seluruhnya merupakan tim inti.</p> <p>Kegiatan pelaporan sudah menjadi rutinitas, namun perlu dibenahi masalah pengorganisasian dokumen dan data. Perlu juga ditunjuk menjadi</p>

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
								penanggung jawab dokumen dengan <i>jobdesc</i> yang jelas
<b>G. Dukungan kinerja sekolah sasaran</b>  9) Berakreditasi minimal A dengan rata-rata minimal 90 dan tidak ada nilai standar di bawah 86 kecuali standar PTK dan Sarpras nilai minimal adalah 71	Seluruh sekolah sasaran PAMS-BWI sudah berstatus terakreditasi A, khusus SMPN 2 Cugenang mendapatkannya pada tahun 2015				0	0		Sepanjang PAMS berjalan sejak tahun 2011, pemenuhan 8 standar SNP terus ditingkatkan termasuk standar PTK dan Sarpras. Namun tetap perlu adanya peningkatan

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
10) Kurikulum setiap mata pelajaran terpublikasi di web sekolah	62% sekolah sasaran PAMS-BWI yang berani mentargetkan isi kurikulum dalam setiap mata pelajarannya di web sekolah				0		0	kesadaran akan kejujuran dalam pengisian EDS yang sesuai dan berdasarkan fakta  Belum tercapai 100%. Perlu kesiapan SDM dan juga fasilitas web sekolah yang memadai untuk siap memasukkan isi kurikulum pada setiap mata pelajarannya. Oleh karenanya perlu

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
11) Peserta didik dapat mengakses program pembelajaran tiap semester	50% sekolah sasaran yang sudah ada sistem dan juga fasilitas yang memungkinkan peserta didik dapat mengakses program pembelajaran		0				0	<p>diupgrade terlebih dahulu web sekolah dengan kualitas yang baik dan ada operator khusus yang fokus menangani hal itu</p> <p>Perlu ada SDM dan fasilitas khusus dengan sistem yang sudah terintegrasi dengan seluruh <i>stakeholders</i> sekolah</p>

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
12) Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi guru dilakukan secara terprogram	37% sekolah sasaran yang sudah memiliki program kegiatan diklat dan pengembangan bagi gurunya		0				0	Perlunya sistem terpadu menyangkut program diklat dan pengembangan diri guru yang terencana untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dan sudah dialokasikan dalam anggaran di awal tahun
13) Kegiatan pengembangan profesi bagi kepala sekolah	37% sekolah sasaran yang kepala sekolahnya		0				0	Perlunya program kepala sekolah yang sudah

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
dilakukan secara berkala	sudah memiliki kesadaran akan program kegiatan diklat dan pengembangan diri bagi kemajuan sekolahnya							dianggarkan sejak awal tahun terkait dengan program diklat dan pengembangan diri guru yang terencana untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah

Keterangan :

1. Peringkat kategorisasi dengan skala interval

SR : Sangat Rendah = 1 – 25%

R : Rendah = 26 – 50%

S : Sedang = 51 – 75%

T : Tinggi = 76 – 100%

2. Peringkat ketercapaian

T : Tercapai = > 95%

TT : Tidak Tercapai = 95%

Berdasarkan kategori diatas, dapat dianalisis bahwasanya ketidaktercapaian aspek komponen *antecedent* lebih banyak terdapat pada aspek dukungan kinerja sekolah sasaran. Hal ini dimungkinkan mengingat kesiapan sekolah-sekolah sasaran yang berbeda-beda kondisi awal dan kemampuannya, banyak faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya meskipun memperoleh perlakuan (*treatment*) yang sama.

Pencapaian 8 SNP secara keseluruhan standar mengalami peningkatan dari tahun 2014, dapat dilihat untuk rata - rata capaian standar meningkat dari nilai 67% ke 91%, peningkatan tertinggi ada pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), terlihat dari instrumen yang di isi oleh guru, sekolah berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga guru dapat mengajar sesuai dengan bidang kompetensinya, dengan begitu guru dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu, standar lainnya meningkat sesuai dengan target tahun ke-2 dalam pencapaian indikator Program.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh capaian standar kompetensi lulusan mengalami peningkatan dari tahun 2014, peningkatan tertinggi ada pada indikator lulusan menunjukkan karakter (jujur, disiplin, bertanggungjawab dan menghargai orang lain), hal ini sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 yang diterapkan dengan mengedepankan sikap bagi peserta didik.

Demikian juga untuk standar isi diketahui untuk seluruh indikator mengalami peningkatan dari tahun 2014, artinya rancangan metode pembelajaran yang dikembangkan dalam kurikulum sekolah mendukung pembelajaran aktif, ada dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan KTSP, adanya proses pengembangan KTSP di sekolah berdasarkan prinsip - prinsip KTSP.

Sedangkan untuk standar proses dapat dilihat untuk seluruh indikator mengalami peningkatan dari tahun 2014, peningkatan tertinggi ada pada indikator kurikulum PBM dilakukan secara efisien dan efektif untuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku artinya guru telah memperbaiki proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi peserta didik.

Untuk Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, capaian standar pendidik dan tenaga kependidikan dapat diketahui untuk hampir semua indikator mengalami peningkatan dari tahun 2014, peningkatan tertinggi ada pada indikator peningkatan kompetensi PTK dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekolah artinya sekolah berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga guru dapat mengajar sesuai dengan bidang kompetensinya, dengan begitu guru dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam melaksanakan pembelajaran yang **bermutu**, sedangkan untuk indikator guru disiplin dalam mengajar mengalami penurunan, hal ini menjadi tugas leader sekolah dalam membina kembali

guru - guru, sehingga dapat menjalankan tupoksi dengan sungguh - sungguh.

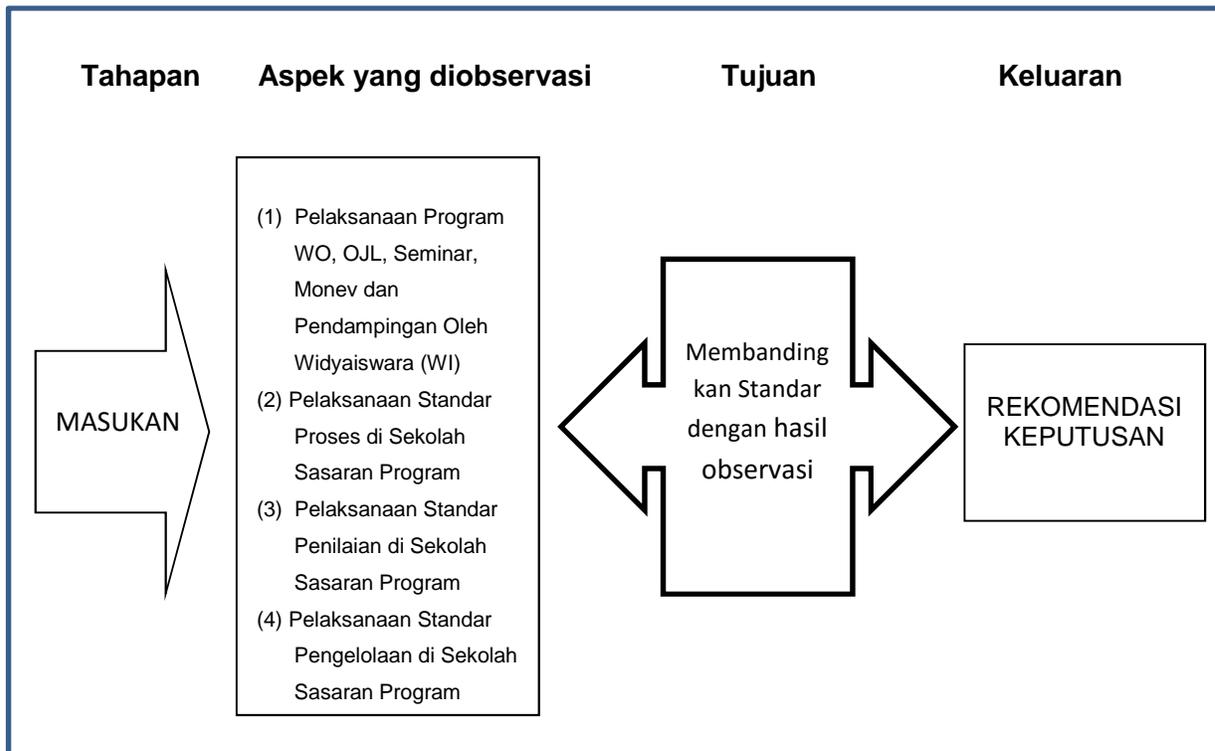
Berdasarkan capaian standar sarana dan prasarana dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2014, peningkatan tertinggi ada pada indikator prasarana dan sarana digunakan secara efisien dan efektif untuk pelaksanaan PBM yang berkualitas, sedangkan penurunan terjadi pada indikator lingkungan belajar mendukung PBM, hal ini menjadi tugas bersama dalam menciptakan kembali lingkungan yang dapat mendorong baik pendidik maupun peserta didik dalam melaksanakan PBM dengan sungguh - sungguh sehingga tercipta suasana pembelajaran yang mendukung PBM.

Sedangkan untuk Standar Pengelolaan, peningkatan tertinggi ada pada indikator Sekolah memiliki rumusan visi dan misi yang mudah difahami oleh semua komponen sekolah, sedangkan hal yang perlu diperhatikan adalah indikator yang mengalami penurunan ada pada indikator semua guru dan komponen sekolah ikut terlibat dalam pelaksanaan program sekolah yang dimuat dalam perencanaan dan komite berkontribusi efektif terhadap peningkatan mutu sekolah, perlu adanya komitmen dari pihak leader sekolah untuk mengikutsertakan guru dan komponen sekolah dalam pelaksanaan program termasuk dalam hal ini adalah komite sekolah.

Standar Penilaian, capaian standar penilaian di atas dapat dilihat bahwa semua indikator mengalami peningkatan dari tahun 2014, peningkatan tertinggi ada pada indikator penilaian dilakukan sesuai kompetensi yang diukur artinya teknik penilaian yang dilakukan untuk menilai pengetahuan peserta didik dapat ditunjukkan bukti fisiknya, Jenis penilaian sikap dan perilaku yang telah lakukan dan dapat ditunjukkan dalam bentuk portofolio peserta didik dalam satu semester, peserta didik telah melakukan penilaian karakter peserta didik (jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan bertanggungjawab), penilaian kompetensi peserta didik dalam berkomunikasi efektif dan santun, penilaian kreatifitas peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan atau menghasilkan karya, penilaian keterampilan yang telah lakukan dan dapat ditunjukkan dalam bentuk portofolio peserta didik dalam satu semester.

## **ii. EVALUASI TRANSACTIONS (PROSES)**

Berdasarkan sub evaluasi *process*, terdapat 4 aspek dan 14 sub aspek yang dievaluasi. Berikut ini adalah skema kerangka berpikir dalam penelitian evaluasi pada tahapan komponen *transactions* PAMS-BWI :



Gambar 4.10 Kerangka pikir evaluasi *transactions* PAMS BWI

Ketujuh aspek masukan tersebut dikategorisasikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini :

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
<b>H.</b> <b>Pelaksanaan Program Diseminasi, WO, OJL, Seminar, Monev dan Pendampingan Oleh Widyaiswara (WI)</b>								
1. Kegiatan seminar dan workshop program dilaksanakan sesuai rencana	Pelaksanaan kegiatan Diseminasi, WO, OJL, Seminar, Monev dan Pendampingan berlangsung dengan lancar meski ada beberapa perubahan skedul akibat gangguan				0	0		100% kegiatan terlaksana, namun Perlu perencanaan lebih matang dalam skedul

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
2.95%	<p>teknis ataupun keterlambatan pencairan dana pada tahun 2015</p> <p>Seluruh perwakilan dari pemangku kepentingan baik dari pengelola program, pengembang program, pengawas dan struktural dinas pendidikan kabupaten kota hadir, tetapi sebagian bukan orang yang tepat atau bukan dipilih orang yang tetap secara kontinyu (berganti-ganti)</p>				0	0		Yang hadir dalam diseminasi PAMS-BWI adalah orang yang punya kapasitas bisa membuat keputusan

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
<b>I.</b> <b>Pelaksanaan Standar Proses di sekolah-sekolah sasaran PAMS-BWI</b>								
3. RPP/silabus dimuat di web sekolah dan dapat diakses dengan mudah	88% dari total sekolah sasaran yang memuat RPP silabus di web sekolah				0	0		Tingkatkan kualitas web sekolah, tunjuk penanggung jawab system informasi manajemen
4. Pembelajaran memungkinkan dilakukan lewat fasilitas internet (e-learning)	Hanya 38% saja yang menerapkan <i>e learning</i>	0					0	Guru terlebih dahulu melek internet dan tidak gaptek. Untuk itu perlu buat aplikasi mudah untuk belajar menggunakan

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
5. Kesetaraan gender dalam proses pembelajaran sudah diterapkan	Belum ada sekolah sasaran yang mentargetkan untuk fokus pada isu kesetaraan gender	0					0	teknologi komputer  100% kesetaraan gen sudah berlaku di Indonesia. Berhak yang sama bagi laki-laki dan perempuan yang maju
6. <i>Lesson Study</i> sebagai bagian peningkatan mutu proses pembelajaran dikembangkan dengan berbasis saintifik	63% sekolah sasaran melakukan praktek lesson study dalam peningkatan mutu pembelajaran		0	0			0	Perlu ditingkatkan kembali pola lesson study di kelas pembelajaran dan lakukan diseminasi ke guru-guru selain IPA dan Matematika

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
7. Pembelajaran mengkomodir peserta didik berkebutuhan khusus	Terdapat 13% saja sekolah yang mencoba mengkomodir anak ABK, meskipun bukan sekolah inklusif	0					0	Jika sudah memadai kurikulum, SDM dan fasilitasnya, apakah siap menjadi sekolah inklusi?
<b>J. Pelaksanaan Standar Penilaian di sekolah sasaran</b>								
8. Hasil penilaian dimuat dalam web sekolah dan dapat diakses secara individual	Terdapat 38% sekolah yang memuat hasil penilaian di dalam web		0				0	Membuat web yang memadai untuk membuat sistem yang bisa mengakses KRS atau Nilai KHS

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
9. Soal-soal pengukuran kompetensi yang ada di sekolah setara dengan soal TIMSS/ PISA, NAPLAN olimpiade	50% menggunakan soal-soal pengukuran kompetensi setara internasional		0				0	Guru-guru perlu banyak lagi belajar dan ikut pelatihan atau MGMP untuk membuat soal-soal HTS
<b>K. Pelaksanaan standar Pengelolaan di obyek sasaran program PAMS-BWI</b>								
<b>L.</b> 10. RKS dapat diakses di web sekolah	38% sekolah sasaran yang bisa diakses RKS nya dalam web sekolah		0				0	Untuk No. 10 dan 11, agar difasilitasi pembuatan web yang lebih bagus untuk

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
11. Dana BOS dipublikasikan di web sekolah	Belum ada sekolah sasaran yang beraini memutuskan untuk mempublikasikan dana BOS di web sekolah		0				0	publikasi BOS dan RKS
12. Kultur lokal dan global dikembangkan di sekolah	Terdapat 50% sekolah sasaran yang serius mengembangkan kearifan lokal dan juga dunia		0				0	Mencari ide lagi untuk menambah kreatifitas dan inovasi budaya
13. Bebas Narkoba dan rokok	25% sekolah sasaran yang menangani permasalahan	0					0	Sekolah sasaran mulai membuat program
14. Bebas bullying	kenakalan remaja (narkoba dan kekerasan)	0					0	terpadu mengatasi narkoba dan kekerasan anak

Keterangan :

1. Peringkat kategorisasi dengan skala interval
  - SR : Sangat Rendah = 1 – 25%
  - R : Rendah = 26 – 50%
  - S : Sedang = 51 – 75%
  - T : Tinggi = 76 – 100%
2. Peringkat ketercapaian
  - T : Tercapai = > 95%
  - TT : Tidak Tercapai = 95%

Berdasarkan pengolahan data hasil kepuasan pelanggan terhadap program, dapat dilihat bahwa secara umum mengalami peningkatan, tahun 2015 semua responden menyatakan kategori baik dan baik sekali, sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta telah memahami manfaat program yang telah dilaksanakan oleh LPMP. Pengolahan data hasil kepuasan pelanggan terhadap fasilitator, dapat dilihat bahwa secara umum mengalami peningkatan, tahun 2015 semua responden menyatakan kategori baik dan baik sekali, sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta merasa puas dengan fasilitator oleh LPMP Jawa Barat.

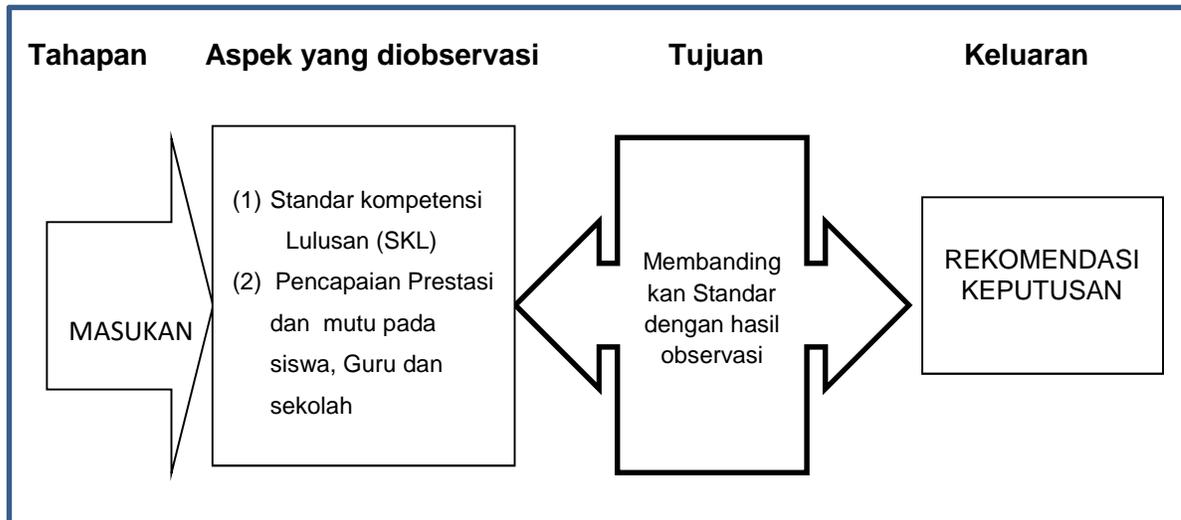
Berdasarkan pengolahan data hasil kepuasan pelanggan terhadap program, dapat dilihat bahwa secara umum mengalami peningkatan, tahun 2015 responden yang menyatakan kategori cukup hanya 3% dibandingkan dengan tahun 2014 33%, dan tidak ada yang menyatakan kurang diandingkan dengan tahun 2014 ada 2%, untuk kategori baik meningkat

dari 35% ke 85%, sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta telah merasakan dampak dari pendampingan yang dilakukan oleh LPMP Jawa Barat melalui PAMS Berwawasan Internasional

Berdasarkan pengolahan data pemenuhan kriteria WEB sekolah sudah 100 % terpenuhi baik dari aspek desain umum, teks, navigasi, link, hanya untuk sebagian gambar mengalami penurunan, namun SMPN 1 Banjar telah mengembangkan aplikasi e - learning dengan menggunakan aplikasi edmodo, aplikasi ini untuk sebagian mata pelajaran sudah dilaksanakan di beberapa kelas.

#### **i. EVALUASI OUTCOMES (KELUARAN)**

Berdasarkan sub evaluasi *process*, terdapat 2 aspek dan 3 sub aspek yang dievaluasi. Berikut ini adalah skema kerangka berpikir dalam penelitian evaluasi pada tahapan komponen *outcomes* PAMS-BWI seperti pada gambar 4.11.



Gambar 4.11 Kerangka berpikir evaluasi outcome PAMS BWI

Kedua aspek masukan tersebut dikategorisasikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.11 Dibawah ini :

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
<b>M. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)</b> 1. 50% peserta didik mendapatkan KKM minimal 80	Terdapat 2 sekolah saja atau sekitar	0					0	Tingkatkan cara belajar siswa, Guru mencari

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
	25% saja yang menyatakan hasil KKM lebih dari 80							model dan metode belajar yang tepat
<b>N. Pencapaian Prestasi dan mutu pada siswa, Guru dan sekolah</b>  2. Nilai Ujian Peserta didik mencapai nilai lebih dari 60 untuk soal-soal setara TIMSS/PISA	Nilai skor INAP untuk matematika dan IPA keduanya di atas international benchmark untuk TIMSS/PISA yaitu 500				0	0		Terus tingkatkan lagi latihan mengerjakan soal soal HOTS, terutama untuk matpel Bahasa Indonesia

Standar	Hasil Observasi	Peringkat kategorisasi				Ketercapaian		Keputusan
		SR	R	S	T	T	TT	
3. Capaian prestasi siswa, guru, kepala sekolah	Prestasi dan penghargaan banyak diperoleh dari berbagai kegiatan kompetisi				0	0		Memberikan reward dengan mengikuti pelatihan

Keterangan :

1. Peringkat kategorisasi dengan skala interval

SR : Sangat Rendah = 1 – 25%

R : Rendah = 26 – 50%

S : Sedang = 51 – 75%

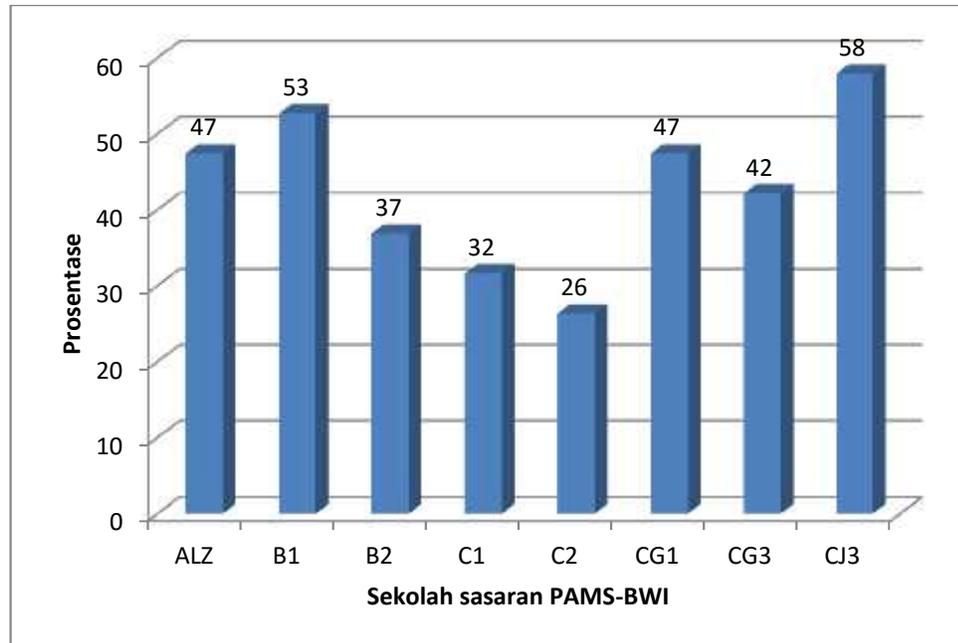
T : Tinggi = 76 – 100%

2. Peringkat ketercapaian

T : Tercapai = > 95%

TT : Tidak Tercapai = 95%

Berdasarkan kategori diatas, dapat dianalisis hal-hal sebagai berikut :



Gambar 4.12 Ketercapaian sekolah sasaran mencapai target PAMS-BWI 2015

Hasil evaluasi soal berbasis HOTS untuk mata pelajaran IPA baik tahun 2014 dan tahun 2015 menunjukkan bahwa dari secara umum semua kriteria soal HOTS, sudah tercapai tercapai. Soal IPA sudah menuntut pemikiran, tidak hanya mengingat fakta atau prosedur (kriteria no 1); soal bersifat terbuka, artinya dimungkinkan lebih dari satu jawaban atau lebih dari satu pendekatan (kriteria no 3); dimungkinkan beberapa jawaban benar (kriteria no 4); soal memungkinkan siswa memaknai materi ajar dari proses menjawab pertanyaan tersebut (Kriteria no 5); dan soal tersebut

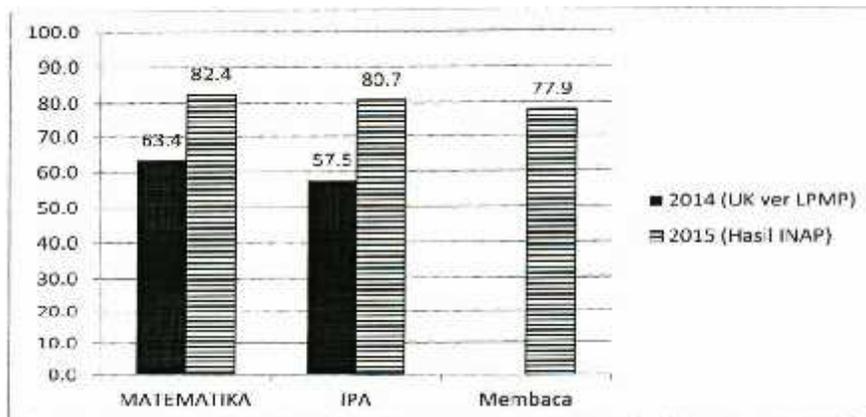
memungkinkan guru belajar tentang siswanya melalui usaha siswa menjawab pertanyaan (kriteria no 6). Namun dalam kriteria no 2 (Soal menghendaki siswa untuk) yang terbagi ke dalam 10 anak kriteria. Soal IPA hanya memenuhi 3 anak kriteria yaitu : a. menjelaskan jawabannya, membuat hubungan-hubungan, dan menerapkan materi yang telah dipelajari, namun hal tersebut telah memenuhi standar minimal 2 ciri terpenuhi.

Hasil evaluasi soal berbasis HOTS untuk mata pelajaran matematika menunjukkan bahwa secara umum pada tahun 2015 mengalami peningkatan untuk semua kriteria soal HOTS dapat dipenuhi. Soal Matematika sudah menuntut pemikiran, tidak hanya mengingat fakta atau prosedur (kriteria no 1); soal bersifat terbuka, artinya dimungkinkan lebih dari satu jawaban atau lebih dari satu pendekatan (kriteria no 3); dimungkinkan beberapa jawaban benar (kriteria no 4); soal memungkinkan siswa memaknai materi ajar dari proses menjawab pertanyaan tersebut (Kriteria no 5); dan soal tersebut memungkinkan guru belajar tentang siswanya melalui usaha siswa menjawab pertanyaan (kriteria no 6). Namun dalam kriteria no no 2 (Soal menghendaki siswa untuk) yang terbagi ke dalam 10 anak kriteria. Soal matematika hanya memenuhi 3 anak kriteria yaitu : a. menjelaskan jawabannya, membuat hubungan-hubungan, dan membandingkan, namun hal tersebut telah memenuhi standar minimal 2 ciri terpenuhi.

Tabel 4.12 Ketercapaian kriteria evaluasi PAMS-BWI 2015

Tahun	Target	Ketercapaian
TAHUN 2015	a. Tercapainya minimal 30 % indikator kinerja kunci tambahan (IKKT) b. Meningkatnya capaian siswa dalam mengerjakan soal-soal berbasis TIMSS/NAPLAN/Olimpiade dengan nilai rata-rata minimal 60 ≈400 IA	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tercapai, namun dibutuhkan pendampingan lebih lanjut</li> <li>■ Tercapai, dibuktikan dengan rerata skor INAP untuk mapel matematika 522,58 dan mapel IPA 518,40 (keduanya di atas <i>international benchmark</i> untuk TIMSS/PISA yaitu 500)</li> </ul>

Berdasarkan pengolahan hasil uji kompetensi dilihat dari grafik berikut ini bahwa nilai uji kompetensi untuk semua yaitu Matematika, IPA dan Membaca mengalami peningkatan dari tahun 2014, pada tahun 2014 soal yang dikembangkan oleh TIM LPMP Jawa Barat, sedangkan untuk tahun 2015 soal yang dipergunakan adalah tes INAP hasil kerjasama dengan Pusbangtendik, berdasarkan hasil tersebut telah banyak sasaran PAMS-BWI telah melampaui KKM yang ditetapkan, sehingga hal ini membuktikan bahwa ada dampak yang cukup signifikan terhadap siswa sebagai salah satu indikator output program dari adanya pendampingan yang dilakukan oleh LPMP Jawa Barat.



Gambar 4.13 Ketercapaian lingkungan sekolah sasaran mencapai target PAMS-BWI 2015

#### Pencapaian Lingkungan Sekolah

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada beberapa sekolah sasaran secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2014, Hal ini ditunjukkan dengan kondisi lingkungan benar-benar mencerminkan sekolah yang lingkungannya terjaga dengan baik, yaitu: 1. Kehadiran staf sekolah (kepala sekolah, guru, staf TU, penjaga) tepat waktu dalam melaksanakan tugas; 2. Kehadiran siswa tepat waktu; 3. Adanya papan slogan yang mengajak siswa untuk berperilaku etik (bebas narkoba, menjaga kebersihan, belajar sepanjang hayat, dst); 4. Warga sekolah berperilaku ramah (Senyum, atau sapa atau salam); 5. Menjaga kebersihan; 6. Terdapat atmosfer akademik yang tersebar luas di lingkungan sekolah (Penggunaan perpustakaan, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber/tempat belajar,

dst); 7. Berjalan sepanjang selasar sekolah dan menggunakan gang/pathway dengan tertib; 8. Terdapat penataan lingkungan sekolah (taman, furniture, dst) yang menunjang atmosfer akademik; 9. Terdapat kesetaraan aturan yang harus dipatuhi (membuka sepatu, bersih-bersih sekolah, dst); 10. Terdapat budaya antri. Program-program Sekolah Berbudaya Lingkungan yang ada di sekolah antara lain:

- Kondisi lingkungan sekolah tertata rapih, dan bersih, meskipun sekolah sedang melaksanakan kegiatan pembangunan kubah di lapangan upacara. Pembangunan kubah ini dilakukan untuk memfasilitasi siswa melakukan sholat berjamaah dan sholat duha
- Kebersihan kelas sampai teras dilakukan oleh siswa, pengangkutan sampah di depan kelas sampai TPS dilakukan oleh penjaga
- Penyediaan tempat sampah di depan setiap kelas, yang sudah terpisah menjadi 2 tempat yaitu sampah organik dan anorganik
- Terdapat slogan-slogan yang memotivasi warga sekolah untuk menjaga lingkungan
- Terdapat green house untuk memelihara tanaman di sekolah.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah dari hasil evaluasi menggunakan model *Countenance Stake*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

##### **Evaluasi antecedent (masukan)**

Komponen masukan mengungkapkan kesiapan beberapa aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan PAMS-BWI di LPMP Jawa Barat. Dari aspek landasan formal, dengan adanya kejelasan legalitas program memberikan keleluasaan manajemen sekolah sasaran untuk lebih mendukung program secara maksimal. Diperlukan payung hukum tambahan atau undang-undang revisi untuk dimunculkannya kewenangan para Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Kota secara penuh. Pelaksanaan sosialisasi program sudah mencakup seluruh *stakeholders*, namun perlu penguatan tindak lanjut peran dan fungsi pengawas. Ditinjau dari SDM pelaksana program, tenaga pendamping perlu dipertimbangkan untuk adanya penambahan terkait jadwal pelaksanaan PAMS-BWI yang berlangsung secara bersamaan dengan kegiatan lain. Peningkatan kompetensi pada sebagian widyaiswara diperlukan untuk standardisasi agar memiliki kemampuan yang setara. Dana operasional pada kegiatan PAMS BWI masih terdapat kendala dengan waktu pencairan yang kadang kala terlambat, meskipun demikian

dukungan dari manajemen sangat tinggi pada Tim *Adhoc* PAMS-BWI untuk melaksanakan kegiatan program. Di sisi lain yakni pada level sekolah sasaran, dukungan kinerja masih perlu ditingkatkan lagi dan perlu adanya perbaikan pada beberapa aspek terutama dalam standar proses, penilaian dan pengelolaan. Adanya PAMS-BWI mempermudah seluruh sekolah sasaran untuk mendapatkan status dengan predikat terakreditasi, melalui kurikulum yang menerapkan pola pembinaan *Lesson Study* oleh widyaiswara/tenaga pendamping, dan juga didukung oleh komitmen kuat dari kepala sekolah sasaran akan pentingnya mengikuti kegiatan PAMS-BWI.

#### **Evaluasi Transactions (proses)**

Pelaksanaan program PAMS-BWI telah sesuai dengan standar yang ada dan berjalan cukup efektif. Melalui kegiatan Workshop, On The Job Learning, Seminar, Pendampingan dan Monev dilaksanakan di sekolah-sekolah sasaran sampai dengan pelaksanaan pemenuhan standar proses, penilaian dan pengelolaan sesuai kebutuhan PAMS-BWI, menjadikan sekolah-sekolah sasaran berhasil mencapai target tahunan diatas standar yang telah ditetapkan

#### **Evaluasi Outcomes (keluaran)**

Hasil akhir yang dapat diukur sebagai bentuk keberhasilan PAMS-BWI adalah tercapainya peningkatan prestasi dan mutu bagi peserta didik dan guru. Hal ini dibuktikan dengan capaian kemampuan standar kelulusan peserta didik dalam hal kenaikan nilai KKM dan capaian pengerjaan soal-

soal HOTS setara internasional (TIMMS-PISA). Terlihat pula dengan Pencapaian prestasi peserta didik dan guru sekolah dan kepala sekolah sasaran dalam kompetisi di tingkat lokal maupun nasional membuktikan bahwa sekolah sasaran PAMS-BWI layak disetarakan dengan sekolah berwawasan internasional lainnya. Dampak dari PAMS-BWI memberi *outcomes* dengan semakin tingginya minat dan kepercayaan masyarakat di sekitar sekolah.

## **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan pada hasil penelitian tersebut di atas, maka saran dan rekomendasi dari penelitian evaluasi ini yang dapat mendukung pelaksanaan program akselerasi mutu sekolah berwawasan internasional adalah :

1. Sekolah agar mengatur jadwal kegiatan di sekolah lebih terencana, sehingga tidak terjadi benturan jadwal PAMS dengan kegiatan sekolah lainnya
2. Pengelolaan web agar lebih terencana dan terkoordinasi dengan seluruh warga sekolah, sehingga materi-materi yang seharusnya sudah dipublikasikan di web bisa dilakukan lebih cepat. Motivasi harus terus diberikan kepada guru dan siswa agar lebih terlibat aktif dengan program web sekolah

3. Penguasaan guru dalam penyusunan soal HOTS agar lebih ditingkatkan, sehingga soal yang dihasilkan bisa lebih memenuhi kaidah-kaidah soal HOTS
4. Waktu pelaksanaan monev dari LPMP agar dilaksanakan dalam waktu 3 hari, sehingga data yang dikumpulkan bisa lebih komprehensif dan akurat.

Selanjutnya, setelah melalui serangkaian observasi dan pengamatan, maka diperoleh beberapa temuan lapangan yang mungkin dapat dijadikan sebagai kajian akademik :

- a. Perlunya dilakukan peningkatan mutu kompetensi atau *upgrading* pada para pengawas di tingkat dinas pendidikan kabupaten kota, agar dapat menunjang setiap program yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan. Sebagai sebuah sistem perlu adanya kesatuan terpadu antar komponen baik di tingkat pusat, provinsi ataupun kabupaten kota. Fungsi pengawas di daerah adalah menjadi kepanjangan tangan pelaksanaan kebijakan pusat terkait dengan pendidikan
- b. Perlunya standardisasi bagi para tenaga pendamping/ widyaiswara terkait dengan pelaksanaan program PAMS-BWI dan program lainnya, agar kebutuhan akan penyelesaian permasalahan di lapangan dapat diatasi dengan kompetensi yang setara.
- c. Perlu dipertimbangkan kembali masalah eselonisasi di tingkat pengawas di provinsi dengan tenaga struktural di tingkat kabupaten

kota. Hal ini berhubungan dengan kemampuan untuk menekan pelaksanaan kerja pada tingkat yang ada dibawahnya

- d. Perlunya penguatan konsep dan juknis yang lebih baik lagi pada program PAMS-BWI ini agar sistem yang sudah berjalan dapat diadopsi oleh pemerintah pusat yang pada tahun 2016 ini baru melaksanakan program yang hampir sama yaitu SPMI (sistem penjaminan mutu internal)

## DAFTAR PUSTAKA

- Aiken Lewis R. *Rating Scales and Checklist: Evaluation Behavior Personality, and Attitude*. New York: John Wiley & Sons Inc., 1996
- Arifin, Zainal, *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktisi Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: PT Grasindo, 2008)
- Fahmi, M, Maulana A, Yusuf A.N. *A Cost-Effectiveness-Analysis of Improving School Quality in Indonesia Center for Economics and Development Acceleration or Internationalization*. Bandung: Center for Economics and Development Studies, Padjadjaran University, 2011
- Gregory, Robert J., *Tes Psikologi: Sejarah, Prinsip dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Hendayana, Sumar. *Pedoman Implementasi Lesson Study*. Bandung: PMIPA UPI dan JICA, 2007. 81
- Madaus, George F. Scriven S Michael., dan Stufflebeam L Daniel. *Evaluation Models, Viewpoints of Educational and Human Services Evaluation*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publising, 1983
- Mathison, Sandra, *Encyclopedia of Evaluation*. California: Sage Publication, 2005
- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. *Analisis data Kualitatif terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI Press, 2009
- Moir, Ellen. *Accelerating Teacher Effectiveness: Lessons Learned from Two Decades of New Teacher Induction*. Phi Delta Kappan, 2009
- Moleong Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdiakarya, Edisi Revisi, 2010
- Naga, Dali S, *Teori Sekor Pada Pengukuran Mental*. Jakarta: Nagarani Citrayasa, 2012

- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hill: Sage Publications Ins, 1987
- Sudjana, Djuju. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta, 2009
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2007
- Sukmadinata, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Stufflebeam Daniel L., George F. Madaus, dan Thomas Kellaghan, *Evaluation Models Viewpoints on Educational and Human Service Evaluation*. New York: Kluwer Academic Publishers, 2000
- Stufflebeam, Daniel L., dan Anthony J. Shinkfield, *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Fransisco: Jossey-Bass, 2007
- Stake, E. Robert. *Center For Instructional Research Ana Curriculum Evaluation Countenance*. Illinois: University of Illinois, 1976.
- Stake, Robert E., Dalam *Evaluation Models, Program Evaluation, Particularly Responsive Evaluation*. Urbana, 1983.
- Suzanne, Anthony and Murray, T. *Accelerating School Quality Through School Peer Reviews*. New Delhi: Brooking Institution India, 2012
- Tayibnapis, F.Yusuf., *Evaluasi program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Widoyoko, E.P. *Evaluasi Program 2009. Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Wirawan, *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/07/24/indeks-pembangunan-manusia-norwegia-no-1-indonesia-no-108>, diakses 12 Desember 2015
- <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/14/02/27/kemana-arah-pendidikan-indonesia>, diakses, 12 Desember 2015
- <http://www.kopertis12.or.id/2013/12/05/skor-pisa-posisi-indonesia-nyaris-adi-juru-kunci>, diakses, 12 Desember 2015

[http://www. tc. edu/lessonstudy/ what is lesson study. htmJ](http://www.tc.edu/lessonstudy/what_is_lesson_study.htm), diakses 13 Januari 2016

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010; Prioritas Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan. Bandung: Citra Umbara, 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Permendiknas nomor 19 tahun 2005 tentang SNP. Jakarta , 2015

Permendiknas No. 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

## Lampiran 1. Validasi Instrumen Penelitian

### VALIDASI INSTRUMEN

#### Evaluasi Program Akselerasi Mutu Sekolah

#### Berwawasan Internasional PAMS-BWI di LPMP Jawa Barat

---

#### 1. Validasi isi instrumen evaluasi program yang ditujukan pada pengelola program (Widyaiswara)

Dalam penyusunan instrumen evaluasi program ditujukan kepada pengelola (widyaiswara/tenaga pendamping) , diperoleh masukan melalui penilaian dua pakar yaitu : Dr. Herdiyana, M.M (Dosen/Universitas Pakuan) dan Dr. Wendy Asswan Cahyadi, M.Pd (Dosen UIKA /BAN PT). Keduanya adalah pakar yang sudah memenuhi persyaratan sebagai penilai (*judges*). Hasil validasi kedua pakar tersebut menunjukkan bahwa butir instrumen evaluasi program yang ditujukan kepada pengelola program tlah mencerminkan keadaan yang hendak diukur sehingga dapat dianggap telah memenuhi validitas isi.

Hasil penilaian instrumen evaluasi program yang ditujukan kepada pengguna (pengelola program), dari dua orang pakar tersebut adalah :

Penilai 1		Penilai 2	
Kurang Relevan (Skor 1-2)	Sangat Relevan (Skor 3-4)	Kurang Relevan (Skor 1-2)	Sangat Relevan (Skor 3-4)
23, 35	1,2,3,4,5,6,7, 8, 9,10,11 12,13,14,15, 16,17,18	11,27	1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,12,13,14,1 5,16,17,18 19,20,21,22,24,

Penilai 1		Penilai 2	
Kurang Relevan (Skor 1-2)	Sangat Relevan (Skor 3-4)	Kurang Relevan (Skor 1-2)	Sangat Relevan (Skor 3-4)
	19,20,21,22, 24, 25,26 ,27,28,29,31, 32,33,34 36,37,38,39, 40		25,26 ,28,29,31,32,33 ,34 36,37,38,39, 40

Hasil penilaian dari dua orang pakar (ahli) dimasukkan ke dalam tabulasi silang (2x2) yang terdiri dari empat kolom sebagai berikut :

		Penilai 1	
		Kurang Relevan (Skor 1-2)	Sangat Relevan (Skor 3-4)
Penilai 2	Kurang Relevan (Skor 1-2)	<b>A</b> (0)	<b>B</b> (2)
	Sangat Relevan (Skor 3-4)	<b>C</b> (2)	<b>D</b> (38)

Rumus untuk menghitung validitas isi instrumen evaluasi program yang ditujukan kepada pengelola program adalah sebagai berikut :

$$VI = \frac{D}{A + B + C + D}$$

Keterangan :

VI = Validasi Isi

A = Kedua pakar/penilai tidak setuju

B = Penilai I setuju, penilai II tidak setuju

C = Penilai I tidak setuju, penilai II setuju

D = Kedua pakar/penilai setuju

Kriteria Validasi isi :

0,80 – 1,00 : validasi isi sangat tinggi

0,60 – 0,79 : validasi isi tinggi

0,40 – 0,59 : validasi isi sedang

0,20 – 0,39 : validasi rendah

0,00 – 0,19 : validasi sangat rendah

$$\text{Validasi isi} = \frac{38}{0 + 2 + 2 + 38} = 0,904$$

Jadi validitas isi instrumen evaluasi program yang ditujukan kepada pengelola program adalah **0,94**. Sehingga instrumen tersebut termasuk dalam kategori **validitas isi sangat tinggi**

## **2. Validasi isi instrumen evaluasi program yang ditujukan pada guru model/inti di sekolah sasaran program**

Dalam penyusunan instrumen evaluasi program ditujukan kepada guru model di sekolah sasaran program , diperoleh masukan melalui penilaian dua pakar yaitu : Dr. Herdiyana, M.M (Dosen/Universitas Pakuan) dan Dr.

Wendy Asswan Cahyadi, M.Pd (Dosen UIKA /BAN PT). Keduanya adalah pakar yang sudah memenuhi persyaratan sebagai penilai (*judges*). Hasil validasi kedua pakar tersebut menunjukkan bahwa butir instrumen evaluasi program yang ditujukan kepada pengelola program telah mencerminkan keadaan yang hendak diukur sehingga dapat dianggap telah memenuhi validitas isi.

Hasil penilaian instrumen evaluasi program yang ditujukan kepada pengguna (pengelola program), dari dua orang pakar tersebut adalah :

Penilai 1		Penilai 2	
Kurang Relevan (Skor 1-2)	Sangat Relevan (Skor 3-4)	Kurang Relevan (Skor 1-2)	Sangat Relevan (Skor 3-4)
14	1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11 12,13, 15,16,17,18 19,20,21,22,24, 25,26 ,27,28,29,30	9	1,2,3,4,5,6,7,8, 10,12,13,14,15, 16,17,18 19,20,21,22,24, 25,26,28,29,30

Hasil penilaian dari dua orang pakar (ahli) dimasukkan ke dalam tabulasi silang (2x2) yang terdiri dari empat kolom sebagai berikut :

		Penilai 1	
		Kurang Relevan (Skor 1-2)	Sangat Relevan (Skor 3-4)
Penilai 2	Kurang Relevan (Skor 1-2)	<b>A</b> (0)	<b>B</b> (1)
	Sangat Relevan (Skor 3-4)	<b>C</b> (1)	<b>D</b> (29)

Rumus untuk menghitung validitas isi instrumen evaluasi program yang ditujukan kepada pengelola program adalah sebagai berikut :

$$VI = \frac{D}{A + B + C + D}$$

Keterangan :

VI = Validasi Isi

A = Kedua pakar/penilai tidak setuju

B = Penilai I setuju, penilai II tidak setuju

C = Penilai I tidak setuju, penilai II setuju

D = Kedua pakar/penilai setuju

Kriteria Validasi isi :

0,80 – 1,00 : validasi isi sangat tinggi

0,60 – 0,79 : validasi isi tinggi

0,40 – 0,59 : validasi isi sedang

0,20 – 0,39 : validasi rendah

0,00 – 0,19 : validasi sangat rendah

$$\text{Validasi isi} = \frac{28}{0 + 2 + 2 + 28} = 0,875$$

Jadi validitas isi instrumen evaluasi program yang ditujukan kepada pengelola program adalah **0,875**. Sehingga instrumen tersebut termasuk dalam kategori **validitas isi sangat tinggi**

Lampiran 2. Pedoman wawancara yang ditujukan untuk pengelola program

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Evaluasi Program Akselerasi Mutu Sekolah**

#### **Berwawasan Internasional PAMS-BWI di LPMP Jawa Barat**

---

Pedoman wawancara ini ditujukan untuk Pengelola Program

- A. Hari/Tgl Wawancara : .....
- B. Waktu wawancara : .....
- C. Lokasi Wawancara : .....
- D. Nama : .....
- E. Pertanyaan wawancara :

#### **Komponen Antecedent**

1. Apakah Landasan formal/hukum kebijakan menyelenggarakan Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan Internasional (PAMS-BWI) ini?

Jawaban :

.....

2. Menurut anda, apakah perlu adanya peraturan baru yang menguatkan penyelenggaraan PAMS-BWI atau merevisi undang-undang /peraturan baru untuk kelancaran progmr?

Jawaban :

.....

3. Apakah Tim pengelola PAMS-BWI sudah melakukan sosialisasi secara tertib dan terjadual? Bagaimana cara melakukan sosialisasi? Bagaimana strateginya?

Jawaban :

.....

4. Apakah sosialisasi PAMS-BWI sudah tepat sasaran? Siapa saja yang mendapatkan sosialisasi?

Jawaban :

.....

5. Menurut pendapat anda, Bagaimana efektifitas SOP dalam pelaksanaan kegiatan PAMS-BWI?

Jawaban :

.....

6. Apakah SOP PAMS-BWI yang telah disusun mudah diterapkan?

Jawaban :

.....

7. Bagaimana kecukupan tenaga pendamping dalam kegiatan PAMS-BWI?

Jawaban :

.....

8. Apakah terdapat persyaratan/kualifikasi khusus untuk tenaga pelaksana PAMS-BWI?

Jawaban :

.....

**Komponen Transactions**

23. Bagaimana anda membuat perencanaan jadual supervisi untuk tenaga pendamping PAMS-BWI?

Jawaban :

.....

24. Bagaimana prosedur pemantauan dan supervisi yang bapak lakukan selama proses kegiatan PAMS-BWI?

Jawaban :

.....

**Komponen Outcomes**

33. Apakah pelaksanaan PAMS-BWI memberikan kontribusi kepada peningkatan nilai KKM belajar siswa di sekolah sasaran?

Jawaban :

.....

34. Menurut anda, bagaimana cara mudah menaikkan nilai KKM siswa di sekolah sasaran?

Jawaban :

.....

35. Menurut anda apakah peningkatan nilai skor INAP adalah merupakan hasil dari pelaksanaan PAMS-BWI?

Jawaban :

.....

36. Apakah soal-soal HOTS setara internasional memacu semangat siswa untuk belajar?

Jawaban :

.....

37. Menurut anda, apakah program PAMS telah memberi kontribusi bagi prestasi guru model di sekolah sasaran?

Jawaban :

.....

38. Penghargaan seperti apakah yang diberikan pimpinan bagi guru yang berprestasi?

Jawaban :

.....

## RIWAYAT HIDUP



**Eddy Fadillah Safardan**, lahir di Bandung Jawa Barat pada tanggal 4 Maret 1975, anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ating Suhana dan Ibu Rodiah, telah menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Depok Baru IV pada tahun 1988, pendidikan menengah di SMPN 2 Depok pada Tahun 1991 dan pendidikan

menengah atas di SMAN 1 Depok pada Tahun 1994. Melanjutkan Kuliah Sarjana di IPB Bogor pada Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi (TPG) dan lulus pada tahun 1999. Kemudian meneruskan kuliah S2 di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah pada Program Magister Manajemen hingga lulus pada tahun 2007. Kemudian mendapatkan kesempatan kembali pada tahun 2014 untuk melanjutkan pendidikan pada program S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melalui program beasiswa kepengawasan dari Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Direktorat Jendral Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tanggal 9 September 2001 menikah dengan Dr. Nur Wulandari, M.Si dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Farhan Rizqy Ghazali dan Sabrina Nurfathiyya Rahma. Pengalaman sebagai tenaga pengajar diperoleh dari Program Diploma IPB Bogor pada Program Keahlian Jaminan Mutu Pangan (JMP) dan Universitas Juanda Bogor pada Program Studi Teknologi Pangan dan Gizi (TPG), kemudian hingga sekarang juga masih mengajar di SMKN 1 Cipanas, Cianjur pada Program Keahlian Agribisnis Hasil Pertanian.